

**PERKEMBANGAN PASAR KANOMAN CIREBON (1924–1942)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**M. IMAM BAIHAQI**

**NIM:221104040006**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
DESEMBER 2025**

# **PERKEMBANGAN PASAR KANOMAN CIREBON (1924–1942)**

## **SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Jurusan Studi Islam  
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

M. Imam Baihaqi

NIM : 221104040006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
DESEMBER 2025**

# **PERKEMBANGAN PASAR KANOMAN CIREBON (1924–1942)**

## **SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Jurusan Studi Islam  
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam



Oleh:

M. Imam Baihaqi

NIM : 221104040006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :

Mawardi Purbo Sanjovo, M.A.

NIP. 199005282018011001

# PERKEMBANGAN PASAR KANOMAN CIREBON (1924–1942)


## SKRIPSI

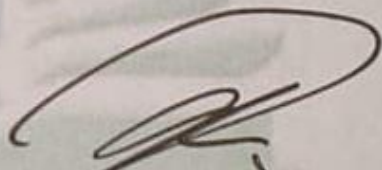
Telah diuji dan diterima memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Sejarah Peradaban dan Islam  
Hari: Senin  
Tanggal: 22 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

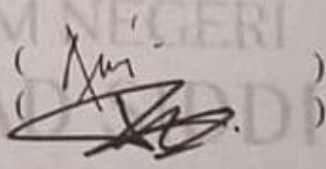
Sekretaris

  
Dr. Akhivat, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 197112172000031001

  
Ahmad Hanafi, M.Hum.  
NIP. 198708182019031004

Anggota:

1. Dr. Amin Fadlillah, SQ., M.A.
2. Mawardi Purbo Sanjoyo, M.A.

  
Menyetujui  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



## MOTTO

*Pelajari apa yang telah terjadi agar siap dengan apa yang akan terjadi<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Motto ini merupakan hasil refleksi dan pemikiran pribadi peneliti.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada Almamater saya sendiri

Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

dan Yayasan Studi Sejarah Kulit Pohon,



## ABSTRAK

**Imam Baihaqi, M.. 2025.** *Perkembangan Pasar Kanoman Cirebon (1924–1942).*

Pasar menjadi ruang berlangsungnya beragam aktivitas sosial dan ekonomi. Setiap pasar memiliki dinamika tersendiri serta memberikan pengaruh tertentu bagi kehidupan masyarakat. Pasar Kanoman hadir di lingkungan Keraton Kanoman Cirebon, dalam perkembangannya pasar kanoman tidak hanya menjadi tempat jual beli terjadi. Akan tetapi, terdapat kebijakan-kebijakan dari kolonial Belanda yang diterapkan sehingga membuat dampak bagi masyarakat baik itu penjual maupun pembeli. Kebijakan yang diterapkan oleh Kolonial Belanda menjadikan Pasar Kanoman menjadi pasar yang paling megah di Gemeente Cheribon pada tahun 1924-1942.

Penelitian ini memiliki dua fokus utama, yaitu perkembangan Pasar Kanoman Cirebon pada tahun 1924–1942 dan dampak dari perkembangan tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Sejalan dengan fokus tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan Pasar Kanoman Cirebon pada periode 1924–1942 serta mengkaji dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan pemilihan tema, pengumpulan sumber, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer yang digunakan meliputi foto-foto dari KITLV dan Wereldmuseum, surat kabar dari Delpher Kranten, peta lama dari OldMaps Online, Staatsblad, serta laporan Gemeente Cheribon yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Seluruh sumber tersebut diverifikasi melalui kritik internal dan eksternal untuk memperoleh data yang valid sebelum dilakukan penafsiran dan penulisan sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Pasar Kanoman pada periode 1924–1942 dapat dibagi ke dalam tiga babak. Pertama, periode pra-1924, yang ditandai dengan perubahan status Kota Cirebon menjadi gemeente pada tahun 1906, penerapan pasar ordonansi tahun 1914, serta proses penjualan tanah dan penggusuran di sekitar pasar. Kedua, periode 1924–1929, ketika Pasar Kanoman mengalami perkembangan pesat melalui proses modernisasi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan didukung oleh perubahan status Cirebon menjadi stadsgemeente pada tahun 1926. Ketiga, periode 1930–1942, yaitu masa Pasar Kanoman menghadapi dampak krisis ekonomi global serta menjelang akhir kekuasaan kolonial. Secara umum, perkembangan tersebut berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi, terbukanya lapangan kerja, dan meningkatnya mobilitas sosial, sekaligus mempertahankan Pasar Kanoman sebagai simbol kedekatan antara Keraton Kanoman dan masyarakat.

**Kata Kunci :** *Pasar, Kebijakan, Cirebon*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkat limpahan nikmat, rahmat, dan ridha-Nya, penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sosok mulia pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi berjudul “Perkembangan Pasar Kanoman Cirebon (1924-1942)” ini disusun sebagai upaya mendalami lebih jauh interaksi dan dinamika pasar Kanoman Cirebon pada masa Kolonial Belanda terutama pada tahun 1924-1942. Dalam prosesnya, peneliti menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan referensi, kemampuan bahasa, serta hambatan jarak. terselesaikannya skripsi ini tentu bukan hanya hasil usaha peneliti, tetapi berkat dukungan banyak pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. beserta pimpinan fakultas, seluruh staf dan karyawan di lingkungan fakultas yang selalu melayani peneliti dengan setulus hati.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember Bapak Dr. Win Usuluddin, M.Hum., atas bimbingan serta motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.



4. Koordinator Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Bapak Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd., atas motivasi agar tetap terus belajar.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Mawardi Purbo Sanjoyo, M.A, atas bimbingan yang sabar, teliti, dan penuh perhatian. Beliau tidak hanya memberikan arahan ilmiah, tetapi juga motivasi dan keyakinan yang membantu peneliti berkembang dari ketidaktahuan hingga mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
6. Seluruh dosen Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam atas ilmu yang telah diberikan. Ucapan terima kasih yang lebih khusus penulis tujukan kepada Bapak Ahmad Hanafi, M.Hum., dan Bapak Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sosio., atas waktu, ilmu, serta pengalaman yang mereka bagikan, yang sangat membantu selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga tercinta Umi, Mama, Teteh, Aa dan sibotak, berserta keluarga besar yang selalu memberikan semangat, do'a dan kasih sayang tanpa batas.
8. Yayasan Studi Sejarah Kulit Pohon dan Yayasan Lingkar Studi Sejarah Murtasiya yang telah menjadi tempat proses belajar mendalam ilmu sejarah.
9. Kawan-kawan Sejarah dan Peradaban Islam angkatan 2022 yang telah menjadi kawan yang menyenangkan selama berkuliah, khususnya kawan kawan Yayasan Studi Sejarah Kulit Pohon telah menjadi kawan ngopi sambil diskusi yaitu Gazza Triatama , Dimas Permadi, Marsyidza, Untsa Islami K., Dio Islam Gimnastiyar, Marsyidza dan terutama Exlima Ramadani sahabat berproses dan berkembang selama kuliah.
10. Tim Humas dan Kontributor humas yang memberikan banyak pengalaman

semasa kuliah seperti diajak makan bersama dengan pimpinan kampus. Serta tempat canda tawa sekaligus belajar. Khususnya teman-teman kontributor humas angkatan 1.

11. Prof. K.H. Didin Nurul Rosidin, S.Ag., M.A., Ph.D., selaku panutan peneliti dalam perjalanan menempuh pendidikan sejarah Islam sekaligus ustadz dan guru peneliti selama belajar agama di Pondok Pesantren Al Mutawally Kuningan yang telah memberikan masukan, motivasi, serta arahan yang sangat bernilai bagi peneliti.

12. Kang Farihin sejarawan Cirebon yang menjadi tempat bertanya dan memberikan arahan tentang sejarah Cirebon.

13. Pondok Pesantren At-taubah, Fajar, Zidan, kamal, fadhil dan Ahsan. Sesama perantau yang sama-sama ingin jadi orang sukses.

14. Segenap pihak yang telah membantu peneliti selama mengerjakan skripsi ini. Mohon maaf bila banyak yang masih belum disebutkan, akan tetapi peneliti berdo'a semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan balasan kebaikan bagi kalian semua. Khususnya *Anagata*.

Akhir kata, penulis hanya dapat memanjatkan doa agar segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis juga memohon maaf dengan tulus atas segala kekurangan dan kekhilafan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.

Jember, 10 November 2025

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN .....	I
HALAMAN JUDUL DALAM .....	II
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	III
LEMBAR PENGESAHAN .....	IV
MOTTO .....	V
PERSEMBAHAN.....	VI
ABSTRAK .....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR TABEL .....	XV
DAFTAR GAMBAR .....	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Definisi Istilah.....	12
H. Kerangka Konseptual .....	14
I. Metode Penelitian.....	15

J. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II CIREBON MASA KLASIK HINDU-BUDHA, MASA ISLAM DAN</b>	
<b>MASA KOLONIAL .....</b>	<b>23</b>
A. Cirebon Masa Klasik Hindu Budha .....	23
B. Cirebon Masa Islam .....	28
1. Masa peralihan Islam .....	28
2. Keraton Kasepuhan .....	33
3. Keraton Kanoman .....	35
C. Cirebon Masa Kolonial .....	40
1. VOC .....	40
2. Hindia Belanda.....	45
<b>BAB III CIREBON KOTA PELABUHAN.....</b>	<b>50</b>
A. Cirebon sebagai Pelabuhan Dagang.....	50
1. Letak Geografis dan Keunggulan Strategis.....	50
2. Pelabuhan sebagai Titik Temu Berbagai Etnis.....	53
3. Penghubung Muara & Pedalaman.....	55
B. Komoditi & Bentuk Kewilayahan Cirebon.....	60
1. Komoditi Cirebon.....	60
2. Pembentukan Wilayah Dagang .....	66
3. Peran Keraton dalam Ekonomi Cirebon .....	69
C. Pola Perdagangan Cirebon .....	70
1. Jaringan Perdagangan Lokal dan Regional .....	70
2. Perdagangan Etnis di Cirebon.....	73

3. Pasar Tradisional Sebagai Pusat Perdagangan & Pola Perdagangan di Bawah Kolonial .....	75
<b>BAB IV PASAR KANOMAN 1924-1942 .....</b>	<b>79</b>
A. Pasar Kanoman Pra – 1924 .....	79
1. Awal Berdirinya Pasar & Hubungan dengan Keraton .....	79
2. Gemeente Cherbon 1906 & Dampaknya Pada Tata Kelola Pasar .....	82
3. Regulasi Pasar Ordonansi 1914 .....	84
4. Perubahan Tata Ruang: Penjualan Tanah Keraton & Pergusuran .....	87
B. Renovasi & Modernisasi Pasar 1924-1926.....	89
1. Latar Belakang Renovasi Pasar.....	89
2. Renovasi Besar 1924-1925 .....	94
3. Status <i>Stadsgemeente</i> (1926) & Kebijakan.....	96
C. Pasar Kanoman 1930 – 1942.....	101
1. Pasar Kanoman di Tengah Krisis Ekonomi 1930-an .....	101
2. Dinamika Etnis dalam Pasar Kanoman.....	103
3. Pasar Kanoman Menjelang Akhir Kolonialisme (1935–1942).....	105
D. Dampak perkembangan pasar kanoman 1924-1942 .....	108
1. Dampak Positif.....	108
2. Dampak Negatif .....	109
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>122</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>132</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>133</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4. 1 Perbandingan Sensus Penduduk Cirebon Antara Tahun 1890 Dan 1920.....</b>	<b>89</b>
<b>Tabel 4. 2 Perbandingan Jumlah Etnis Di Cirebon Antara Tahun 1920-1930 .....</b>	<b>104</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lingga yoni di keraton kasepuhan .....	27
Gambar 2. 2 Salah satu arca yang terdapat di situs pejambon .....	27
Gambar 2. 3 Masjid Agung sang cipta rasa 1911 .....	32
Gambar 2. 4 Nasab Keturunan Keluarga Keraton Kanoman.....	39
Gambar 3. 1 Peta tanah priangan bagian pantai utara jawa 1600-1700 M. .	51
Gambar 3. 2 Bagan Jumlah Produksi Komoditas Perdagangan Daerah Cirebon pada Akhir Abad ke-18 .....	63
Gambar 4. 1 Surat kabar tentang penyebutan pasar kanoman terlama yang ditemukan oleh penelti tercatat pada tahun .....	80
Gambar 4. 2 Pasien anak-anak akibat penyakit malaria di Cirebon tahun 1920 .....	91
Gambar 4. 3 Surat kabar tentang pembongkaran deretan rumah yang berdiri terlalu dekat dengan area pasar .....	94
Gambar 4. 4 Pasar Kanoman tampak depan sekitar tahun 1931-1932 .....	96
Gambar 4. 5 Interior dalam pasar Kanoman 1931 .....	102



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa, pasar juga merupakan salah satu institusi sosial-ekonomi tertua yang merepresentasikan dinamika kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Ia tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan budaya yang membentuk tatanan kehidupan ekonomi lokal. Dalam konteks sejarah Indonesia, pasar memiliki peranan penting dalam perkembangan kota-kota pesisir, terutama di Pulau Jawa, yang sejak masa kerajaan hingga kolonial menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial.<sup>3</sup>

Kota Cirebon, sebagai salah satu kota pelabuhan di pesisir utara Jawa,<sup>4</sup> memiliki hubungan erat dengan perkembangan kegiatan perdagangan dan pertumbuhan pasar tradisional. Sejak masa kerajaan Islam hingga periode kolonial, pasar di Cirebon telah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat serta ruang interaksi multi-etnis antara pribumi, Tionghoa, Arab, dan kelompok lain. Pasar tidak hanya menjadi tempat pertukaran barang, tetapi juga arena

---

<sup>2</sup> Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2015): 177–92.

<sup>3</sup> Istijabatul Aliyah, "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan," *Cakra Wisata* 18, no. 2 (2017).

<sup>4</sup> T.D. Sudjana, "Pelabuhan Cirebon Dahulu Dan Sekarang," in *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, 2nd ed. (Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997), 209–30.

pertukaran nilai, budaya, dan gagasan yang memperkaya karakter sosial Cirebon sebagai kota pelabuhan yang kosmopolit.

Salah satu pasar paling berpengaruh di Cirebon adalah Pasar Kanoman, yang berlokasi di kawasan Keraton Kanoman. Keberadaan pasar ini mencerminkan keterkaitan erat antara kekuasaan politik tradisional dan kehidupan ekonomi rakyat. Letaknya yang berdekatan dengan keraton menunjukkan bahwa sejak awal, aktivitas ekonomi di Cirebon tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan politik kerajaan. Pasar Kanoman menjadi tempat beredarnya hasil bumi, kerajinan, dan berbagai komoditas dari pedalaman serta barang-barang impor dari pelabuhan, menjadikannya salah satu titik sentral perdagangan di Cirebon.

Transformasi besar terjadi pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, khususnya setelah Cirebon ditetapkan sebagai Gemeente (Kota Praja) pada tahun 1906.<sup>5</sup> Kebijakan kolonial dalam penataan tata kota membawa dampak signifikan terhadap sistem pasar. Pemerintah kolonial mulai membangun pasar permanen sebagai bagian dari modernisasi perkotaan. Tahun 1924 menjadi momentum penting karena pada masa inilah dilakukan renovasi besar-besaran terhadap Pasar Kanoman, menjadikannya salah satu pasar utama yang berperan dalam perekonomian kota.

Selain perubahan fisik dan arsitektural, perkembangan Pasar Kanoman juga mencerminkan perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat. Dominasi pedagang Tionghoa pada awal abad ke-20 memperlihatkan adanya pergeseran

---

<sup>5</sup> “Staatsblad. No. 122 Tahun 1906,” n.d.

peran dalam jaringan perdagangan lokal. Sementara itu, masyarakat pribumi dan pihak keraton harus beradaptasi terhadap kebijakan ekonomi kolonial dan pola perdagangan baru yang lebih terorganisir serta berorientasi pada sistem kapitalistik. Interaksi antar kelompok sosial ini menciptakan dinamika tersendiri dalam kehidupan masyarakat sekitar pasar.

Keberadaan bangunan Pasar Kanoman yang dapat disaksikan saat ini tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi fisik pasar pada masa lalu. Perubahan, perbaikan, dan pembangunan ulang yang dilakukan dari waktu ke waktu, termasuk akibat peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar tahun 1970 sampai 1980 telah menyebabkan terjadinya perubahan pada sebagian bentuk bangunan asli pasar. Proses kerusakan dan perbaikan tersebut berpotensi mengaburkan jejak arsitektural serta tata ruang lama, sehingga pembacaan sejarah Pasar Kanoman tidak dapat semata-mata didasarkan pada kondisi fisik bangunan yang ada saat ini. Oleh karena itu, bangunan Pasar Kanoman perlu dipahami sebagai hasil dari proses historis yang panjang, di mana wujud fisiknya merepresentasikan lapisan-lapisan sejarah yang terbentuk oleh dinamika sosial, ekonomi, dan peristiwa yang dialami pasar tersebut.

Meskipun demikian, peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar tahun 1970 sampai 1980 tidak mengakibatkan perubahan total terhadap seluruh struktur bangunan Pasar Kanoman. Sejumlah bagian bangunan masih mempertahankan bentuk serta elemen arsitektural aslinya, sehingga jejak material masa lalu tetap dapat dikenali hingga saat ini. Namun, proses perbaikan dan penyesuaian pascakebakaran tetap membawa perubahan pada beberapa

bagian pasar, baik dari segi tata ruang maupun material bangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pasar Kanoman merupakan ruang yang terus mengalami perubahan secara bertahap, di mana bangunan yang ada saat ini merupakan hasil dari perpaduan antara struktur lama yang bertahan dan intervensi baru akibat peristiwa sejarah yang dialaminya. Dengan demikian, pembacaan terhadap Pasar Kanoman perlu dilakukan secara historis, dengan mempertimbangkan keberlanjutan sekaligus perubahan yang membentuk wujud pasar dari masa ke masa.

Dengan latar sejarah yang panjang tersebut, Pasar Kanoman tidak hanya menjadi simbol aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari konstruksi identitas sosial dan budaya masyarakat Cirebon. Keberadaannya hingga kini menandakan kontinuitas sejarah yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelusuri **Perkembangan Pasar Kanoman Cirebon pada tahun 1924–1942**, sebagai periode penting dalam sejarah lokal yang memperlihatkan proses transformasi sosial-ekonomi di bawah pengaruh kebijakan kolonial serta keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat dan Keraton Kanoman.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, pada bagian ini peneliti mencantumkan fokus penelitian yang akan dicari jawabannya. Oleh karena ini, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pasar Kanoman Cirebon (1924-1942)?

2. Bagaimana dampak perkembangan pasar kanoman Cirebon (1924-1942) bagi masyarakat dan keraton?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>6</sup> Berdasarkan rumusan masalah diatas maka terdapat rincian tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis perkembangan pasar Kanoman Cirebon (1924-1942)
2. Menganalisis dampak perkembangan pasar kanoman Cirebon (1924-1942) bagi masyarakat dan keraton

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan tersebut dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis maupun praktis. Seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat. Adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat apabila dapat digunakan oleh semua pihak.

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis :

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, Pedoman *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). Tim Penyusun, Pedoman, p. 36.

- a) Memberikan kontribusi terhadap kajian sejarah sosial ekonomi, khususnya mengenai pasar kanoman pasca renovasi 1924 hingga akhir kolonialisasi Hindia Belanda.
- b) Menambah literatur historiografi lokal terkait sejarah pasar dan perubahan struktur sosial budaya.

## 2) Manfaat Praktis

### a) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman akademik dan kemampuan analisis historis yang lebih mendalam bagi peneliti, khususnya dalam memahami dinamika sosial serta menjadi sarana pengembangan keilmuan di bidang sejarah sosial.

### 3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang sejarah lokal bagi masyarakat tentang sejarah pasar kanoman tersebut.

### 4) Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi instansi pemerintah atau lembaga lokal terkait sebagai dokumentasi sosial yang menggambarkan kondisi dan aktivitas pasar kanoman.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tentu dibatasi oleh aspek temporal dan spasial untuk menghindari pembahasan yang keluar dari konteks permasalahan yang ingin

dikemukakan. Untuk itu, peneliti memberikan batasan-batasan temporal dan spasial sebagai berikut:

#### 1) Batasan Temporal

Peneliti membatasi pembahasan kajian “Perkembangan Pasar Kanoman Cirebon 1924-1942” tahun 1924-1942, yakni pada tahun dipilihnya awal penelitian pada tahun 1924 karena pada tahun tersebut pemerintah kolonial Belanda merenovasi pasar besar-besaran. Sementara itu, tahun 1942 dijadikan sebagai batas akhir penelitian karena ditahun tersebut Kolonial Belanda kalah dari Jepang.

#### 2) Batasan Spasial

Fokus tempat pada penelitian ini adalah Pasar Kanoman yang terletak di kelurahan Lemahwungkuk, kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mengetahui apa yang sudah diteliti mencegah peneliti mengulang hal yang sama tanpa kontribusi yang baru. Dengan menelaah studi-studi sebelumnya, peneliti dapat menemukan aspek yang belum diteliti atau yang masih kontroversial. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti:

1. Skripsi yang ditulis oleh karya Suci Nursya'bani Aldilah dengan judul “Sejarah dan Perkembangan Pasar Pada Masa Gemeente Cirebon Tahun 1906–1942” membahas perkembangan pasar-pasar di Cirebon setelah

menjadi kota praja, termasuk perubahan tata kelola dan pembangunan fisik pasar. Hasil penelitian menunjukkan pasar berperan penting dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat kota. Keterkaitannya dengan penelitian Pasar Kanoman terletak pada kesamaan tema tentang perkembangan pasar tradisional pada masa kolonial, namun penelitian ini membahas wilayah Cirebon secara umum, sedangkan penelitian Pasar Kanoman berfokus pada satu pasar dan dinamika sosial di sekitarnya.<sup>7</sup>

2. Buku yang ditulis oleh JJ Rizal dkk yang berjudul “Menguak Pasar Tradisional Indonesia” membahas pasar tradisional di Indonesia dari aspek sejarah, sosial, dan ekonomi dengan menekankan peran pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat sekaligus ruang interaksi sosial budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasar tradisional berfungsi penting dalam memenuhi kebutuhan pokok, membuka lapangan kerja, serta memperkuat solidaritas sosial masyarakat.<sup>8</sup> Keterkaitan buku ini dengan penelitian tentang Pasar Kanoman Cirebon terletak pada pandangan yang sama mengenai pasar sebagai ruang ekonomi dan budaya rakyat. Perbedaan, karya J.J. Rizal dkk bersifat konseptual dan mencakup konteks nasional, sedangkan penelitian Pasar Kanoman menyoroti secara spesifik dinamika sosial-ekonomi di Cirebon pada masa kolonial.

---

<sup>7</sup> Suci Nursya'bani Aldilah, “Sejarah Dan Perkembangan Pasar Pada Masa Gemeente Cirebon Tahun 1906-1942” (UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON, 2024).

<sup>8</sup> J J Rizal et al., *Menguak Pasar Tradisional Indonesia* (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1986).



3. Skripsi ditulis oleh Ade Hikmawan dengan judul “Perkembangan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang Kabupaten Agam (1970–2012)”. Penelitian ini membahas sejarah berdirinya dan perkembangan Pasar Balai Selasa sebagai pasar nagari yang dikelola oleh lembaga adat tanpa keterlibatan langsung pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar ini mampu bertahan karena peran aktif Niniak Mamak dan solidaritas masyarakat dalam menjaga aktivitas ekonomi lokal.<sup>9</sup> Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian mengenai Pasar Kanoman adalah sama-sama menyoroti pasar tradisional sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, penelitian Ade Hikmawan menitikberatkan pada pengelolaan adat di era pasca-kemerdekaan, sedangkan penelitian tentang Pasar Kanoman berfokus pada dinamika sosial-ekonomi masyarakat Cirebon pada masa kolonial.
4. Artikel yang ditulis oleh Sonia Fitria Loka dkk yang berjudul “Pasar Jodoh Sebagai Pusat Perdagangan Masyarakat Batam Tahun 1978–2020” membahas sejarah muncul dan perkembangan Pasar Jodoh sebagai pusat perdagangan utama di Batam yang tumbuh seiring dengan pengembangan kawasan industri sejak 1970-an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar ini berperan penting dalam membentuk aktivitas ekonomi masyarakat Batam, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi ruang interaksi sosial meskipun mengalami pasang surut akibat

---

<sup>9</sup> Ade Hikmawan, “Perkembangan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang Kabupaten Agam 1970-2012,” 2013, 1–84.

kebakaran dan pembangunan kawasan baru.<sup>10</sup> Keterkaitannya dengan penelitian Pasar Kanoman Cirebon terletak pada kesamaan dalam melihat pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Perbedaannya, penelitian Pasar Jodoh berfokus pada pengaruh industrialisasi dan urbanisasi modern di Batam, sedangkan penelitian Pasar Kanoman menitikberatkan pada dinamika sosial-ekonomi masyarakat Cirebon pada masa kolonial.

5. Skripsi yang ditulis oleh Husnul Khatimah Firman dengan judul “Pasar Sentral Bulukumba (1995–2022)” membahas perkembangan pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat Bulukumba sejak berdiri tahun 1995 hingga masa renovasi menuju pasar modern. Hasil penelitian menunjukkan pasar tetap berperan penting karena letaknya strategis dan menjadi ruang interaksi sosial.<sup>11</sup> Keterkaitannya dengan penelitian Pasar Kanoman sama-sama menyoroti pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, namun penelitian ini berfokus pada modernisasi pasar masa kini, sedangkan penelitian Pasar Kanoman menitikberatkan pada dinamika sosial-ekonomi pada masa kolonial.
6. Artikel yang ditulis oleh Nofita Deta Utami dkk yang berjudul “Sejarah Perkembangan Pasar Tradisional Songgon Tahun 1960–2022” membahas perjalanan Pasar Songgon di Banyuwangi sejak awal berdiri

---

<sup>10</sup> Sonia Fitria Loka, Novita Mandasari Hutagaol, and Arnesih Arnesi, “Pasar Jodoh Sebagai Pusat Perdagangan Masyarakat Batam Tahun 1978-2020,” *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2024): 50–64, <https://doi.org/10.33373/hjpsps.v9i1.6830>.

<sup>11</sup> Husnul Khatimah Firman, “Pasar Sentral Bulukumba (1995-2022)” (Universitas Negeri Makassar, 2023).

hingga masa kini. Penelitian ini menelusuri perubahan pasar dari pasar desa menjadi pasar inpres, serta dinamika pengelolaannya antara pemerintah daerah dan desa. Hasil penelitian menunjukkan pasar terus berkembang meskipun menghadapi hambatan, seperti pergantian pengelolaan dan dampak pandemi, berkat dukungan masyarakat dan letak pasar yang strategis.<sup>12</sup> Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian Pasar Kanoman terletak pada kesamaan pandangan terhadap pasar tradisional sebagai pusat kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Perbedaannya, penelitian Pasar Songgon berfokus pada dinamika pengelolaan dan pembangunan fisik di era modern, sedangkan penelitian Pasar Kanoman menitikberatkan pada hubungan sosial-ekonomi masyarakat Cirebon pada masa kolonial.

7. Skripsi yang ditulis oleh Ilham Ainur Akbar dengan judul “Perkembangan Pasar Tradisional Genteng I Kabupaten Banyuwangi 1992–2018” membahas proses renovasi dan perkembangan Pasar Genteng I yang dikelola oleh PT. Graha Niaga Jaya Tama, serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah renovasi, pasar mengalami peningkatan fasilitas, pertumbuhan ekonomi, serta menjadi

---

<sup>12</sup> Nofita Deta Utami, Dhalia Soetopo, and Topan Priananda Adinata, “Sejarah Perkembangan Pasar Tradisional Songgon Tahun 1960-2022 ( History Of The Developpment Of The Traditional Market Songgon Years 1960-2022 ),” *RINONTJE: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah* 4, no. 2 (2023): 76–88.

ruang interaksi sosial dan budaya masyarakat Banyuwangi.<sup>13</sup>

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian tentang Pasar Kanoman Cirebon terletak pada kesamaan pandangan bahwa pasar tradisional merupakan pusat kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Namun, penelitian ini berfokus pada pengelolaan pasar oleh pihak swasta di era modern, sedangkan penelitian Pasar Kanoman menitikberatkan pada dinamika sosial-ekonomi masyarakat di bawah pengaruh kolonial.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, pasar tradisional memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, sebagian besar kajian lebih menyoroti pasar pada masa modern dan aspek pengelolaannya. Berdasarkan literatur yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti menemukan celah yang belum banyak dibahas, yaitu penelitian sejarah mengenai perkembangan Pasar Kanoman Cirebon pada tahun 1924-1942 serta peranannya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

## **G. Definisi Istilah**

### **1. Pasar**

Pasar secara harfiah memiliki arti sebagai tempat aktivitas jual – beli.<sup>14</sup> Namun secara artian luas pasar memiliki pengertian sebagai tempat bertemu dan bertransaksi para pedagang dan pembeli dengan beraneka

---

<sup>13</sup> Ilham Ainur Akbar, “Perkembangan Pasar Tradisional Genteng I Kabupaten Banyuwangi 1992-2018 Perkembangan Pasar Tradisional Genteng I Kabupaten Banyuwangi 1992-2018 Skripsi” (UIN KHAS Jember, 2024).

<sup>14</sup> Pambudi, W. (2023). Sejarah Perkembangan Pasar Tradisional Songgon Tahun 1960-2022. Rinontje: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, 4(2).

ragam dagangan. Dalam hal ini pasar memiliki 3 unsur penting dalam pembentukannya pertama banyaknya penjual, kedua banyaknya pembeli dan adanya tempat transaksi.<sup>15</sup>

Dalam perkembangannya, pemakaian kata pasar mengalami variannya, sesuai dengan kepentingannya, tujuannya dan perkembangan zaman. Seperti pasar pagi, pasar malam, pasar rebo, pasar senen, pasar sabtu, pasar hewan, pasar minggu dan masih banyak yang lainnya. Hal ini tentu pemilihan kata yang mengikuti kata pasar bukan tanpa alasan, pasti memiliki arti yang menyertainya.

Pasar dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern merupakan pasar yang mengikuti perkembangan zaman sebagai bentuk imbas dari kebutuhan manusia yang serba instan sehingga proses tawar-menawar tidak dilaksanakan seperti pasar tradisional berjalan. Sedangkan pasar tradisional merupakan sebuah kawasan dengan suasana, transaksi serta sarana yang masih tergolong secara tradisional. Hal ini terlihat dari proses penentuan harga yang dipengaruhi oleh tawar-menawar,<sup>16</sup> dari suasana tersebut penjual dan pembeli lebih memiliki ikatan emosi dibandingkan dengan pasar modern.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ayu Adha Pratiwi (2023). Pasar Sitimang: Dinamika Pasar Keramik Hias di Jambi 1970-2018 (Doctoral dissertation, Ilmu Sejarah).

<sup>16</sup> Maisaro, S. H. K. (2021). Pasar Kamis Kelurahan Jambi Kecil Kecamatan Muaro Sebo 1953-2021. *Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari*, 4(2), 26-37.

<sup>17</sup> JJ Rizal, dll., (2012). *Menguak Pasar Tradisional Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

## **H. Kerangka Konseptual**

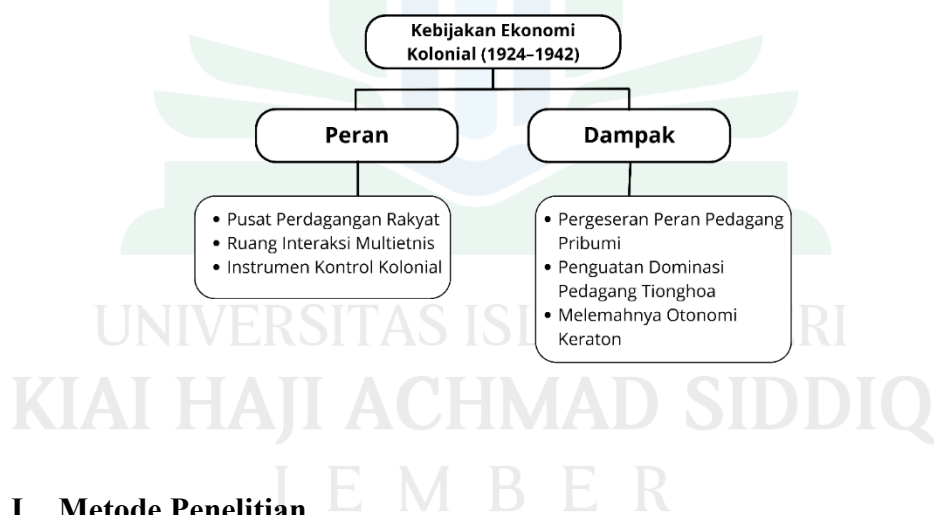
Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya yang merefleksikan dinamika kehidupan masyarakat. Pasar menjadi salah satu unsur penting dalam struktur sosial kota, terutama pada masa kolonial ketika sistem ekonomi kapitalistik mulai memengaruhi tatanan ekonomi tradisional.

Dalam konteks Cirebon, Pasar Kanoman pada dasarnya tumbuh dari sistem ekonomi tradisional yang berakar pada struktur sosial masyarakat Cirebon. Letaknya yang berdekatan dengan Keraton Kanoman memperlihatkan hubungan erat antara kekuasaan politik tradisional dengan aktivitas ekonomi rakyat. Seperti halnya pasar-pasar di kota pesisir lainnya, pasar ini berfungsi sebagai ruang interaksi antara pedagang pribumi, pedagang Tionghoa, dan kelompok masyarakat lainnya yang berperan dalam rantai distribusi barang. Aktivitas pasar dengan demikian bukan hanya menggambarkan kegiatan ekonomi, tetapi juga dinamika sosial lintas etnis yang membentuk karakter masyarakat kota Cirebon.

Dalam periode kolonial, terutama antara tahun 1924 hingga 1942, Pasar Kanoman mengalami transformasi sebagai akibat dari intervensi kebijakan ekonomi pemerintah Hindia Belanda. Regulasi pasar, pajak perdagangan, serta dominasi pedagang Tionghoa dalam sistem distribusi mencerminkan bagaimana kekuasaan kolonial turut mengubah struktur ekonomi lokal. Pemerintah kolonial menjadikan pasar sebagai instrumen pengawasan ekonomi

rakyat, sementara masyarakat lokal menyesuaikan diri melalui berbagai bentuk adaptasi ekonomi. Di sisi lain, keraton masih memegang peranan simbolis dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan kolonial dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari hubungan sebab-akibat antara kebijakan ekonomi kolonial, aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, dan perubahan struktur pasar tradisional. Hubungan ketiganya menjadi landasan untuk memahami dinamika Pasar Kanoman sebagai cerminan perubahan sosial-ekonomi masyarakat Cirebon pada masa kolonial.



## I. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki posisi penting dalam penelitian agar penelitian bisa terarah, valid dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga bisa menentukan keberhasilan suatu penelitian.<sup>18</sup> Metode penelitian adalah cara atau

<sup>18</sup> Hendrayanti, P. (2017). Peran Koperasi Siswa dalam Membina Economic Civics Siswa di SMP Negeri 1 CikalonVg. Skripsi) Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

prosedur sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menarik kesimpulan.<sup>19</sup>

Dalam konteks Penelitian ini, dikaji menggunakan metode penelitian sejarah yang mempunyai arti seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.<sup>20</sup> Dalam langkahnya menurut Kuntowijoyo terdapat 5 langkah.<sup>21</sup>

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh peneliti adalah:

### **1. Pemilihan Topik**

Menurut Kuntowijoyo dalam memilih topik, peneliti perlu memiliki landasan yang kuat, seperti adanya keterikatan emosional maupun intelektual terhadap topik tersebut.<sup>22</sup>

Pemilihan topik “Perkembangan Pasar Kanoman Cirebon 1924–1942” berangkat dari kedekatan emosional dan intelektual penulis terhadap objek kajian. Secara emosional, Pasar Kanoman memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat Cirebon, bukan hanya sebagai ruang transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah kota. Keberadaan pasar ini telah menjadi denyut kehidupan masyarakat yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya Cirebon dari masa ke masa.

---

<sup>19</sup> Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.

<sup>20</sup> Dudung, A. (2011). Metodologi penelitian sejarah Islam. Ombak, Yogyakarta.

<sup>21</sup> Kuntowijoyo, D. R. (2005). Pengantar ilmu sejarah. Bentang Pustaka.

<sup>22</sup> Dahimatul Afidah, (2001) “Diktat Metodologi Penelitian Sejarah,” UIN Khas Jember, 23, [https://digilib.uinkhas.ac.id/2982/1/DIKTAT\\_METODE\\_PENELITIAN\\_SEJARAH.pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/2982/1/DIKTAT_METODE_PENELITIAN_SEJARAH.pdf).



Secara intelektual, topik ini menarik karena menawarkan ruang untuk memahami bagaimana proses perkembangan Pasar Kanoman berlangsung pada masa kolonial Belanda, khususnya antara tahun 1924 hingga 1942. Periode tersebut merupakan masa yang penting dalam transformasi ekonomi dan sosial masyarakat Cirebon. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menelusuri bagaimana perubahan kebijakan kolonial, aktivitas perdagangan, serta peran masyarakat lokal membentuk dinamika Pasar Kanoman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang perkembangan fisik dan ekonomi pasar, tetapi juga menyingkap keterkaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat Cirebon menjelang akhir masa kolonial.

## **2. Heuristik**

Heuristik adalah tahapan mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber.<sup>23</sup> Sumber sejarah yang peneliti gunakan terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Dalam proses pengumpulan data sejarah, peneliti memiliki beberapa tahap dalam mengumpulkan data sumber sejarah, dimulai dari peneliti menjalin hubungan dengan abdi dalem keraton Kanoman serta sejarawan dan budayawan Cirebon diskusi secara non formal. Sehingga peneliti mendapatkan berbagai informasi yang mengarahkan penemuan beberapa sumber primer tentang judul yang diambil oleh peneliti. Peneliti juga

---

<sup>23</sup> Laksono, Anton Dwi. (2018). Apa itu Sejarah ; Pengertian, Ruang lingkup, Metode dan penelitian, Pontianak : Derwati Press

terbantu dengan beberapa sumber sekunder yang didapatkan, sehingga peneliti mencoba mengklasifikasikan sumber primer dan sumber sekunder yang didapat, sebagai berikut:

#### 1. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian sejarah adalah sumber asli atau pertama yang berasal langsung dari pelaku, saksi, atau dokumen sezaman dengan peristiwa yang diteliti.<sup>24</sup>

Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai media yang memberikan gambaran autentik mengenai keberadaan Pasar Kanoman pada periode 1902–1942. Melalui pencarian daring, penulis menemukan sejumlah foto dokumentasi sejarah yang tersimpan di situs KITLV sebagai bukti visual eksistensi pasar pada masa kolonial. Selain itu, penulis juga memanfaatkan arsip surat kabar sezaman yang diakses melalui laman Delpher, yang memberikan informasi penting mengenai praktik dan kebijakan kolonial dalam kaitannya dengan pasar dan keraton.

Untuk memperkuat data spasial, penelitian ini juga menggunakan peta wilayah pada masa tersebut yang diperoleh melalui Old Maps Online atau national archive. Sementara itu, sejumlah *staatsblad* turut dimanfaatkan sebagai sumber hukum yang merekam

---

<sup>24</sup> Primer, A. S. (2024). 1.2. Sumber-Sumber Sejarah. Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, 3.

kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang sedikit banyak menjelaskan regulasi terkait pembangunan dan pengelolaan pasar.

Selain berbasis arsip, penelitian ini juga melibatkan observasi lapangan langsung terhadap bangunan fisik yang masih berdiri, baik Keraton maupun Pasar Kanoman, sebagai jejak material yang tetap bertahan hingga kini.

## 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian sejarah adalah sumber yang tidak berasal langsung dari pelaku atau saksi sezaman.<sup>25</sup> Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran terhadap berbagai literatur kepustakaan yang relevan dengan topik “Perkembangan Pasar Kanoman Cirebon 1924-1942”. Literatur tersebut mencakup buku-buku sejarah yang membahas kolonialisme Belanda, dinamika keraton di Cirebon, serta perkembangan pasar tradisional di Jawa. Selain itu, penulis juga memanfaatkan karya ilmiah seperti skripsi yang mengangkat tema serupa sebagai bahan pembandingan dan penguat analisis. Artikel jurnal serta publikasi penelitian lainnya turut dijadikan rujukan.

## 3. Verifikasi

Verifikasi sumber merupakan langkah penting untuk memastikan keaslian dan kredibilitas data sejarah yang digunakan. Dalam penelitian ini,

---

<sup>25</sup> Hati, S. T., Anisa, N., & Bratisya, R. (2025). DASAR DASAR ILMU SEJARAH BERDASARKAN KATEGORI DAN SUMBER. *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern*, 6(1).

proses verifikasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menilai autentisitas sumber, seperti foto dari KITLV, arsip surat kabar Delpher, peta dari Old Maps Online, dan Staatsblad Hindia Belanda, dengan memeriksa tahun penerbitan, identitas penerbit, serta kesesuaian konteks geografis dan historisnya.

Observasi lapangan terhadap Pasar dan Keraton Kanoman juga dilakukan guna mencocokkan kondisi material dengan dokumentasi historis. Sementara itu, kritik internal bertujuan menilai kredibilitas isi sumber dengan membandingkan antar-data, menelaah bias penulis, serta memahami latar sosial-politik sumber kolonial. Dengan demikian, hanya data yang autentik dan dapat dipercaya yang digunakan, sehingga hasil penelitian memiliki keabsahan ilmiah yang kuat.

#### **4. Interpretasi**

Interpretasi merupakan proses penafsiran terhadap data yang telah diperoleh dengan cara memberikan makna pada setiap fakta serta menghubungkannya dengan fakta-fakta lain yang relevan. Tahap ini bertujuan untuk menemukan keterkaitan antarperistiwa sehingga dapat membentuk pemahaman yang utuh mengenai suatu fenomena sejarah. Melalui analisis sejarah, peneliti berupaya melakukan sintesis, yaitu menyatukan berbagai fakta dari beragam sumber menjadi satu kesimpulan yang koheren dan bermakna.

## 5. Historiografi

Historiografi dalam metode penelitian sejarah adalah tahap penyusunan hasil penelitian sejarah ke dalam bentuk tulisan atau narasi yang sistematis, logis, dan koheren. Jika tahap heuristik menghasilkan kumpulan sumber, kritik sumber memverifikasi keaslian dan kredibilitas data, serta interpretasi menafsirkan makna fakta-fakta sejarah, maka historiografi merupakan puncak dari keseluruhan proses tersebut. Pada tahap ini, peneliti menyajikan hasil penelitiannya yang dapat dipahami dan diuji oleh pembaca.

Dalam penelitian ini, peneliti menuliskan hasil dari penelitian berdasarkan apa yang telah diteliti. Mulai dari sumber yang didapat, sumber yang dikritik sampai sumber yang ditafsirkan. Sehingga dapat berhasil memaparkan penelitian dengan jelas sesuai sistematika penulisan skripsi yang benar dan juga sinkron dengan judul penelitian ini yaitu “Pasar Kanoman: Propaganda Kolonial Belanda Terhadap Keraton Kanoman (1902–1942)”.

### J. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah sistematika pembahasan yang disusun berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas:

#### BAB 1 Pendahuluan

Bab ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan

## **BAB 2 Cirebon Masa Klasik Hindu-Budha, Masa Islam dan Masa Kolonial.**

Bab ini membahas perkembangan Cirebon dari masa klasik Hindu-Buddha, masa Islam, hingga masa kolonial. Uraian ini bertujuan agar pembaca memahami gambaran umum Cirebon yang menjadi latar penelitian.

## **BAB 3 Cirebon Kota Pelabuhan**

Bab ini membahas peran Cirebon sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan pada masa kolonial. Pembahasan ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan ekonomi Cirebon sebagai dasar sebelum fokus diarahkan pada Pasar Kanoman..

## **BAB 4 Pasar Kanoman 1924-1942**

Bab ini menguraikan perkembangan Pasar Kanoman Cirebon pada periode 1924–1942. Dalam bab ini dibahas dinamika Pasar Kanoman sejak dilakukannya renovasi besar hingga akhir masa pemerintahan kolonial Belanda, dengan menempatkan pasar dalam konteks kebijakan kolonial dan sistem pengelolaan yang berlaku pada masa tersebut, beserta dampak yang terjadi.

## **BAB 5 Penutup**

berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Pasar Kanoman, serta memberikan saran untuk pengembangan penelitian sejarah lokal dan pemanfaatannya dalam kajian akademik maupun pelestarian budaya.

## **BAB II**

### **CIREBON MASA KLASIK HINDU-BUDHA, MASA ISLAM DAN MASA KOLONIAL**

#### **A. Cirebon Masa Klasik Hindu Budha**

Julukan Cirebon sebagai kota wali dan penyebar agama Islam di daerah Jawa Barat<sup>26</sup> tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya, masyarakat Cirebon pernah memeluk agama Hindu Budha atau disebut Cirebon masa klasik Hindu Budha atau bisa juga disebut Cirebon pra-Islam. Hal ini bisa dianalisis secara kewilayahan sekitar abad ke 4 sampai abad ke 7 berdiri kerajaan tarumanegara yang dibuktikan dengan beberapa prasasti salah satu prasasti yang terkenal adalah prasasti ciaruteun dan Cirebon masuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara.<sup>27</sup> Kerajaan Tarumanegara dalam beberapa peninggalannya bahwa masyarakat Tarumanegara menganut agama Hindu-Budha. Sehingga wilayah yang berada dalam kekuasaannya pun menganut agama Hindu-Budha.

Sebelum menyebar dan masuknya ajaran Islam, Cirebon secara wilayah dapat di kelompokkan menjadi 2 yaitu Cirebon daerah pesisir berbatasan dengan pantai yang disebut Cirebon larang sedangkan daerah yang bukan dipesisir atau

---

<sup>26</sup> Toto Sucipto, "Eksistensi Keraton Di Cirebon Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Keraton-Keraton Di Cirebon," *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research* 2, no. 3 (2010): 472–89.

<sup>27</sup> Oki, "Seri-Sejarah-Peninggalan-Peninggalan-Kerajaan- Tarumanegara 6511214F6674C .Pdf," n.d.

pedalaman disebut Cirebon Girang.<sup>28</sup> Setelah Tarumanegara runtuh lahir beberapa kerajaan setelahnya yang masih menganut agama Hindu Budha seperti kerajaan pajajaran. Pada masa pemerintahan Prabu Niskala Wastu Kencana kedua wilayah Cirebon yaitu Cirebon girang dan Cirebon larang berada dibawah kekuasaanya yaitu sekitar tahun 1371-1475. Namun setelahnya Cirebon dibawah kekuasaan prabu Anggalarang (Toha) di Galuh.<sup>29</sup>

Sejak masa klasik, kawasan pesisir Cirebon telah dikenal sebagai pelabuhan yang ramai dan menjadi simpul perdagangan penting di jalur pantai utara Jawa. Sehingga Cirebon disebut Kota pelabuhan.<sup>30</sup> Pusat aktivitas maritimnya berada di Muara Jati, pelabuhan alami yang dikelola oleh Ki Gedeng Tapa, seorang tokoh lokal berpengaruh. Dari pelabuhan ini, hasil bumi pedalaman Sunda seperti beras, garam, kayu, dan rempah diekspor ke berbagai daerah, sementara barang-barang mewah dari Tiongkok, India, dan wilayah Asia lainnya masuk melalui jalur laut. Posisi strategis Cirebon di tengah jalur perdagangan internasional membuatnya menjadi persinggahan pedagang multietnis—mulai dari Jawa, Sunda, Arab, Persia, hingga Tiongkok—sehingga membentuk karakter kosmopolitan sejak awal. Aktivitas ini menunjukkan bahwa jauh sebelum peralihan ke masa Islam, pelabuhan Cirebon telah memainkan peran sebagai tempat berkumpulnya beberapa etnis.

---

<sup>28</sup> Siti Zulfah, "Islamisasi Di Cirebon: Peran Dan Pengaruh Walangsungsang Persepektif Naskah Carios Walangsungsang," *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 6, no. 1 (2018).

<sup>29</sup> M Sanggupri Bochari, *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon* (Departemen Pendidikan Nasional, 2001). Hal.6

<sup>30</sup> Bochari.Hal.6



Cirebon memiliki sejumlah muara sungai yang berfungsi penting sebagai jalur pendukung pelabuhan,<sup>31</sup> tempat berlangsungnya aktivitas pelayaran dan perdagangan baik pada tingkat lokal, regional, hingga internasional. Menurut catatan Tome Pires tahun 1513, setiap harinya pelabuhan Cirebon dikunjungi tiga hingga empat kapal (junk) untuk berlabuh. Dari pelabuhan ini diekspor beras, berbagai bahan pangan, serta kayu dalam jumlah besar yang dimanfaatkan untuk pembuatan kapal. Saat itu, jumlah penduduk Cirebon diperkirakan sekitar 1.000 jiwa.<sup>32</sup>

Pengaruh kerajaan bercorak hindu budha mulai dari tarumanegara hingga sunda-galuh atau bahkan datangnya etnis hindu budha dari luar seperti India menjadikan cirebon pernah menjadi tempat penganut agama hindu budha. Bahkan dari segi tinggalan arkeologis bisa menjawab tentang cirebon Masa klasik hindu budha.<sup>33</sup>

Salah satu peninggalan arkeologis hindu budha yang ada di cirebon adalah prasasti Huludayeuh. Prasasti ini sekarang bisa ditemui di lokasi tengah persawahan Kampung Huludayeuh, Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Menurut Hasan Jafar dalam penelitiannya mengemukakan bahwa prasasti Huludayeuh berisikan tentang usaha memperingati kebajikan Sri Baduga Maharaja. Karena dalam prasasti

---

<sup>31</sup> Anwar Sanusi, Faisal Arif, and Rafan S Hasyim, *Perubahan Eksistensi Sungai Dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon Pada Masa Hindia Belanda Tahun 1900-1942* (Yayasan Wiyata Bestari Samastra, 2022). Hal.36

<sup>32</sup> Nina Herlina Lubis, "Sejarah Perkembangan Islam Di Jawa Barat," *Jawa Barat: Pemerintah Provinsi Jawa Barat*, 2011.

<sup>33</sup> Sanusi, Arif, and Hasyim, *Perubahan Eksistensi Sungai Dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon Pada Masa Hindia Belanda Tahun 1900-1942*. Hal 36-39

tidak terdeteksi tahun dibuat. Namun menurut Hasan jafar prasasti ini dibuat sezaman dengan prasasti kebantenan dan prasasti batutulis Bogor hal ini bisa disinkronisasikan tentang pembuatan prasasti tersebut sesuai keterangan di prasasti batu tulis pada tahun Saka panca-pandawa (m)banbumi", 1 455 (=1 533 Masehi),<sup>34</sup> keberadaan prasasti Huludayeuh menjadi bukti penting yang menguatkan keberadaan tradisi Hindu–Buddha di wilayah Cirebon.

Selain prasasti huludayeuh sebagai tinggalan hindu-budha ada juga tinggalan arkeologi yang menyimbolkan peradaban hindu budha telah berdiri yaitu salah satunya adalah Lingga yoni. Lingga melambangkan Dewa Siwa dan biasanya berbentuk seperti batang silindris yang mencerminkan kesuburan dan energi maskulin. Yoni adalah simbol dari Dewi Parwati atau shakti (energi feminin) Lingga Yoni juga dianggap sebagai lambang kesuburan, yaitu dengan cara menyiramkan air pada Lingga dan kemudian air yang mengalir melalui ceret yoni itu ditampung dan selanjutnya disiramkan pada tanaman padi atau tanaman lainnya.<sup>35</sup> Keraton Kasepuhan hari ini masih terdapat tinggalan arkeologis Hindu budha salah satunya adalah lingga yoni

Lingga yoni ini bertempat dibelakang siti hinggil. Lingga ini secara keseluruhan berukuran diameter 22.5 cm dan tinggi 122.2 cm. Badan Yoni secara keseluruhan berukuran panjang 49.5 cm, lebar 49.5 cm dan tinggi 38 cm.

---

<sup>34</sup> Hasan Djafar, "Prasasti Huludayeuh," *Berkala Arkeologi* 14, no. 2 (1994): 197–202.

<sup>35</sup> M Suta, "Fungsi Dan Makna Lingga Dalam Ajaran Agama Hindu," *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial Budaya* 13, no. 2 (2018): 88100.

Dudukan Lingga berukuran diameter 20 cm dan tinggi 19 cm, Cerat Yoni berukuran panjang 29 cm, lebar 16.5 cm dan tebal 15 cm.<sup>36</sup>



Situs pejambon juga menjadi salah satu alasan kuat keberadaan hindu budha di Cirebon. Situs pejambon adalah arca berbentuk punakawan semar, sehingga masyarakat sekitar menyebutnya *watu semar*.<sup>37</sup>



<sup>36</sup> Muhamad Alnoza, "Makna Artefak Masa Hindu-Buddha Di Kraton Kasepuhan Cirebon: Tinjauan Semiotika Peirce," *Berkala Arkeologi Sangkhakala* 24, no. 2 (2021): 107–20.

<sup>37</sup> Wahyu Iryana, Muhamad Bisri Mustofa, and Muhammad Saidun Anwar, "Budaya Bendawi Pra Islam Di Keraton Cirebon Indonesia," *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 19–38.

Dengan adanya prasasti dan tinggalan benda arkeologi lainnya ini, semakin jelas bahwa Cirebon bukan sekadar wilayah pesisir yang menerima pengaruh budaya dari luar, tetapi juga menjadi bagian dari pusat aktivitas sosial dan religius pada masa klasik. Tradisi Hindu-Budha juga sedikit di singgung dalam naskah *Carita Purwaka Caruban Nagari* (CPCN) yang disusun pada abad ke-18. Meski fokus utamanya adalah asal-usul Kesultanan Cirebon pada masa Islam, naskah ini tetap merekam jejak masa sebelumnya.<sup>38</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejarah Cirebon masa klasik Hindu–Buddha terbukti melalui peninggalan arkeologis, prasasti, dan *Carita Purwaka Caruban Nagari*. Warisan tersebut menjadi fondasi penting bagi terbentuknya identitas Cirebon sebagai pusat budaya dan agama pada masa berikutnya.

## **B. Cirebon Masa Islam**

### **1. Masa peralihan Islam**

Berbicara tentang islamisasi Cirebon, tentunya tidak lupa dengan seorang tokoh ulama terkenal yaitu Sunan Gunung Jati. Namun, jauh sebelum beliau, leluhurnya telah lebih dahulu memulai penyebaran agama Islam di wilayah Cirebon. Yaitu Nyi subang Larang (Nenek Sunan Gunung Jati), Rara santang (Ibunda Sunan Gunung Jati) dan pangeran walangsungsang atau pangeran Cakrabuana (Paman Sunan Gunung Jati).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Atja, *Carita Purwaka Caruban Nagari: Karya Sastra Sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah* (Pusat Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1986).

<sup>39</sup> Wawan Hernawan and Ading Kusdiana, *Biografi Sunan Gunung Djati: Sang Penata Agama Di Tanah Sunda* (LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

Islamisasi Cirebon bisa menyebar secara pesat dilakukan oleh keturunan dari kerajaan pajajaran. Nyi Subang Larang seorang perempuan bangsawan yang menjadi salah satu pemeluk agama Islam di kalangan kerajaan Sunda yang sebelumnya menganut agama Hindu Budha. Dari pernikahannya dengan Prabu Siliwangi memiliki keturunan yang kelak akan memegang peranan penting dalam sejarah Cirebon. Dari pendidikan Syekh Quro di Karawang, Nyi Subang larang sukses menanamkan benih ajaran Islam kepada anak-anaknya.<sup>40</sup> Meskipun Islam belum menjadi agama resmi di lingkungan istana Pajajaran.

Setidaknya terdapat 3 peranan penting Walangsungsang dalam Persebaran agama Islam di Cirebon menurut Siti Zulfah. Pertama Sebagai penyebar agama Islam. Kedua Pembuka peradaban Islam di Cirebon. Ketiga pencetus istana pakungwati.<sup>41</sup> Upaya Walangsungsang dalam menyebarkan Islam masih sangat sederhana, mengingat saat itu merupakan masa awal peralihan masyarakat dari kepercayaan Hindu-Buddha menuju Islam..

Pada naskah *Carita Purwaka Caruban Nagari* karya pangeran Arya Carbon yang ditulis sekitar 1720 M menyebutkan bahwa Sebelum Walangsungsang menjadi Kuwu. Cirebon pernah dipimpin Kuwu beragama Hindu ia bernama Ki Danu Sela atau biasa disebut Ki Gedeng Alang-Alang.<sup>42</sup> Perlu di ketahui ketika ki Danu Sela menjadi Kuwu Cirebon

---

<sup>40</sup> M Syatibi Al-Haqiri, "Penyebar Islam Di Pantai Utara Jawa: Mengungkap Peran Syaikh Quro Karawang," *Jurnal Lektur Keagamaan* 10, no. 1 (2012): 51–74.

<sup>41</sup> Zulfah, "Islamisasi Di Cirebon: Peran Dan Pengaruh Walangsungsang Persepektif Naskah Carios Walangsungsang."

<sup>42</sup> Atja, *Carita Purwaka Caruban Nagari: Karya Sastra Sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah*. Hal.32

Larang yaitu cirebon bagian pesisir, dibagian Cirebon Girang atau pedalaman yang masuk kaki gunung Ciremai dipimpin kuwu juga oleh mertua ki Danu sela yaitu bernama Ki Gedheng Kamasya. Setelah Ki Danu Sela wafat kepemimpinan kuwu dilanjutkan oleh Walangsungsang yang bergelar pangeran Cakrabuana. Pada masa kepemimpinannya lah Cirebon Girang dan Cirebon Larang menjadi satu pusat kepemimpinan di bawah pangeran Cakrabuana. Dari sinilah cikal bakal Cirebon sebagai pusat kekuasaan Islam lahir.<sup>43</sup>

Menurut De Graaf dan Pigeaud pangeran Cakrabuana Ketika menjadi Kuwu atau memimpin daerah Cirebon hal yang pertama kali ia lakukan adalah membangun mushola pada tahun 1450 M. Mushola tersebut bernama Tajug jalagrahan dan 2 tahun setelahnya pangeran Cakrabuana memprakarsai pembangunan keraton Pakungwati.<sup>44</sup> Meskipun pada masa kepemimpinannya Cirebon masih dalam kekuasaan pajajaran. Setelah kekuasaan diberikan kepada keponakannya yaitu Sunan Gunung Jati yang dinobatkan sebagai raja pertama Cirebon dengan gelar *Ingkang Sinuhun Sunan Jati Purba Wisesa*. Barulah Cirebon mendeklarasikan kemerdekaanya terhadap kerajaan Pajajaran.

Sunan Gunung Jati adalah keponakan dari pangeran Walangsungsang, anak dari Rara Santang, menikahi anak dari

---

<sup>43</sup> Didin Nurul Rosidin, *Kerajaan Cirebon, Correspondencias & Análisis* (Puslitbang Lektur dan khazanah keagamaan, 2013).

<sup>44</sup> Zaenal Masduqi et al., "Menyatukan Kekuatan Islam Di Jawa: Dinamika Relasi Kuasa Antara Cirebon Dengan Demak Pada Masa Awal Islam Di Indonesia Abad Ke-15-16 M," *Dialog* 48, no. 1 (2025): 41–57.

Walangsungsang yang bernama Nyi Mas Pakungwati. Pada masa kepemimpinannya, Cirebon menjadi pusat penyebaran agama Islam. Dengan kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon tidak hanya menjadi pusat politik, tetapi juga pusat spiritual yang memancarkan pengaruh ke seluruh Jawa Barat. Dari sinilah Cirebon semakin kokoh sebagai kesultanan Islam yang berwibawa. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa tinggalan naskah islam yang ada. Dalam pendataan yang dilakukan oleh Titik Pudjiastuti 1993-1994 terdapat 189 Naskah yang ada di masyarakat dan keraton dengan rincian 72 naskah Islam yang hidup di keraton dan 34 naskah islam yang hidup di masyarakat.<sup>45</sup>

Dengan legitimasi keturunan bangsawan Sunda sekaligus keturunan Nabi Muhammad SAW, Sunan Gunung Jati dihormati tidak hanya di Cirebon, tetapi juga di wilayah lain. Keberhasilannya dalam menjalin hubungan diplomasi,<sup>46</sup> memperluas jaringan perdagangan,<sup>47</sup> dan menyebarkan Islam dengan pendekatan kultural membuat Cirebon dikenal sebagai pusat dakwah sekaligus simpul multikultural di Jawa.

Warisan masa awal Islam di Cirebon masih dapat ditelusuri hingga kini, baik melalui Keraton Kasepuhan yang berawal dari Keraton Pakungwati, maupun kompleks makam Sunan Gunung Jati yang menjadi

---

<sup>45</sup> Alfian Firmanto, "Historiografi Islam Cirebon (Kajian Manuskrip Sejarah Islam Cirebon)," *Jurnal Lektur Keagamaan* 13, no. 1 (2015): 31–58.

<sup>46</sup> Agus Prabowo Adi et al., "Peran Sunan Gunung Jati Dalam Pertahanan Maritim (Analisis Historis Riset ALRI Di Cirebon)," *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 12 (2024): 13599–606.

<sup>47</sup> Muhamad Miftah Farid, "Perjuangan Sunan Gunung Djati Dalam Penyebaran Islam Di Jawa Barat," *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 7, no. 2 (2022): 134–49.

situs ziarah penting atau juga masjid Agung Sang Cipta rasa Cirebon. Semua itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi di Cirebon tidak berlangsung dengan paksaan, melainkan melalui akulturasi budaya dan kebijaksanaan para pemimpinnya. Dengan demikian, Cirebon pada masa awal Islam menjadi gambaran bagaimana tradisi lama dan ajaran baru bisa menyatu, membentuk identitas masyarakat pesisir yang terbuka dan religius.



Warisan masa awal Islam di Cirebon memang terwujud nyata melalui keberadaan Keraton Pakungwati sebagai pusat pemerintahan Islam pertama di Cirebon, yang kemudian melahirkan Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan setelah perpecahan pada abad ke-17.<sup>48</sup> Perpecahan terjadi setelah wafatnya Panembahan Girilaya pada 1662 M, terjadi krisis pewarisan takhta di lingkungan keraton. Perselisihan antar putra Panembahan Girilaya, yakni Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta, berujung pada perpecahan

---

<sup>48</sup> Budi Prasidi Jamil, "Perpecahan Kesultanan Cirebon," *Jurnal Kalijaga*, 2013, 33.



kekuasaan yang dimediasi Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Sejak saat itu, pusat pemerintahan yang sebelumnya berpusat di Keraton Pakungwati mulai terpecah: Martawijaya menempati Keraton Kasepuhan, Kartawijaya mendirikan Keraton Kanoman, dan Wangsakerta diberi kedudukan sebagai Panembahan Cirebon. Dengan demikian, perpecahan keraton di Cirebon tidak hanya memecah garis politik keturunan Sunan Gunung Djati, tetapi juga menandai berakhirnya era Pakungwati sebagai pusat tunggal kekuasaan, berubah menjadi simbol sejarah awal yang kemudian melahirkan keraton-keraton penerus.<sup>49</sup>

## **2. Keraton Kasepuhan**

Keraton Kasepuhan sebagai salah satu keraton dari pecahannya keraton pakungwati memiliki kedudukan yang paling dihormati. Hal ini bisa dilihat dari bangunan keraton kasepuhan dulunya adalah keraton Pakungwati. Anak tertua dari panembahan Girilaya yaitu Pangeran Mas Mohammad Arifin II merupakan pendiri dari kesultanan Kasepuhan yaitu pada tahun 1506.<sup>50</sup> Kata “Sepuh” dalam keraton Kasepuhan berarti Tua, maksud dari Tua adalah Pangeran Mas Mohammad Arifin II sebagai anak tertua (sultan sepuh) dari panembahan Girilaya. Keraton Kasepuhan dalam permulaan pemerintahannya berperan sebagai pusat politik, kebudayaan dan penyebaran Islam di Cirebon.

---

<sup>49</sup> kresna Azhi Fahlevi, “Dinamika Hubungan Kesultanan Cirebon Dengan Kesultanan Banten Tahun 1649-1678 M” (UIN SUKA YOGYAKARTA, 2024). Hal.75

<sup>50</sup> Wildan Herdiansyah, *Setapak Peninggalan Sejarah Di Nusantara*, 1st ed. (Jakarta: Rama Edukasitama, 2022). Hal.25

Keraton kasepuhan secara arsitektural bangunan memiliki corak Hindu-Budha yang masih kuat, meskipun kesultanan kasepuhan merupakan kesultanan yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Hal ini dikarenakan tahun pembangunan keraton dan bangunan disekitarnya itu dibangun pada masa islam awal di Cirebon sehingga pengetahuan kosmologi islam itu masih sangat terbatas.<sup>51</sup>

Dalam perpindahan kepemimpinan dimasa awal yaitu setelah Sultan Sepuh I meninggal pada tahun 1697 terjadi ketegangan dalam internal keluarga kesultanan, terdapat dua putra yang sama sama memiliki pengaruh untuk melanjutkan kepemimpinan, ialah Pangeran Dipati dan Pangeran Adiwijaya yang sama sama menginginkan tahta untuk melanjutkan kepemimpinan, ini merupakan konflik pertama yang ada dalam internal kesultanan.<sup>52</sup>

Seiring berjalannya waktu, fungsi Keraton Kasepuhan berkembang dari sekadar pusat pemerintahan menjadi pusat pelestarian budaya. Keraton ini memegang peranan penting dalam menjaga warisan seni dan tradisi lokal seperti tari topeng Cirebon, gamelan Degung, serta berbagai upacara adat dan ritual keagamaan yang masih dilaksanakan hingga kini. Melalui kegiatan budaya, pameran, dan pendidikan, keraton berupaya menanamkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat, terutama generasi muda. Keberadaan Keraton Kasepuhan bukan hanya menjadi simbol kebesaran masa lalu,

---

<sup>51</sup> Fredy Mahendra et al., “Arsitektur Lansekap Keraton Kasepuhan Cirebon,” 2016.

<sup>52</sup> Tendi Tendi, “Antara Sejarah Peteng Dan Sejarah Weteng: Mengidentifikasi Objek Sengketa Dalam Kisruh Keraton Kasepuhan Cirebon,” *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 11, no. 2 (2023).

tetapi juga menjadi pusat pengembangan identitas budaya dan pariwisata sejarah yang memperkuat posisi Cirebon sebagai kota budaya di Indonesia.<sup>53</sup>

### 3. Keraton Kanoman

Terjadinya perpecahan Keraton Cirebon pada akhir abad ke-17 menjadi latar berdirinya Keraton Kanoman.<sup>54</sup> Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya setelah wafatnya Panembahan Girilaya, Cirebon mengalami kekosongan kekuasaan.<sup>55</sup> Kedua putera Girilaya sempat dibawa ke Mataram, hingga akhirnya dengan bantuan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten mereka berhasil dibebaskan. Dari peristiwa inilah kemudian lahir dua pusat kekuasaan baru di Cirebon, yaitu Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Sultan Badrudin Kartawijaya, salah seorang putera Girilaya, ditetapkan sebagai Sultan Anom I dan menempati bekas rumah Pangeran Cakrabuana di daerah Kebon Pesisir, Lemahwungkuk.<sup>56</sup> Sejak saat itu berdirilah Keraton Kanoman yang secara resmi tercatat pada tahun 1588 M atau 1510 Saka.

Keraton Kanoman didirikan di atas lahan luas sekitar 175.500 m<sup>2</sup> dengan tata ruang khas keraton Jawa. Di bagian utara terdapat alun-alun dan pasar yang menjadi pusat interaksi ekonomi masyarakat, sementara di sisi

---

<sup>53</sup> Dian Lestari et al., “Peran Keraton Kasepuhan Cirebon Sebagai Pusat Pemeliharaan Dan Pembangunan Budaya,” *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 1, no. 2 (2021): 98–113.

<sup>54</sup> Fransisca Erina Febri Wijayanti, “Sejarah Indonesia Masa Persebaran Islam Sampai Zaman VOC,” *Masa Persebaran Islam Dan VOC*, 2022. Hal.24

<sup>55</sup> Suteja, *CIREBONOLOGI*, 1st ed., vol. 1 (Cirebon: PoiesisMeta, 2024).Hal.24

<sup>56</sup> Muhammad Hendra Maulana and Ina Helena Agustina, “Perspektif Pengunjung Terhadap Tradisi Budaya Keraton Kasepuhan Dan Keraton Kanoman Cirebon,” in *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, vol. 2, 2022, 336–41.

barat laut berdiri Masjid Keraton Kanoman sebagai pusat kegiatan keagamaan. Keberadaan alun-alun, pasar, dan masjid menunjukkan peran keraton tidak hanya sebagai pusat politik, tetapi juga sebagai pusat sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat Cirebon. Selain itu, keraton ini dibangun menghadap ke utara, mengikuti tradisi kosmologis Jawa yang menyelaraskan arah keraton dengan poros alam semesta.<sup>57</sup>

Dengan berdirinya Keraton Kanoman, Cirebon memasuki fase baru dalam sejarahnya. Sultan Badrudin tidak hanya mengokohkan kedudukan politiknya, tetapi juga meletakkan dasar legitimasi bahwa keturunannya kelak tetap berhak menyandang gelar Sultan Anom. Dari sinilah tradisi pemerintahan Keraton Kanoman berlanjut hingga generasi berikutnya.

Sultan Anom I, yakni Pangeran Badrudin Kartawijaya, memerintah Keraton Kanoman sejak tahun 1678 hingga 1703. Pada masa pemerintahannya, ia berupaya mengokohkan wibawa Kesultanan Cirebon di tengah tekanan politik dari Mataram dan campur tangan Belanda.<sup>58</sup> Badrudin mengajukan permohonan resmi kepada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten dan Gubernur Jenderal Belanda di Batavia agar keturunannya kelak tetap menyandang gelar Sultan Anom. Langkah ini menunjukkan upaya Sultan Badrudin untuk memperoleh legitimasi ganda, baik dari sesama penguasa pribumi maupun dari kekuatan kolonial yang mulai

---

<sup>57</sup> Lasmiyati Lasmiyati, "Keraton Kanoman Di Cirebon (Sejarah Dan Perkembangannya)," *Patanjala* 5, no. 1 (2013): 128–43.

<sup>58</sup> Lasmiyati.

berpengaruh di Jawa. Ia memerintah selama lebih dari dua dekade dan wafat dalam usia lanjut, kemudian dimakamkan di kompleks keraton.<sup>59</sup>

Sepeninggal Sultan Anom I, tampuk kekuasaan dilanjutkan oleh puteranya, Pangeran Mandurareja, yang dikenal sebagai Sultan Anom II atau Sultan Khaerudin. Namun masa pemerintahannya relatif singkat, hanya sekitar tiga tahun (1703–1706), karena ia wafat akibat sakit. Tahta kemudian diberikan kepada puteranya, Sultan Ngalimudin, yang diangkat sebagai Sultan Anom III dalam usia masih sangat muda, sekitar 12 tahun. Kondisi ini memunculkan persoalan serius dalam pemerintahan karena Sultan belum mampu menjalankan kewajiban politiknya. Sebagai solusi, diangkatlah seorang wakil bernama Pangeran Raja Dipati Kusumaghung untuk menjalankan pemerintahan atas nama Sultan.<sup>60</sup>

Ketidakstabilan politik di awal pemerintahan Kanoman ini memperlihatkan rapuhnya posisi Cirebon yang berada di antara kepentingan Mataram, Banten, dan VOC. Perebutan pengaruh sering kali memicu konflik internal, sehingga Keraton Kanoman harus senantiasa mencari jalan kompromi demi mempertahankan eksistensinya sebagai pusat kekuasaan di Cirebon.

Masa pemerintahan Sultan Anom III, Sultan Ngalimudin, menjadi titik awal terjadinya perselisihan internal di tubuh Keraton Kanoman. Karena masih sangat muda ketika naik tahta, kekuasaan sehari-hari lebih

---

<sup>59</sup> Lasmiyati.

<sup>60</sup> Lasmiyati.

banyak dijalankan oleh para wakil dan tumenggung. Situasi ini sering memunculkan perebutan pengaruh, baik di kalangan bangsawan keraton maupun pihak luar. Ketika Sultan Kharidin Rahim diangkat sebagai Sultan Anom IV, masalah serupa kembali muncul. Ia pun naik tahta dalam usia kanak-kanak, sehingga kekuasaan dijalankan oleh Tumenggung Bahumadengda. Kondisi pemerintahan seperti ini kerap menimbulkan ketegangan dan membuka peluang campur tangan Belanda dalam urusan internal kesultanan.

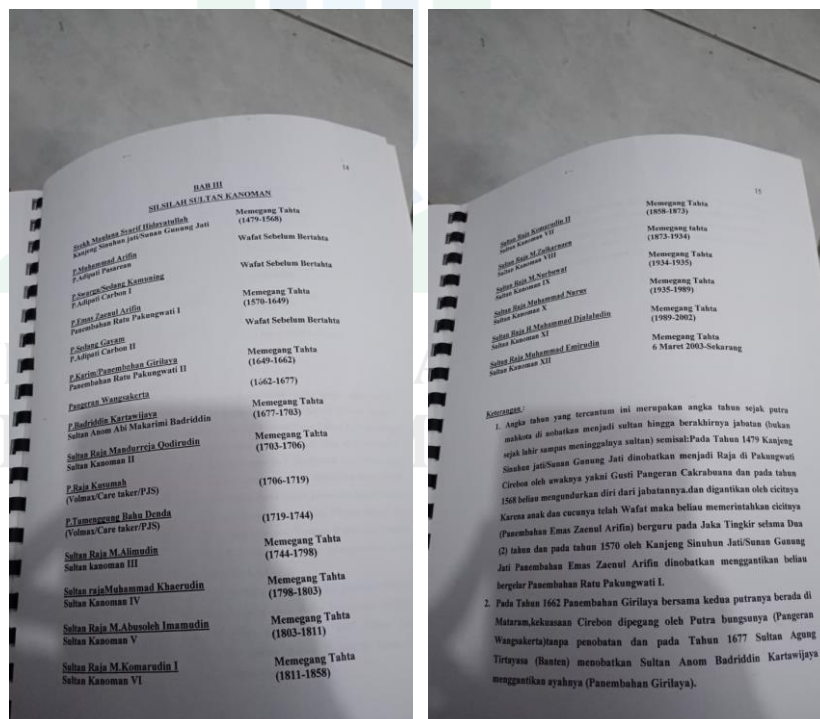
Meski demikian, Keraton Kanoman tetap berusaha menjaga perannya sebagai pusat budaya, agama, dan politik di Cirebon. Para Sultan Anom berikutnya, seperti Sultan Raja Alimudin (1744–1798) dan penerusnya, melanjutkan tradisi pemerintahan, walaupun pengaruh Belanda semakin kuat. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Sultan Anom lebih banyak berperan simbolis, karena sebagian besar kewenangan politik telah diambil alih oleh pemerintah kolonial.<sup>61</sup> Namun, keraton tetap menjadi penjaga tradisi, pusat upacara adat, serta tempat berlangsungnya pendidikan keagamaan dan budaya. Seperti tradisi panjang jimat yang setiap tahun keraton kanoman lakukan mulai di masa kolonial hingga sekarang masih hidup tradisi tersebut tradisi ini diberitakan juga dalam koran *delpher*

---

<sup>61</sup> Bahru Rozi and Ahmad Misbah, “Sejarah Kesultanan Cirebon Dan Problematikanya Tahun 1677-1752,” *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 1, no. 1 (2022): 21–39.

tentang pelaksanaan tradisi panjang jimat pada tahun 1929, ribuang penduduk antusias melihat tradisi panjang jimat tersebut.<sup>62</sup>

Hingga era modern, Keraton Kanoman terus dipimpin oleh keturunan Sultan Anom, termasuk Sultan Raja Muh Nurus (1935–1989), Sultan Raja Muh Djalaludin (1989–2003), dan kini Sultan Raja Muh Emirudin. Keberadaan Keraton Kanoman tidak lagi berperan sebagai pusat kekuasaan politik, melainkan lebih pada simbol identitas kultural masyarakat Cirebon. Keraton ini menjadi saksi perjalanan panjang sejarah Cirebon, dari masa kejayaan perdagangan abad ke-16, dinamika politik abad ke-17, hingga era kolonial dan kemerdekaan.



<sup>62</sup> Delpher di akses pada tanggal 09 September 2025

## C. Cirebon Masa Kolonial

### 1. VOC

Pada abad ke-16, Cirebon sudah dikenal sebagai kota pelabuhan yang aktif melakukan perdagangan. Hubungan dagang yang terjalin dengan kerajaan lain, termasuk Mataram, menempatkan Cirebon pada posisi penting di jalur niaga pesisir utara Jawa. Catatan Tome Pires menyebutkan bahwa seorang syahbandar dari Cirebon bernama Pate Kadir telah berpengaruh di kawasan Malaka, menandakan peran Cirebon yang cukup menonjol dalam jaringan perdagangan internasional. Memasuki abad ke-17, situasi Cirebon berubah setelah wilayah ini berada dalam pengaruh Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Perusahaan dagang Belanda ini secara bertahap memperluas kendalinya dengan menguasai jalur distribusi dan kegiatan ekonomi di pelabuhan Cirebon.<sup>63</sup>

Kekuasaan VOC di Cirebon secara resmi dimulai melalui perjanjian pada 7 Januari 1681 yang ditandatangani Sultan Sepuh I. Isi perjanjian tersebut menegaskan bahwa Cirebon tidak lagi berada di bawah Mataram, melainkan menjadi wilayah protektorat VOC. Kompeni memperoleh hak monopoli atas komoditas penting seperti beras, lada, gula, kayu, dan hasil bumi lain, tanpa dikenakan pajak ekspor-impor. Ketentuan ini membuat VOC mengendalikan penuh aktivitas dagang di Cirebon.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ading Kusdiana and Wawan Hernawan, "Geger Ciayumajakuning: Mengungkap Jejak Perjuangan Ki Bagus Rangin Di Dalam Menentang Pemerintah Kolonial Belanda Dan Inggris Pada Abad Ke-19 M" (PUSBANGTER, 2022).Hal.78-79

<sup>64</sup> Rozi and Misbah, "Sejarah Kesultanan Cirebon Dan Problematikanya Tahun 1677-1752."



VOC sendiri dikelola oleh De Heeren Zeventien atau tujuh belas pemegang saham. Dalam praktiknya, saham VOC terbagi menjadi dua bentuk: peserta pasif yang tidak ikut mengelola, serta investor eksekutif yang memiliki kewenangan lebih besar. Dengan struktur tersebut, seluruh pemegang saham, termasuk direksi, ikut menanggung risiko dan keuntungan. Birokrasi pemerintahan VOC kemudian diperluas di Cirebon, menyebabkan bertambahnya pejabat serta pegawai Belanda yang ditempatkan di kota ini.<sup>65</sup>

Struktur sosial masyarakat Cirebon pada masa VOC tidak mengalami banyak perubahan dari sebelumnya. Penduduk tetap terbagi menjadi tiga golongan utama. Pertama adalah golongan bangsawan tinggi yang terdiri dari sultan beserta keluarga kerajaan. Kedua, golongan bangsawan menengah yang meliputi pejabat bawahan sultan, para ulama, serta kalangan saudagar. Ketiga, golongan rakyat biasa yang merupakan masyarakat umum. Di luar itu, Cirebon juga dihuni oleh komunitas pendatang, terutama orang Arab dan Tionghoa. Pada sekitar tahun 1700, telah ada rumah-rumah sederhana dari bambu milik orang Arab dan Tionghoa, sedangkan bangunan milik orang Eropa maupun istana sultan umumnya sudah berbahan kayu atau batu. Bahkan, pada tahun 1793 tercatat ada tujuh rumah bergaya Eropa di kota Cirebon.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> F S Gaastra, "Organisasi VOC," *Sejarah Nusantara ANRI*, Hlm 29 (2007).

<sup>66</sup> Kusdiana and Hernawan, "Geger Ciayumajakuning: Mengungkap Jejak Perjuangan Ki Bagus Rugin Di Dalam Menentang Pemerintah Kolonial Belanda Dan Inggris Pada Abad Ke-19 M." Hal.80-81

Kehadiran kelompok asing ini tidak serta-merta menimbulkan konflik sosial. Hubungan antar kelompok masyarakat berjalan relatif harmonis, meskipun pengaruh VOC semakin terasa. Kompeni mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu seperti tarum (nila) dan kopi, serta mengerahkan tenaga kerja paksa atau rodi untuk kepentingan pembangunan.<sup>67</sup> Para pekerja pribumi dipaksa memperbaiki jalan, membangun benteng, hingga membuat loji. Selain itu, para penguasa lokal juga dituntut mendukung kebijakan VOC dengan menyediakan tenaga kerja dari rakyatnya.<sup>68</sup> Situasi ini menunjukkan bahwa, meskipun ikatan feodal antara sultan dan rakyat masih ada, pengaruh Kompeni mulai membatasi ruang gerak politik sultan. Kekuasaan kesultanan perlahan melemah, terutama sejak tahun 1752 ketika VOC mulai campur tangan dalam urusan pergantian sultan.

Dominasi VOC di Cirebon semakin nyata ketika mereka membangun benteng perlindungan di dekat pelabuhan, yang kemudian dikenal dengan nama Fort van Beschermingh atau benteng Beschermingh.<sup>69</sup> Benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan militer, tetapi juga menjadi pusat administrasi sekaligus kediaman bagi para residen Belanda. Menariknya, para residen tersebut tidak hanya bertugas sebagai pejabat

---

<sup>67</sup> Sabrina Nobelia Putri Anggastri, "Preangerstelsel: Sistem Tanam Paksa Kopi Priangan Tahun 1723-1892," *Estoria: Journal of Social Science and Humanities* 3, no. 2 (2023): 445–59.

<sup>68</sup> Kusdiana and Hernawan, "Geger Ciayumajakuning: Mengungkap Jejak Perjuangan Ki Bagus Rangin Di Dalam Menentang Pemerintah Kolonial Belanda Dan Inggris Pada Abad Ke-19 M." Hal 82

<sup>69</sup> Naniek Harkantiningasih, "Pengaruh Kolonial Di Nusantara," *Kalpataru* 23, no. 1 (2014): 67–80.

pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai pengusaha. Dalam waktu singkat, kawasan sekitar benteng berkembang menjadi pusat bisnis baru yang menggantikan peran ekonomi kota lama di sekitar keraton.<sup>70</sup> Hal ini menandai pergeseran sentralitas kota, dari lingkungan istana menuju area pelabuhan yang semakin ramai oleh aktivitas perdagangan.

Perubahan tata ruang kota ini berdampak pada masyarakat setempat. Kehadiran pusat bisnis di sekitar benteng membuat aktivitas dagang rakyat lebih berkembang. Warga dapat terlibat dalam perdagangan maupun investasi kecil-kecilan, sehingga pendapatan ekonomi meningkat. Akan tetapi, manfaat ekonomi tersebut tidak sepenuhnya dinikmati rakyat, sebab kebijakan monopoli Kompeni menekan harga dan mengurangi keuntungan petani maupun pedagang lokal. Salah satu komoditas utama Cirebon, yakni beras, menjadi contoh nyata bagaimana VOC memonopoli hasil bumi. Padahal, sejak abad ke-17 Cirebon dikenal sebagai salah satu sentra penghasil beras di Jawa, selain Banten dan Rembang. Namun, keuntungan dari perdagangan beras justru banyak dinikmati oleh Kompeni, sementara rakyat menghadapi pajak dan kewajiban produksi yang berat.<sup>71</sup>

Kebijakan monopoli yang diterapkan VOC semakin menekan kehidupan masyarakat, khususnya para petani. Mereka dituntut untuk terus meningkatkan produksi,<sup>72</sup> sementara lahan-lahan pertanian secara

---

<sup>70</sup> Kusdiana and Hernawan, "Geger Ciayumajakuning: Mengungkap Jejak Perjuangan Ki Bagus Rangin Di Dalam Menentang Pemerintah Kolonial Belanda Dan Inggris Pada Abad Ke-19 M." Hal.83

<sup>71</sup> Kusdiana and Hernawan. Hal.83

<sup>72</sup> Hendra Kurniawan, "Dampak Sistem Tanam Paksa Terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870," *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (2014): 163–72.

berangsur mulai dikuasai oleh pemodal dan pengusaha yang bekerja sama dengan Kompeni. Desa-desa bahkan disewakan kepada orang-orang Tionghoa yang diberi wewenang untuk memungut pajak, mengelola tenaga kerja, hingga menjual barang-barang tertentu seperti candu.<sup>73</sup> Kondisi ini menimbulkan penderitaan bagi rakyat kecil karena selain harus memenuhi kewajiban tanam, mereka juga terbebani pajak dan kerja paksa. Dalam banyak kasus, keuntungan besar justru jatuh ke tangan perantara atau pengusaha yang dekat dengan VOC, sementara petani tetap hidup dalam keterbatasan.<sup>74</sup>

Di sisi lain, posisi Sultan dan elite kesultanan semakin terpinggirkan. Intervensi VOC yang kian dalam, termasuk dalam urusan suksesi, membuat otoritas kesultanan kehilangan legitimasi di mata rakyat. Ikatan feodal yang sebelumnya kuat antara kawula dan gusti mulai melemah seiring dominasi Kompeni. Pada saat yang sama, Cirebon mengalami transformasi dari kota tradisional berbasis istana menjadi kota pelabuhan dengan pusat ekonomi yang terhubung ke jaringan dagang internasional di bawah kendali Belanda.<sup>75</sup>

Kekuasaan VOC di Cirebon berlangsung hingga akhir abad ke-18.

Namun, krisis keuangan yang melanda VOC secara menyeluruh

---

<sup>73</sup> Benny G Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* (TransMedia, 2008). Hal. XX

<sup>74</sup> Agus Susilo and Sarkowi Sarkowi, "Pengaruh Politik Cultuurstelsel Terhadap Perkembangan Masyarakat Indonesia Tahun 1830-1870," *SWADESI: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 1, no. 1 (2020): 14–23.

<sup>75</sup> Firlianna Tiya Deviani, "Perjanjian 7 Januari 1681 Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Politik Ekonomi Di Kerajaan Cirebon (1681 M-1755 M)," *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 1, no. 1 (2016).

menyebabkan perusahaan ini bangkrut. Pada tahun 1799, VOC resmi dibubarkan, dan seluruh wilayah kekuasaannya,<sup>76</sup> termasuk Cirebon, diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dengan demikian, berakhirilah babak dominasi VOC di Cirebon, meninggalkan warisan berupa monopoli, perubahan struktur sosial, serta pergeseran orientasi ekonomi yang masih berpengaruh pada periode selanjutnya.

## 2. Hindia Belanda

Setelah VOC bubar Raja Lodewijk Napoleon menunjuk Marsekal Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 18 Januari 1807.<sup>77</sup> Pada tahun 1808 Daendels membagi wilayah Pulau Jawa ke dalam beberapa bagian administratif. Pertama, wilayah Batavia dan sekitarnya yang meliputi Tangerang, Karawang, Bogor, Cianjur, Sumedang, Bandung, dan Parakanmuncang dengan jumlah penduduk sekitar 200.000 jiwa. Kedua, Kerajaan Cirebon bersama tiga kabupaten Priangan, yaitu Limbangan, Sukapura, dan Galuh, dengan jumlah penduduk sekitar 350.000 jiwa. Ketiga, wilayah Pesisir Timur dan Ujung Barat yang ditaksir memiliki penduduk sekitar 1,6 juta jiwa<sup>78</sup>

Dalam sistem pemerintahannya, Daendels menerapkan model sentralistis. Para bupati dan sultan di Jawa tidak lagi memiliki kekuasaan

---

<sup>76</sup> Rosmaida Sinaga et al., "Masa Pemerintahan VOC Di Nusantara: Awal Kedatangan Hingga Penyebab Bubarnya VOC," *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 389–97.

<sup>77</sup> Safira Farhana et al., "Warisan Peninggalan Herman Willem Daendels Di Pulau Jawa," *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 277–81.

<sup>78</sup> Kusdiana and Hernawan, "Geger Ciayumajakuning: Mengungkap Jejak Perjuangan Ki Bagus Rangin Di Dalam Menentang Pemerintah Kolonial Belanda Dan Inggris Pada Abad Ke-19 M." Hal.85

penuh, melainkan diangkat sebagai ambtenaar atau pejabat tinggi kerajaan. Mereka diberi gaji dan disetarakan dengan pangkat militer, misalnya adipati setara letnan kolonel, tumenggung setingkat mayor, dan ingabehi setingkat kapten. Dengan aturan ini, kedudukan bupati dan sultan mulai bergeser sebagai alat administrasi kolonial.<sup>79</sup>

Dalam bidang ekonomi, kebijakan Daendels di wilayah Priangan dan Cirebon memberikan dampak yang cukup signifikan. Sistem ekonomi di daerah ini ditopang oleh dua sektor utama, yakni pertanian tradisional dan perkebunan modern berorientasi ekspor. Pertanian tradisional yang dijalankan masyarakat bersifat subsisten, hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Sementara itu, perkebunan modern diarahkan untuk menghasilkan komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar internasional dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sebagian besar masyarakat pribumi di Priangan-Cirebon tetap hidup dari sektor pertanian, khususnya di desa-desa, dengan mengandalkan perkebunan sebagai penopang ekonomi keluarga mereka.<sup>80</sup>

Meski pertanian masih menjadi sektor dominan, masyarakat juga mulai terlibat dalam bidang lain seperti jasa, pelayanan, serta perdagangan. Kehidupan ekonomi di wilayah ini semakin dinamis seiring kebijakan kolonial yang mendorong pengembangan tanaman perdagangan bernilai

---

<sup>79</sup> Kusdiana and Hernawan. Hal 85-87

<sup>80</sup> Jan Breman, *Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi Di Jawa 1720-1870* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). Hal. 95-96 dan 146-146

tinggi.<sup>81</sup> Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan dan mewajibkan penanaman komoditas seperti tebu, kopi, dan tembakau. Meskipun beberapa tanaman tersebut sudah dikenal sejak masa kerajaan, intervensi kolonial membuat budidayanya dilakukan dalam skala besar dan sistematis. Lahan-lahan pertanian diperluas dan diarahkan untuk memenuhi kepentingan ekspor ke pasar internasional.<sup>82</sup>

Perubahan pola pertanian tersebut membawa konsekuensi sosial. Rakyat yang sebelumnya menanam tanaman pangan untuk kebutuhan keluarga kini harus mengalokasikan sebagian lahan mereka untuk tanaman ekspor.<sup>83</sup> Hal ini menimbulkan pergeseran dalam kehidupan masyarakat desa, karena orientasi pertanian tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kebutuhan lokal, melainkan diarahkan oleh kepentingan ekonomi pemerintah kolonial.

Selain kebijakan di bidang administrasi dan ekonomi, Daendels juga menjalankan sejumlah program pembangunan yang meninggalkan pengaruh jangka panjang. Salah satu yang paling terkenal adalah pembuatan jalan raya pos yang membentang di Pulau Jawa. Jalan ini dibangun untuk memperlancar komunikasi dan mobilisasi pasukan, sekaligus mempermudah distribusi hasil perkebunan dari pedalaman ke pelabuhan.<sup>84</sup>

Pembangunan jalan pos dikerjakan dengan sistem kerja paksa, sehingga

---

<sup>81</sup> J Jayanto, "Industri Gula Di Karesidenan Cirebon Tahun 1870-1930 Dan Dampaknya Bagi Masyarakat," *Ilmu Sejarah-SI* 1, no. 1 (2016): 1–15.

<sup>82</sup> Lasmiyati Lasmiyati, "Kopi Di Priangan Abad XVIII-XIX," *Patanjala* 7, no. 2 (2015): 217–32.

<sup>83</sup> Lasmiyati.

<sup>84</sup> Farhana et al., "Warisan Peninggalan Herman Willem Daendels Di Pulau Jawa."

banyak rakyat pribumi yang menderita bahkan kehilangan nyawa akibat kerasnya beban kerja. Meski demikian, proyek ini dianggap sebagai salah satu warisan penting Daendels karena hingga kini masih memberi manfaat bagi transportasi di Jawa.<sup>85</sup>

Selain jalan, Daendels juga memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, seperti pengaturan pemanfaatan kayu hutan, serta membentuk sistem hukum baru yang lebih terpusat. Dalam bidang pemerintahan, ia berusaha mematahkan kekuasaan tradisional bupati dengan membagi daerah menjadi landrost ambt atau kantor kewalian. Daendels menata ulang wilayah Priangan dan Cirebon sebagai satu kesatuan administratif yang terpisah dari pengaruh langsung para bupati. Upaya ini bertujuan memperkuat kendali pemerintah kolonial dan mengurangi kemandirian politik lokal.<sup>86</sup>

Dari berbagai kebijakan tersebut, tampak bahwa pemerintahan Daendels di Cirebon menandai transisi dari pola feodal menuju tata kelola kolonial yang lebih sentralistik. Meskipun beberapa pembangunan fisik memberi manfaat hingga kini, mayoritas kebijakannya justru membebani rakyat, baik melalui kerja paksa, kewajiban tanam komoditas ekspor, maupun hilangnya otonomi para penguasa lokal. Situasi ini sekaligus menjadi gambaran awal bagaimana pemerintahan Hindia Belanda mengokohkan dominasinya di Cirebon.

---

<sup>85</sup> Kusdiana and Hernawan, "Geger Ciayumajakuning: Mengungkap Jejak Perjuangan Ki Bagus Rangin Di Dalam Menentang Pemerintah Kolonial Belanda Dan Inggris Pada Abad Ke-19 M." hal.85-89

<sup>86</sup> Kusdiana and Hernawan. Hal 85-89



## **BAB III**

### **CIREBON KOTA PELABUHAN**

#### **A. Cirebon sebagai Pelabuhan Dagang**

##### **1. Letak Geografis dan Keunggulan Strategis**

Secara geografis Cirebon memerankan wilayah yang strategis terutama dalam perekonomian yang letaknya tepat di pesisir utara Jawa,<sup>87</sup> Menjadi penghubung 2 suku terbesar di pulau Jawa yaitu suku Sunda dan Jawa. Juga sekaligus, Cirebon sebagai jalur penting dalam perdagangan Asia Tenggara. Berletak di pesisir menjadikan Cirebon sebagai simpul penghubung antara dunia maritim dan agraris, pelabuhan-pelabuhan yang berada di pesisir utara Jawa memainkan peran penting dalam menghubungkan pedalaman agraris dengan jaringan perdagangan Asia, termasuk Cirebon.

Selain keuntungan wilayah yang terletak di pesisir utara Jawa, Cirebon juga memiliki keunggulan geografis lain berupa muara-muara sungai yang bermuara ke laut Jawa.<sup>88</sup> Hal ini menjadikan Cirebon banyak diminati pedagang karena sebelum adanya transportasi canggih, sungai merupakan jalur distribusi alami yang bisa memudahkan perdagangan pada masa itu. Salah satu alasan Cirebon tumbuh pesat sebagai pelabuhan adalah

---

<sup>87</sup> Oda Ignatius Besar Hariyanto, "Destinasi Wisata Budaya Dan Religi Di Cirebon," *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 2 (2016): 214–22.

<sup>88</sup> Sanusi, Arif, and Hasyim, *Perubahan Eksistensi Sungai Dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon Pada Masa Hindia Belanda Tahun 1900-1942*. Hal.32

kemampuan wilayahnya yang mampu menghubungkan hinterland<sup>89</sup> dengan jalur perdagangan maritim.<sup>90</sup> Hal ini bisa dilihat dalam peta terdapat beberapa sungai pada tahun 1600-1700 M sebagai jalur distribusi perdagangan alami pada tahun tersebut.



**Gambar 3. 1 Peta tanah priangan bagian pantai utara jawa 1600-1700 M.**

Sumber : National Archief [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AMH-5617-NA\\_Map\\_of\\_the\\_Priang\\_lands,\\_that\\_is,\\_part\\_of\\_the\\_northern\\_coast\\_of\\_Java.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AMH-5617-NA_Map_of_the_Priang_lands,_that_is,_part_of_the_northern_coast_of_Java.jpg)

Secara geografis juga Cirebon memainkan peran penting yang tidak hanya jalur perdangan Asia Tenggara melainkan jalur perdangan

<sup>89</sup> Hinterland adalah daerah pedalaman di belakang sebuah pusat pertumbuhan (seperti kota atau pelabuhan) yang berfungsi sebagai pemasok kebutuhan pangan dan bahan mentah, serta sebagai wilayah yang terhubung secara ekonomi dan logistik dengan pusat tersebut.

<sup>90</sup> Aisyah Syafiera, "Perdagangan Di Nusantara Abad Ke-16," *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah* 4, no. 3 (2016).

Internasional juga.<sup>91</sup> Hal ini memiliki fungsi sebagai penghubung antara Asia Timur, Asia Tenggara, hingga India dan Timur Tengah. Meski tidak lebih unggul atau tidak sepenting letak geografis Malaka atau Banten, Cirebon tetap memainkan peran sebagai pelabuhan penghubung yang melayani kapal-kapal dari berbagai wilayah. Jalur pantai utara Jawa adalah “jalur sutra lokal” yang mempertemukan pedagang asing dengan para produksi agraris pedalaman pulau Jawa.<sup>92</sup>

Geografi Cirebon yang relatif terlindung dari ombak besar laut membuat pelabuhannya cocok untuk berlabuh kapal-kapal niaga. Kondisi ini yang menjadikan serta mendorong Cirebon sebagai pelabuhan yang kosmopolit, dari berbagai pedagang asing berdatangan mulai dari Arab, Gujarat, Cina, Eropa dan lainnya singgah untuk berdagang.<sup>93</sup> Multietnis yang terkumpul di Cirebon menunjukkan sejak awal, bahwa Cirebon tidak hanya unggul serta berkembang karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena posisinya yang strategis dalam peta perdagangan internasional. Dari posisinya sebagai salah satu kota yang berada di pesisir utara Jawa memperoleh keuntungan sebagai titik temu bukan saja dalam perekonomian melainkan dalam perdagangan lintas budaya. Dengan demikian, geografi

---

<sup>91</sup> Syafiera.

<sup>92</sup> Syafiera.

<sup>93</sup> Iwan Hermawan, Octaviadi Abrianto, and Revi Mainaki, “Pengaruh Perkeretaapian Terhadap Perkembangan Struktur Tata Ruang Kota Cirebon Berdasarkan Tinggalan Arkeologis,” *KALPATARU* 29, no. 2 (2020): 117–32.

Cirebon menempatkannya sebagai “jembatan” antara pedalaman agraris dan dunia maritim internasional.<sup>94</sup>

## 2. Pelabuhan sebagai Titik Temu Berbagai Etnis

Sedikit di singgung sebelumnya, bahwa Cirebon menjadi pelabuhan yang mempertemukan berbagai etnis. Letaknya yang strategis menjadikan penyebab hadirnya multietnis di Cirebon. Sejak abad ke 15 Pelabuhan Cirebon berkembang sebagai simpul penting dalam jalur perdagangan regional di pantai utara Jawa dengan dukungan muara-muara sungai besar yang menghubungkan pedalaman agraris. Menjadikan Cirebon sebagai titik temu para pedagang dari berbagai kawasan. Bahkan dari penamaan “Cirebon” juga sudah bisa mendefinisikan sebagai wilayah multietnis. Menurut naskah *carita purwaka caruban nagari* menjelaskan nama Cirebon diambil dari kata “Caruban” yang berarti campuran. Hingga kata caruban mendapatkan perubahan pelafalan oleh masyarakat sekitar “Caruban” → “Carbon” → “Cerbon” kemudian menjadi “Cirebon”. Makna campuran memiliki arti wilayah tersebut didiami oleh penduduk dari berbagai bangsa, agama, bahasa, mata pencahariannya dan etnisnya.<sup>95</sup>

Pertemuan berbagai etnis ini tidak hanya sebatas berefek pada perdangan, melainkan juga membuka jalan bagi pertukaran budaya, bahasa dan bahkan agama. Kain, dan rempah biasanya di bawa oleh para pedagang dari Arab, Gujarat dan India Barat. Keramik, sutra serta barang

---

<sup>94</sup> Suci Nur Romadona, “KONTRIBUSI KESULTANAN CIREBON DALAM PEMBENTUKAN PERADABAN ISLAM DI WILAYAH JAWA BARAT,” n.d.

<sup>95</sup> Fahlevi, “Dinamika Hubungan Kesultanan Cirebon Dengan Kesultanan Banten Tahun 1649-1678 M.”

mewah lainnya biasa diperdagangkan oleh pedagang Tiongkok. Sementara para pedagang Nusantara memperdagangkan beras, kayu serta hasil bumi lainnya. Sehingga proses islamisasi di Cirebon juga begitu cepat, karena banyak terjadi akulturasi kebudayaan lokal dengan unsur asing.<sup>96</sup> Pertemuan antar etnis ini tidak hanya bertepatan Cirebon masa Islam. Sebelum Cirebon pra Islam pun pelabuhan Cirebon menjadi pertemuan antar etnis<sup>97</sup>. Hal ini juga di tulis dalam penelitian Denys Lombard bahwa Pelabuhan Cirebon dari dahulu sudah dijadikan tempat perdagangan dari berbagai etnis, etnis yang disebut dalam bukunya diantaranya adalah “*Orang Cina, Arab, Parsi, India, Malaka, Tumasik, pasai, Madura dan Palembang*”.<sup>98</sup>

Pedagang dari wilayah Gujarat yang beretnis Arab memiliki kontribusi dalam perkembangan budaya di Cirebon, karena berpengaruh setidaknya dalam 2 aspek utama yaitu perdagangan dan agama. Kain, rempah serta komoditi lainnya yang didatangkan diarahkan. Namun bukan hanya sebatas memperkenalkan dagangannya pedagang arab dan gujarat membawakan ajaran Islam yang lambat laun bisa diterima oleh masyarakat setempat.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> Romadona, “Kontribusi Kesultanan Cirebon Dalam Pembentukan Peradaban Islam Di Wilayah Jawa Barat.”

<sup>97</sup> Hj. Helmiati, *SEJARAH ISLAM ASIA TENGGARA*, vol. 17 (Riau: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

<sup>98</sup> Denys Lombard, “Nusa Jawa: Silang Budaya Bagian II (Jaringan Asia),” *Le Carrefour Javanais*, 2005. Hal.56

<sup>99</sup> Zulfah, “Islamisasi Di Cirebon: Peran Dan Pengaruh Walangsungsang Persepektif Naskah Carios Walangsungsang.”

### 3. Penghubung Muara & Pedalaman

Pelabuhan Cirebon sejak awal kemunculannya telah memainkan peranan penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di kawasan pesisir utara Jawa. Kedudukannya yang strategis menjadikan pelabuhan ini sebagai simpul utama yang menghubungkan wilayah pedalaman Cirebon yang subur dengan jalur niaga maritim di kepulauan Indonesia bahkan hingga mancanegara.<sup>100</sup> Dari pedalaman Cirebon, terutama daerah dataran rendah, dihasilkan beras dalam jumlah besar yang menjadi komoditas utama dan diekspor sampai ke Malaka. Sementara dari dataran tinggi yang dikelilingi oleh gunung-gunung seperti Ciremai, Sawal, dan Cakrabuana, dihasilkan kayu dengan kualitas baik yang juga memiliki nilai ekonomi tinggi untuk diperdagangkan. Kondisi geografis tersebut menjadikan Cirebon sebagai daerah yang kaya hasil bumi dan mendukung perkembangan pelabuhannya.<sup>101</sup>

Dalam perkembangannya, pelabuhan Cirebon menghadapi persaingan dengan pelabuhan-pelabuhan lain di sekitarnya, seperti Losari, Tegal, Japura, Amparan Jati, dan Dermayu (Indramayu). Meski demikian, Cirebon mampu berkembang lebih pesat karena statusnya sebagai pusat kerajaan yang memberi legitimasi sekaligus perlindungan terhadap aktivitas perdagangan. Catatan Tome Pires pada tahun 1513 menegaskan hal ini,

---

<sup>100</sup> Anwar Firdaus Mutawally and Dade Mahzuni, "Kehidupan Masyarakat Agraris Dan Maritim Cirebon Awal Abad Ke-20: Suatu Tinjauan Ekologi Manusia," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 6 (2023): 2053–64.

<sup>101</sup> Breman, *Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi Di Jawa 1720-1870*. Hal 114-115

ketika ia menyebut bahwa Cherimon<sup>102</sup> memiliki pelabuhan yang baik dan dapat disinggahi beberapa Jung. Tome Pires juga mencatat bahwa kapal-kapal tersebut dapat mencapai pedalaman melalui sungai-sungai yang bermuara di sekitar Cirebon. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa sejak awal abad ke-16, Cirebon telah menjadi pintu gerbang penting yang mempertemukan hasil bumi pedalaman dengan arus perdagangan laut.

Keterangan Tome Pires mengenai sungai-sungai yang dapat dilayari hingga ke pedalaman menunjukkan pentingnya jaringan perairan dalam menunjang fungsi pelabuhan Cirebon. Sungai Kasumenan atau Kriyan, misalnya, dapat dilalui hingga ke wilayah Cirebon Girang, yang pada masa awal merupakan salah satu pusat permukiman penting.<sup>103</sup> Selain itu, Sungai Cimanuk di sebelah utara serta Sungai Losari di sebelah timur turut berperan dalam menghubungkan daerah pedalaman dengan wilayah pesisir. Namun, dari keempat sungai utama yang disebutkan, hanya Sungai Cimanuk yang mampu menjangkau paling jauh ke pedalaman. Meskipun demikian, sungai ini tidak bermuara langsung di kota Cirebon, melainkan di bagian utara, sehingga perjalanan barang menuju pelabuhan tetap membutuhkan tambahan waktu dan biaya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa

---

<sup>102</sup> Cherimon merupakan sebutan atau nama lain dari kota Cirebon, yang tercatat dalam catatan Tome Pires pada abad ke-16.

<sup>103</sup> A. B. Lopian and Edi Sedyawati, "Kajian Cirebon Dan Kajian Jalur Sutra," in *CIREBON SEBAGAI BANDAR JALUR SUTRA Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, 2nd ed. (Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997), 1–8.

meskipun transportasi sungai sangat membantu, terdapat keterbatasan dalam efisiensi dan jarak tempuhnya.<sup>104</sup>

Selain jalur air, jalur darat sejak lama telah berperan sebagai penghubung pedalaman dengan pelabuhan. Bukti mengenai keberadaan jalur darat dapat ditemukan dalam kisah-kisah yang termuat di Babad Cirebon. Dalam teks tersebut dikisahkan perjalanan putera-putera Prabu Siliwangi yang meninggalkan istana Pajajaran untuk mencari guru agama Islam, hingga akhirnya bertemu dengan Syekh Nurjati di Gunung Jati. Kisah tersebut mencerminkan bahwa jalur darat sudah dimanfaatkan sejak masa Pajajaran, baik untuk kepentingan perdagangan, keagamaan, maupun ekspedisi politik. Perjalanan serupa juga disebutkan dilakukan oleh kerajaan Hindu seperti Pajajaran dan Galuh serta kerajaan Islam seperti Cirebon dan Demak. Melalui jalur darat ini, hubungan antara muara dan pedalaman tidak hanya berupa pertukaran barang, tetapi juga melibatkan pertukaran budaya dan agama yang memperkaya dinamika kehidupan masyarakat Cirebon.<sup>105</sup>

Seiring perkembangan waktu, jalur darat semakin menegaskan perannya sebagai penghubung utama antara pedalaman dan pelabuhan Cirebon. Catatan sejarah dari masa kolonial menunjukkan bahwa para pejabat Belanda pun memanfaatkan jalur darat ketika melakukan perjalanan dari pedalaman menuju pesisir. Van Imhoff, misalnya, dalam kunjungannya

---

<sup>104</sup> Susanto Zuhdi, "Hubungan Pelabuhan Cirebon Dengan Daerah Pedalaman: Suatu Kajian Dalam Kerangka Perbandingan Dengan Pelabuhan Cilacap, 1800-1940," in *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, 2nd ed. (Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997), 117–28.

<sup>105</sup> Zuhdi.



pada tahun 1746 mencatat perjalanannya dari Surakarta menuju Tegal dan kemudian ke Cirebon melalui jalur-jalur darat yang melintasi berbagai daerah di Jawa bagian tengah. Catatan perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa Cirebon telah terhubung dengan jaringan rute darat yang cukup luas dan berfungsi sebagai simpul penting dalam pergerakan orang maupun barang dari dan menuju wilayah pedalaman.<sup>106</sup>

Namun, pada masa pelaksanaan *Cultuurstelsel* sejak 1830, pemerintah kolonial menghadapi berbagai kendala dalam pengangkutan komoditas ekspor, terutama kopi. Meskipun jalur darat yang menghubungkan pedalaman dengan pelabuhan Cirebon sudah tersedia, kondisi jalannya masih jauh dari memadai. Laporan-laporan resmi Belanda kerap mengeluhkan sulitnya pengangkutan hasil bumi, terutama dari wilayah Galuh. Hambatan tersebut menandakan bahwa meskipun pelabuhan Cirebon telah memiliki posisi strategis sebagai pintu keluar hasil pertanian pedalaman, keterbatasan infrastruktur transportasi menjadi faktor penghambat yang signifikan.<sup>107</sup>

Situasi ini kemudian mendorong pemerintah kolonial untuk memperkuat jaringan transportasi, baik melalui perbaikan jalan maupun pengembangan sarana transportasi lain. Dengan demikian, pelabuhan Cirebon tetap dapat menjalankan perannya sebagai penghubung antara hasil bumi pedalaman dengan jalur perdagangan internasional. Perkembangan ini

---

<sup>106</sup> Zuhdi.

<sup>107</sup> Zuhdi.

sekaligus menunjukkan bagaimana fungsi pelabuhan tidak dapat dilepaskan dari dukungan infrastruktur yang menghubungkan pedalaman dengan muara.

Perkembangan jaringan transportasi pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 membawa perubahan besar bagi peran Pelabuhan Cirebon. Sebelum hadirnya kereta api, jalur sungai dan jalan darat masih menjadi andalan utama untuk menghubungkan pedalaman dengan pelabuhan. Namun, kedua moda tersebut memiliki keterbatasan baik dari segi kecepatan maupun kapasitas. Situasi berubah dengan dibukanya jalur kereta api Semarang–Cirebon oleh Semarang–Cirebon Stoommaatschappij pada tahun 1893 sepanjang 275 kilometer yang resmi beroperasi pada tahun 1897.<sup>108</sup> Jalur ini menjadi tonggak penting karena memperlancar arus hasil bumi dari pedalaman menuju pelabuhan. Selanjutnya, jaringan rel diperluas dengan pembangunan jalur Cirebon–Cikampek pada tahun 1909 yang baru bisa beroperasi pada tahun 1912.<sup>109</sup> dan Cirebon–Kroya pada tahun 1912 dan baru bisa beroperasi pada tanggal 1 Januari 1917.<sup>110</sup> Dengan adanya kereta api, hambatan transportasi dapat diatasi, dan pelabuhan Cirebon semakin mengukuhkan posisinya sebagai penghubung strategis antara muara dan pedalaman.

---

<sup>108</sup> Iwan Hermawan, “Stasiun Kereta Api Cirebon Prujakan Dalam Tata Ruang Kota Cirebon Pada Masa Kolonial Belanda (1897-1942),” *WALENNAE: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan Dan Tenggara* 20, no. 1 (2022): 69–81.

<sup>109</sup> Iwan Hermawan and Revi Mainaki, “Pemetaan Jalur Dan Tinggalan Perkeretaapian Masa Kolonial Belanda Di Wilayah Cirebon Timur,” *Jurnal Sositologi* 18, no. 3 (2019): 560–74.

<sup>110</sup> Hermawan, Abrianto, and Mainaki, “Pengaruh Perkeretaapian Terhadap Perkembangan Struktur Tata Ruang Kota Cirebon Berdasarkan Tinggalan Arkeologis.”

Sejalan dengan peningkatan konektivitas, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Cirebon juga mengalami perkembangan pesat. Berbagai barang impor mulai masuk melalui pelabuhan, seperti kain lena, ikan asin dari Siam, barang-barang kuningan, tembaga, porselen, hingga minyak korek api.<sup>111</sup> Barang-barang tersebut tidak hanya menjadi kebutuhan konsumsi, tetapi juga berfungsi sebagai modal usaha yang mendorong dinamika ekonomi lokal. Arus masuk dan keluar barang melalui pelabuhan Cirebon mencerminkan adanya transformasi dalam pola konsumsi serta meningkatnya keterhubungan antara Cirebon dengan jaringan perdagangan internasional.

Dengan demikian, sejak masa awal hingga periode kolonial, Pelabuhan Cirebon terbukti menjalankan fungsi vital sebagai penghubung muara dan pedalaman. Ia tidak hanya menjadi pintu keluar hasil bumi, tetapi juga sarana masuknya berbagai pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya yang membentuk identitas Cirebon sebagai salah satu pusat penting di pesisir utara Jawa.

## **B. Komoditi & Bentuk Kewilayahan Cirebon**

### **1. Komoditi Cirebon**

Cirebon sejak masa awal perkembangannya telah dikenal sebagai daerah yang kaya akan komoditas hasil bumi. Kondisi geografis yang subur

---

<sup>111</sup> Zuhdi, "Hubungan Pelabuhan Cirebon Dengan Daerah Pedalaman: Suatu Kajian Dalam Kerangka Perbandingan Dengan Pelabuhan Cilacap, 1800-1940."

di wilayah pedalaman, baik dataran rendah maupun dataran tinggi, memungkinkan Cirebon menghasilkan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dari dataran rendah, terutama areal persawahan yang luas, dihasilkan beras yang menjadi komoditas utama perdagangan. Beras Cirebon tidak hanya mencukupi kebutuhan lokal, tetapi juga diekspor hingga ke pusat-pusat niaga penting seperti Malaka.<sup>112</sup> Sementara dari daerah pegunungan yang mengelilingi Cirebon, seperti Gunung Ciremai, Sawal, dan Cakrabuana, dihasilkan kayu berkualitas baik yang juga menjadi barang dagangan bernilai tinggi.<sup>113</sup> Kedua komoditas ini, beras dan kayu, menjadi fondasi utama perdagangan Cirebon yang menghubungkan pedalaman dengan jalur laut internasional.<sup>114</sup>

Seiring dengan berkembangnya peran pelabuhan, komoditas Cirebon tidak hanya terbatas pada hasil bumi. Arus perdagangan juga memperlihatkan masuknya berbagai barang impor yang melengkapi kebutuhan masyarakat setempat.<sup>115</sup> Kehadiran komoditas impor ini memperlihatkan adanya interaksi yang semakin erat antara masyarakat Cirebon dengan jaringan perdagangan internasional. Barang impor tidak hanya dikonsumsi, tetapi juga menjadi sarana penunjang usaha dan produksi lokal. Dengan demikian, komoditas Cirebon memainkan peranan ganda:

---

<sup>112</sup> Uka Tjandarasasmita, "Bandar Cirebon Dalam Jaringan Pasar Dunia," in *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, 2nd ed. (Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997), 55–76.

<sup>113</sup> Singgih Tri Sulisti Yono, "Dari Lemahwungkuk Hingga Cheribon : Pasang-Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awa Abad XX," in *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, 2nd ed. (Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997), 77–116.

<sup>114</sup> Uka Tjandarasasmita, "Bandar Cirebon Dalam Jaringan Pasar Dunia."

<sup>115</sup> Uka Tjandarasasmita.

sebagai hasil bumi yang keluar menuju pasar internasional dan sebagai penerima barang-barang asing yang memperkaya dinamika ekonomi lokal.

Komoditas yang dihasilkan dari pedalaman Cirebon memiliki arti penting tidak hanya bagi kebutuhan lokal, tetapi juga dalam mendukung roda perdagangan kolonial. Pada masa tanam paksa atau *Cultuurstelsel* sejak tahun 1830, pemerintah kolonial Hindia Belanda menaruh perhatian besar terhadap hasil pertanian dari wilayah Priangan dan Cirebon. Salah satu komoditas utama yang dikembangkan adalah kopi.<sup>116</sup> Namun, pengangkutan kopi dari pedalaman menuju pelabuhan Cirebon sering menghadapi kendala. Jalan darat yang tersedia pada masa itu belum sepenuhnya memadai, sehingga perjalanan dari daerah seperti Galuh ke Cirebon menjadi sulit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan komoditas berlimpah tidak selalu berbanding lurus dengan kelancaran distribusinya.

Meski demikian, kopi tetap menjadi salah satu komoditas unggulan yang memperkuat peran pelabuhan Cirebon. Bersama beras dan kayu, kopi turut mengalir ke jalur perdagangan internasional dan mempertegas posisi Cirebon sebagai simpul niaga penting di pesisir utara Jawa. Di sisi lain, pelabuhan ini juga menjadi pintu masuk bagi komoditas asing yang semakin bervariasi.

---

<sup>116</sup> Breman, *Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi Di Jawa 1720-1870*. Hal 121

No.	Jenis Komoditas Perdagangan	Kapasitas Produksi	Satuan
1.	Kopi	14.000 – 18.000	Pikul
2.	Gula	500.000	Pon
3.	Benang (kapas)	20.000	Pon
4.	Nila	6.000 – 8.000	Pon
5.	Kayu Dolok	80.000	-
6.	Kayu Bahan Tong Mesiu	40.000	-
7.	Kayu Balok	2.000	-

**Gambar 3. 2 Bagan Jumlah Produksi Komoditas Perdagangan Daerah Cirebon pada Akhir Abad ke-18**

Sumber : Buku Geger Ciayumajakuning: Mengungkap jejak perjuangan Ki Bagus Rangin di dalam menentang pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris pada Abad ke-19 M

Kehadiran porselen, tembaga, minyak korek api, hingga kain impor menjadi indikator meningkatnya ketergantungan masyarakat pada produk luar. Hal tersebut sekaligus menandai pergeseran pola konsumsi, dari semula berbasis pada produk lokal menjadi semakin terbuka terhadap produk-produk asing. Dengan demikian, pelabuhan Cirebon tidak hanya berfungsi sebagai tempat keluar hasil bumi, tetapi juga sebagai titik masuk komoditas yang memperkaya kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Perkembangan jaringan transportasi pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 membawa dampak besar bagi kelancaran distribusi komoditas Cirebon. Sebelum hadirnya kereta api, pengangkutan hasil bumi sepenuhnya mengandalkan jalur sungai dan jalan darat.<sup>117</sup> Namun, kedua jalur tersebut memiliki keterbatasan, baik dari segi kapasitas maupun

<sup>117</sup> Zuhdi, “Hubungan Pelabuhan Cirebon Dengan Daerah Pedalaman: Suatu Kajian Dalam Kerangka Perbandingan Dengan Pelabuhan Cilacap, 1800-1940.”

efisiensi waktu. Keadaan berubah ketika jalur kereta api Semarang–Cirebon mulai dibangun pada tahun 1893 seperti yang dijelaskan di pembahasan sebelumnya.<sup>118</sup> Kehadiran rel kereta api ini memungkinkan arus hasil bumi dari pedalaman, seperti beras dan kopi, dapat lebih cepat sampai ke pelabuhan untuk kemudian diekspor ke berbagai wilayah.

Tidak berhenti di situ, pembangunan jalur Cirebon–Cikampek pada tahun 1909 dan jalur Cirebon–Kroya pada tahun 1912 semakin memperluas jaringan distribusi.<sup>119</sup> Dengan adanya jaringan kereta api ini, hambatan transportasi yang sebelumnya menghambat perdagangan komoditas dapat diminimalisasi. Hasil bumi pedalaman, baik dari dataran rendah maupun dataran tinggi, kini dapat dipasok ke pelabuhan dengan lebih lancar. Perubahan ini juga berdampak pada volume ekspor yang meningkat, sehingga memperkuat kedudukan Cirebon sebagai salah satu pelabuhan utama di pesisir utara Jawa.

Di sisi lain, perkembangan transportasi juga mempermudah masuknya komoditas impor ke wilayah pedalaman. Barang-barang seperti kain lena, minyak korek api, serta porselen yang sebelumnya terbatas di kota pelabuhan kini dapat menjangkau masyarakat pedalaman. Dengan demikian, keberadaan jaringan transportasi modern mempertegas peran Cirebon sebagai simpul perdagangan yang menghubungkan arus keluar

---

<sup>118</sup> Yono, “Dari Lemahwungkuk Hingga Cheribon : Pasang-Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awal Abad XX.”

<sup>119</sup> Zuhdi, “Hubungan Pelabuhan Cirebon Dengan Daerah Pedalaman: Suatu Kajian Dalam Kerangka Perbandingan Dengan Pelabuhan Cilacap, 1800-1940.”

hasil bumi sekaligus arus masuk barang impor yang mewarnai kehidupan ekonomi masyarakat.

Arus keluar-masuk komoditas melalui Pelabuhan Cirebon tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi, tetapi juga memperlihatkan proses transformasi sosial masyarakatnya. Beras, kayu, dan kopi sebagai komoditas utama dari pedalaman menjadi tulang punggung perdagangan yang menghubungkan Cirebon dengan pasar regional maupun internasional.<sup>120</sup> Hasil bumi ini memperkuat posisi Cirebon sebagai pemasok kebutuhan penting bagi jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Pada saat yang sama, barang-barang impor yang masuk melalui pelabuhan menjadi indikator keterbukaan masyarakat Cirebon terhadap pengaruh luar. Barang impor memperlihatkan adanya integrasi Cirebon dengan arus perdagangan global.

Keberagaman komoditas ini tidak hanya mendorong kegiatan ekonomi, tetapi juga membentuk pola konsumsi baru yang memengaruhi gaya hidup dan struktur sosial. Barang impor tidak lagi sekadar simbol keterhubungan dengan dunia luar, melainkan juga menjadi sarana untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sejalan dengan perkembangan jaringan transportasi yang semakin modern, keterhubungan antara pedalaman, pelabuhan, dan dunia luar pun semakin erat.

---

<sup>120</sup> PR. Arief Natadiningrat, "Potensi Dan Prospek Perekonomian Cirebon," in *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, 2nd ed. (Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997), 231–68.



Dengan demikian, komoditas Cirebon dapat dipahami sebagai unsur kunci yang menjadikan pelabuhan ini berperan vital dalam sejarah perdagangan di Jawa. Hasil bumi yang keluar dari pedalaman dan barang-barang impor yang masuk melalui pelabuhan membentuk siklus ekonomi yang dinamis. Dari sinilah identitas Cirebon sebagai pusat perdagangan, sekaligus jembatan antara muara dan pedalaman, semakin menguat dan meninggalkan warisan penting dalam sejarah sosial-ekonomi Indonesia.

## **2. Pembentukan Wilayah Dagang**

Cirebon sejak awal pertumbuhannya dikenal sebagai sebuah kota pelabuhan yang berkembang dalam konteks perdagangan. Menurut A.B. Lopian dan Edi Sedyawati, letak Cirebon di antara Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadikannya titik pertemuan antara kebudayaan Jawa dan Sunda, serta menjadikan kota ini sebagai jembatan dagang yang penting.<sup>121</sup> Dari posisi geografis tersebut, Cirebon kemudian berfungsi sebagai pelabuhan penghubung antara pedalaman dengan jalur perdagangan internasional di pantai utara Jawa. Peninggalan arkeologis dan budaya menunjukkan masuknya berbagai pengaruh asing, mulai dari Arab, India, Cina hingga Eropa, yang semuanya hadir melalui jalur perdagangan maritim.<sup>122</sup>

Selain sebagai simpul perdagangan, Cirebon juga memainkan peran dalam penyebaran agama Islam. Hasan Muarif Ambary menjelaskan bahwa pelabuhan Cirebon menjadi pusat pertumbuhan dan penyebaran Islam di

---

<sup>121</sup> A. B. Lopian and Edi Sedyawati, "Kajian Cirebon Dan Kajian Jalur Sutra."

<sup>122</sup> A. B. Lopian and Edi Sedyawati.

Jawa Barat, terutama melalui figur Sunan Gunung Jati yang memiliki kedudukan penting baik dalam perkembangan politik maupun dalam arus perdagangan yang menunjang proses Islamisasi.<sup>123</sup> Dengan demikian, identitas Cirebon sejak awal memang terbentuk dari aktivitas ekonomi maritim yang terhubung dengan dimensi politik dan religius.

Keterlibatan Cirebon dalam jaringan perdagangan internasional juga tercatat dalam sumber Portugis dan Belanda. Tome Pires, seorang penulis Portugis abad ke-16, menyebut Cirebon sebagai pelabuhan yang indah dan ramai dengan kapal-kapal yang singgah, menghasilkan beras serta bahan makanan lain sebagai komoditas utama.<sup>124</sup> Catatan Belanda kemudian menguatkan posisi Cirebon sebagai bandar dagang, yang kelak menarik perhatian VOC dalam upayanya menguasai jalur perdagangan di Jawa.<sup>125</sup>

Sejarah Cirebon sebagai wilayah dagang semakin jelas ketika memperhatikan perkembangannya sejak Lemahwungkuk hingga awal abad ke-20. Singgih Tri Sulistiyono menjelaskan bahwa kota Cirebon pada mulanya berkembang dari sebuah pemukiman pesisir, lalu tumbuh menjadi kota pelabuhan dengan dinamika pasang-surut yang erat kaitannya dengan politik regional dan perdagangan antarbangsa.<sup>126</sup> Posisi strategis ini

---

<sup>123</sup> Irma M. Johan, "Penelitian Sejarah Kebudayaan Cirebon Dan Sekitarnya Antara Abad XV--XIX : Tinjauan Bibliografi," in *CIREBON SEBAGAI BANDAR JALUR SUTRA Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, 2nd ed. (Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997), 9–34.

<sup>124</sup> Irma M. Johan.

<sup>125</sup> RZ Leirissa, "Cirebon Dalam Arsip VOC," in *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, 2nd ed. (Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997), 203–8.

<sup>126</sup> Yono, "Dari Lemahwungkuk Hingga Cheribon : Pasang-Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awai Abad XX."

membuat Cirebon menjadi bagian penting dalam jalur perdagangan dunia, sekaligus pintu masuk bagi berbagai pengaruh budaya luar.

Namun, peran Cirebon sebagai bandar dagang tidak terlepas dari intervensi politik. Susanto Zuhdi menyoroti bahwa pelabuhan Cirebon bukan hanya berfungsi untuk perdagangan internasional, melainkan juga menghubungkan daerah pedalaman dengan jalur ekspor-impor. Hal ini serupa dengan peran pelabuhan Cilacap pada abad ke-19, sehingga dapat dilihat bahwa Cirebon menjadi simpul vital bagi distribusi hasil bumi dari pedalaman menuju pasar global.<sup>127</sup> Dengan demikian, perdagangan menjadi fondasi utama pembentukan struktur ekonomi Cirebon.

Dominasi kolonial Belanda kemudian mempertegas arah perkembangan kota dagang ini. R.Z. Leirissa menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-18, VOC secara bertahap menguasai Cirebon sebagai bagian dari strategi pengendalian jalur perdagangan di Jawa. Arsip VOC menggambarkan bagaimana pelabuhan Cirebon dijadikan titik kendali distribusi komoditas dan sumber daya, sekaligus sarana memperluas hegemoni kolonial.<sup>128</sup> Dalam perkembangan berikutnya, kebijakan kolonial Belanda menjadikan Cirebon tidak hanya sebagai pusat dagang, tetapi juga sebagai instrumen penguasaan ekonomi dan politik di wilayah Jawa Barat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa identitas Cirebon sebagai

---

<sup>127</sup> Zuhdi, "Hubungan Pelabuhan Cirebon Dengan Daerah Pedalaman: Suatu Kajian Dalam Kerangka Perbandingan Dengan Pelabuhan Cilacap, 1800-1940."

<sup>128</sup> Leirissa, "Cirebon Dalam Arsip VOC."

wilayah dagang terbentuk sejak awal dan terus mengalami transformasi di bawah pengaruh kolonialisasi.

### 3. Peran Keraton dalam Ekonomi Cirebon

Keraton Cirebon sejak awal memainkan peranan penting dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Seperti kota-kota pesisir Jawa lainnya, pasar ditempatkan tidak jauh dari kompleks keraton agar aktivitas dagang dapat diawasi langsung oleh penguasa. Menurut Uka Tjandarasasmita, hal ini merupakan pola umum dalam jaringan pasar dunia, di mana Cirebon menjadi simpul perdagangan yang terhubung dengan pedalaman sekaligus jalur maritim. Dengan demikian, keraton berfungsi bukan hanya sebagai pusat politik, tetapi juga sebagai pengendali sirkulasi ekonomi.<sup>129</sup>

Pasar tradisional yang berada di sekitar keraton, seperti Pasar Kanoman dan Pasar Kasepuhan, tumbuh menjadi pusat kegiatan perdagangan rakyat. Keraton kemudian memberlakukan pajak pasar tahunan, yang jumlahnya relatif kecil sehingga tidak memberatkan pedagang. Sistem ini membuat pasar semakin ramai, dengan kehadiran saudagar Cina maupun pedagang pribumi.<sup>130</sup>

Pada masa VOC dan Belanda, keraton juga menjadi penghubung antara kekuasaan kolonial dengan masyarakat lokal. Arsip VOC menggambarkan bagaimana pelabuhan dan pasar Cirebon dijadikan sarana

---

<sup>129</sup> Uka Tjandarasasmita, "Bandar Cirebon Dalam Jaringan Pasar Dunia."

<sup>130</sup> Abdul Wahid, *Bertahan Di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa Dan Ekonomi Kota Cirebon Pada Masa Depresi Ekonomi, 1930-1940, (No Title)*, 2009. hlm. 71

untuk mengendalikan perdagangan, sementara keraton tetap dilibatkan dalam pengelolaan pajak dan tata niaga.<sup>131</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan politiknya berkurang, keraton tetap memiliki posisi penting dalam struktur ekonomi Cirebon. Dengan demikian, peran keraton dalam ekonomi bukan hanya simbolis, tetapi nyata sebagai pengatur ruang dagang sekaligus penjaga keseimbangan antara kepentingan lokal dan kolonial.

### **C. Pola Perdagangan Cirebon**

#### **1. Jaringan Perdagangan Lokal dan Regional**

Cirebon sejak awal telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan lokal dan regional di pesisir utara Jawa. Bandar Cirebon tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Jawa seperti Demak, Jepara, Tuban, dan Banten, sehingga membentuk suatu sistem perdagangan regional yang dinamis.<sup>132</sup> Dalam konteks ini, Cirebon berfungsi sebagai simpul penting yang menghubungkan hasil bumi lokal dengan jalur distribusi regional sebelum akhirnya masuk dalam arus perdagangan global.

Catatan Portugis dari Tome Pires pada awal abad ke-16 juga memperkuat gambaran tersebut. Ia menyebut Cirebon, yang ditulisnya sebagai Corobam, sebagai pelabuhan yang indah dengan empat hingga lima

---

<sup>131</sup> Leirissa, "Cirebon Dalam Arsip VOC."

<sup>132</sup> Uka Tjandarasasmita, "Bandar Cirebon Dalam Jaringan Pasar Dunia."

kapal yang selalu berlabuh. Hasil utama dari daerah ini adalah beras, yang kemudian menjadi komoditas penting dalam perdagangan antarwilayah.<sup>133</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sejak dini Cirebon terintegrasi ke dalam jaringan distribusi pangan regional, yang menopang kebutuhan kota-kota pelabuhan lain di sepanjang pantai utara Jawa.

Singgih Tri Sulistiyono menambahkan bahwa pertumbuhan Cirebon dari Lemahwungkuk hingga awal abad ke-20 tidak dapat dipisahkan dari arus perdagangan regional. Cirebon memainkan peran sebagai kota pelabuhan yang menghubungkan pedalaman Jawa Barat dengan bandar-bandar pesisir, sekaligus menjadi titik transit barang-barang dagang antar daerah.<sup>134</sup> Dengan demikian, identitas dagang Cirebon tidak hanya terkait dengan hubungan internasional, tetapi juga tertanam kuat dalam jejaring perdagangan lokal dan regional yang menopang eksistensinya.

Posisi Cirebon dalam jaringan perdagangan lokal dan regional semakin jelas ketika dilihat dari interaksinya dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Cirebon sejak awal menjalin hubungan dagang dengan bandar-bandar seberang seperti Pasai dan Campa, selain dengan kota-kota pesisir di Jawa. Interaksi ini menempatkan Cirebon sebagai salah satu mata rantai penting dalam jalur perdagangan regional Asia Tenggara.<sup>135</sup> Hubungan dagang tersebut sekaligus memperkaya kebudayaan lokal, karena melalui

---

<sup>133</sup> Irma M. Johan, "Penelitian Sejarah Kebudayaan Cirebon Dan Sekitarnya Antara Abad XV--XIX : Tinjauan Bibliografi,."

<sup>134</sup> Yono, "Dari Lemahwungkuk Hingga Cheribon : Pasang-Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awai Abad XX."

<sup>135</sup> A. B. Lopian and Edi Sedyawati, "Kajian Cirebon Dan Kajian Jalur Sutra."

jalur perdagangan inilah terjadi pertemuan tradisi Arab, India, Cina, dan Eropa.

Selain itu, jaringan perdagangan lokal Cirebon juga terikat erat dengan politik regional. Menurut catatan sejarah, Sunan Gunung Jati tidak hanya berperan sebagai tokoh Islamisasi, tetapi juga sebagai penghubung politik dan ekonomi antara Cirebon dengan Demak dan Banten. Peran ini menjadikan perdagangan sebagai instrumen penguatan kedudukan Cirebon di antara kerajaan-kerajaan pesisir.<sup>136</sup> Dengan demikian, kegiatan perdagangan lokal tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan di Jawa pada masa itu.

Dalam perkembangan selanjutnya, hubungan regional ini menjadi landasan penting bagi keterlibatan Cirebon dalam arus perdagangan global. Uka Tjandarasasmita menekankan bahwa perdagangan lokal dan regional yang telah mapan memungkinkan Cirebon menjadi bagian dari jaringan pasar dunia.<sup>137</sup> Oleh karena itu, keberadaan Cirebon sebagai bandar dagang harus dipahami sebagai hasil dari keterkaitannya dengan jaringan lokal dan regional, yang kemudian membuka jalan bagi masuknya pengaruh kolonial Belanda di kemudian hari.

---

<sup>136</sup> Irma M. Johan, "Penelitian Sejarah Kebudayaan Cirebon Dan Sekitarnya Antara Abab XV--XIX : Tinjauan Bibliografi,."

<sup>137</sup> Uka Tjandarasasmita, "Bandar Cirebon Dalam Jaringan Pasar Dunia."

## 2. Perdagangan Etnis di Cirebon

Kehidupan ekonomi di Cirebon pada masa kolonial memperlihatkan pola interaksi multietnis yang kompleks. Berbagai kelompok etnis terlibat dalam sistem perdagangan, baik di tingkat pasar tradisional maupun jaringan distribusi antarwilayah. Pedagang Cina menjadi kelompok dominan dalam kegiatan niaga di pasar-pasar kota. Mereka menguasai jalur permodalan dan distribusi, serta mendirikan ruko di sekitar pusat perdagangan seperti Pasar Kanoman dan Kasepuhan. Pemerintah kolonial memberi mereka ruang untuk beroperasi melalui sistem pajak pasar tahunan, yang justru mendorong pertumbuhan ekonomi karena tidak memberatkan pedagang kecil.<sup>138</sup>

Sementara itu, pedagang pribumi berperan penting dalam menjembatani produksi dari pedalaman dengan kebutuhan pasar kota. Mereka memanfaatkan jaringan sosial dan lokalitas sebagai kekuatan ekonomi. Sistem *Centhaka babakul*<sup>139</sup> menjadi salah satu bentuk partisipasi ekonomi pribumi, di mana pedagang menyewa lapak kecil untuk menjual hasil bumi atau kebutuhan harian masyarakat.<sup>140</sup> Hubungan antara pedagang Cina dan pribumi tidak sepenuhnya bersaing; keduanya saling melengkapi. Pedagang Cina memiliki modal dan akses impor, sedangkan pribumi

---

<sup>138</sup> Wahid, *Bertahan Di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa Dan Ekonomi Kota Cirebon Pada Masa DepresiC Ekonomi, 1930-1940*. Hlm.71

<sup>139</sup> Pribumi yang berdagang di pasar dan pada waktu itu bentuknya ruko/warung yang menjual kebutuhan pokok

<sup>140</sup> Aldilah, "Sejarah Dan Perkembangan Pasar Pada Masa Gemeente Cirebon Tahun 1906-1942." hlm. 46-47



menjadi perantara dengan masyarakat lokal yang lebih memahami pola konsumsi daerah.

Dalam konteks kolonial, VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan hubungan antar-etnis ini untuk memperkuat kontrol ekonomi. Penguasaan jalur perdagangan oleh VOC menjadikan pelabuhan dan pasar Cirebon sebagai instrumen kontrol terhadap sirkulasi barang dan pajak.<sup>141</sup> Namun di sisi lain, interaksi antaretnis di Cirebon menciptakan ruang ekonomi yang relatif stabil. Pemerintah kolonial menggunakan peran pedagang Cina sebagai “perantara ekonomi” yang dianggap mampu menjaga kelancaran distribusi barang di tingkat lokal tanpa menimbulkan ketegangan sosial yang besar.

Kehidupan perdagangan etnis ini juga memberi warna tersendiri dalam struktur sosial kota Cirebon. Kawasan-kawasan permukiman mulai terbentuk berdasarkan profesi dan etnis, misalnya pemukiman saudagar Cina di sekitar pasar, serta kelompok pribumi yang banyak tinggal di wilayah pedesaan penghasil komoditas. A.B. Lopian menilai bahwa keberagaman etnis di Cirebon merupakan cerminan fungsinya sebagai bandar kosmopolitan yang terbuka terhadap pengaruh luar dan menjadikan perdagangan sebagai perekat antarbudaya.<sup>142</sup> Interaksi yang lahir dari aktivitas dagang ini tidak hanya menciptakan pertukaran barang, tetapi juga

---

<sup>141</sup> Leirissa, “Cirebon Dalam Arsip VOC.”

<sup>142</sup> A. B. Lopian and Edi Sedyawati, “Kajian Cirebon Dan Kajian Jalur Sutra.”

memperkaya kebudayaan lokal melalui asimilasi kebiasaan, bahasa, dan sistem ekonomi.

Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, semakin berkembangnya jumlah pasar dan meningkatnya aktivitas ekspor komoditas lokal menandakan bahwa perdagangan etnis telah menjadi tulang punggung ekonomi Cirebon. Hubungan yang awalnya bersifat pragmatis—antara pedagang Cina, pribumi, dan Arab—berubah menjadi sistem ekonomi yang saling bergantung. Meskipun struktur ekonomi kolonial membatasi ruang gerak politik, dinamika multietnis di bidang perdagangan membentuk karakter khas Cirebon sebagai kota dagang terbuka dan inklusif, di mana perbedaan etnis justru menjadi sumber kekuatan ekonomi..

### **3. Pasar Tradisional Sebagai Pusat Perdagangan & Pola Perdagangan di Bawah Kolonial**

Pasar tradisional di Cirebon memiliki akar yang erat dengan perkembangan kota pelabuhan sejak abad ke-15. Kedudukan Cirebon sebagai bandar dagang telah menjadikannya simpul penting dalam arus distribusi barang, baik dari pedalaman menuju pelabuhan maupun antarwilayah pesisir Jawa. Cirebon sejak awal merupakan bagian dari jaringan pasar dunia, dan posisinya tidak dapat dilepaskan dari keterlibatannya dalam perdagangan lokal serta regional.<sup>143</sup> Catatan Tome Pires pada awal abad ke-16 bahkan menyebut Cirebon sebagai pelabuhan

---

<sup>143</sup> Uka Tjandarasasmita, “Bandar Cirebon Dalam Jaringan Pasar Dunia.”

ramai dengan hasil utama berupa beras, yang kemudian menjadi komoditas pokok dalam perdagangan regional.<sup>144</sup>

Sejalan dengan itu, pasar-pasar tradisional di Cirebon berfungsi sebagai tempat distribusi hasil pertanian, hasil laut, serta komoditas harian lainnya. Pertumbuhan Cirebon dari Lemahwungkuk hingga abad ke-20 tidak dapat dipisahkan dari arus perdagangan regional yang menjadikan pasar sebagai pusat interaksi ekonomi masyarakat.<sup>145</sup> Dalam konteks ini, pasar tidak hanya menjadi tempat jual beli barang, tetapi juga ruang sosial di mana pedagang pribumi, saudagar asing, dan konsumen bertemu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus memperluas jejaring dagang.

Dengan demikian, sejak awal terbentuknya, pasar tradisional di Cirebon merupakan bagian integral dari identitas kota dagang. Keberadaannya menopang aktivitas perdagangan lokal, memperkuat hubungan regional, serta menjadi titik awal masuknya pengaruh budaya luar melalui jalur niaga yang berpusat di pelabuhan dan pasar.

Memasuki masa kolonial, pasar tradisional di Cirebon mengalami perkembangan signifikan. Pada masa VOC hingga kolonial Belanda, pasar tidak lagi hanya berupa lapangan terbuka, melainkan juga bangunan semi permanen sebagaimana dicatat oleh Raffles pada awal abad ke-19, yang menggambarkan pasar di Jawa berada di bawah pohon besar atau bangsal

---

<sup>144</sup> Irma M. Johan, "Penelitian Sejarah Kebudayaan Cirebon Dan Sekitarnya Antara Abab XV--XIX : Tinjauan Bibliografi,."

<sup>145</sup> Yono, "Dari Lemahwungkuk Hingga Cheribon : Pasang-Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awai Abad XX."

beratapkan ilalang.<sup>146</sup> Transformasi lebih lanjut terjadi pada masa Daendels ketika dibangun jalan raya Anyer–Pasarukin (Grote Postweg) tahun 1808–1811. Jalur ini memperlancar distribusi hasil bumi dari pedalaman menuju kota, sekaligus mendorong munculnya pasar-pasar baru di kabupaten dan distrik sekitar Cirebon.

Komoditas pertanian seperti beras, kopi, tebu, kentang, bawang, hingga gula aren menjadi barang dagangan utama, baik untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. Pada awal abad ke-19 tercatat ada 32 pasar di Cirebon dan Indramayu, sementara pada tahun 1897–1899 jumlahnya meningkat menjadi 88 pasar. Peningkatan ini menunjukkan peran pasar sebagai tulang punggung perdagangan rakyat.<sup>147</sup>

Selain itu, pedagang Cina berperan besar dalam menghidupkan pasar dengan membuka ruko-ruko, sementara pedagang pribumi juga aktif dalam bentuk warung kecil.<sup>148</sup> Pemerintah kolonial memberlakukan pajak pasar tahunan, namun jumlahnya tidak memberatkan pedagang, sehingga pasar tetap ramai. Situasi ini memperlihatkan bahwa pasar tradisional Cirebon menjadi pusat vital ekonomi rakyat sekaligus instrumen kebijakan kolonial untuk mengontrol perdagangan.<sup>149</sup>

Perubahan signifikan yang dilakukan kolonial Hindia Belanda salah satunya terjadi di Pasar Kanoman. Pada masa VOC, mekanisme dagang

---

<sup>146</sup> Aldilah, “Sejarah Dan Perkembangan Pasar Pada Masa Gemeente Cirebon Tahun 1906-1942.” Hlm. 27, 45

<sup>147</sup> Aldilah. Hlm. 47

<sup>148</sup> Aldilah. hlm.47

<sup>149</sup> Leirissa, “Cirebon Dalam Arsip VOC.”

masih relatif longgar, dengan ruang yang cukup besar bagi pedagang lokal dan jaringan antar-etnis. Namun, ketika Cirebon masuk ke dalam administrasi Hindia Belanda pada awal abad ke-19, kebijakan ekonomi kolonial mulai menata ulang struktur perdagangan. Sistem pajak, regulasi harga, dan kontrol terhadap komoditas strategis membuat pasar tradisional kehilangan sebagian otonominya.<sup>150</sup>

Pasar Kanoman sebagai salah satu pasar utama di kota Cirebon juga mengalami dampak langsung. Kolonial Belanda menjadikannya salah satu titik kontrol distribusi barang. Melalui kebijakan ini, Pasar Kanoman berfungsi ganda: tetap menjadi pusat transaksi lokal masyarakat, sekaligus bagian dari rantai distribusi yang menguntungkan pemerintah kolonial.

Selain itu, transformasi pola perdagangan juga tampak dari meningkatnya intervensi dalam tata kelola pasar. Pemerintah kolonial, bekerja sama dengan elit keraton, mengatur pungutan pajak pasar yang seringkali lebih menguntungkan pihak kolonial dibanding pedagang kecil.<sup>151</sup> Kondisi ini memunculkan lapisan sosial baru dalam perdagangan: pedagang besar dan elit birokrasi diuntungkan, sementara pedagang kecil tetap berada dalam posisi subordinat.

Dengan demikian, Pasar Kanoman dapat dipandang sebagai miniatur perubahan pola perdagangan di Cirebon di bawah kolonialisme. Ia

---

<sup>150</sup> Dimas Aldi Pangestu and Zulkarnain Zulkarnain, "Modernisasi: Sukabumi Dalam Arus Perubahan Sosial Ekonomi Era Kolonial Belanda," *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 16, no. 2 (2020).

<sup>151</sup> Wahid, *Bertahan Di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa Dan Ekonomi Kota Cirebon Pada Masa Depresi Ekonomi, 1930-1940*. Hlm.71

merefleksikan bagaimana pasar tradisional tidak hanya sekadar ruang ekonomi, tetapi juga arena politik-ekonomi yang sarat dengan intervensi kekuasaan.



## **BAB IV**

### **PASAR KANOMAN 1924-1942**

#### **A. Pasar Kanoman Pra – 1924**

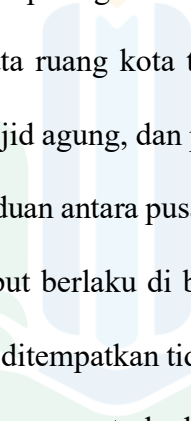
##### **1. Awal Berdirinya Pasar & Hubungan dengan Keraton**

Pasar Kanoman merupakan kelanjutan dari Pasar Talang. Awalnya aktivitas perdagangan berpusat di Pasar Talang, namun kemudian dipindahkan ke kawasan Kanoman tanpa serta-merta menghapus keberadaan Pasar Talang itu sendiri. Pada masa awal, wujud Pasar Kanoman masih bersifat semi permanen, menyerupai pasar tumpah atau pasar malam yang sifatnya temporer. Begitu aktivitas pasar usai, lokasi tersebut kembali seperti semula, seolah-olah bukan area perdagangan.<sup>152</sup> Dalam arsip surat kabar kolonial Belanda, penyebutan paling awal mengenai Pasar Kanoman tercatat pada tahun 1859. Dalam pemberitaan tersebut dilaporkan bahwa Pasar Kanoman mengalami kerusakan akibat terjangan angin puting beliung.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> Aldilah, “Sejarah Dan Perkembangan Pasar Pada Masa Gemeente Cirebon Tahun 1906-1942.” Hal 51-52

<sup>153</sup> Delpher di akses 10 September 2025  
<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=passar+kanoman&coll=ddd&sortfield=date&identifier=ddd:010483048:mpeg21:a0018&resultsidentifier=ddd:010483048:mpeg21:a0018&rowid=1>



integral dari struktur kekuasaan Keraton Kanoman.

# LEMBER

---



memberi nama pada pelabuhan Talang di kawasan pesisir. Selain itu, lada dari daerah *hinterland* menjadi komoditas ekspor penting yang memperkuat peran Cirebon dalam jaringan perdagangan internasional sejak masa klasik. Dengan kata lain, Pasar Kanoman berfungsi sebagai simpul pertukaran antara hasil bumi pedalaman dan produk pesisir.<sup>155</sup>

Selain peran ekonominya, pasar juga merupakan arena sosial<sup>156</sup> hal ini bisa lihat Cirebon terkhusus yang menunjukkan bahwa pasar berfungsi sebagai ruang interaksi antar-etnis, khususnya antara pedagang pribumi, Tionghoa, dan Arab. Dinamika ini memperlihatkan sifat kosmopolitan masyarakat pesisir Cirebon yang sejak awal terbuka terhadap berbagai kelompok pedagang. Pasar Kanoman menjadi titik temu yang menghubungkan berbagai jaringan sosial sekaligus memperkuat legitimasi Keraton Kanoman sebagai penguasa yang mengatur ruang kota dan ekonomi lokal.

Keraton Kanoman juga memperoleh manfaat ekonomi langsung dari aktivitas pasar. Sumber pendapatan keraton berasal dari sewa kios, pungutan pasar, hingga pengawasan terhadap distribusi barang tertentu. Hal ini sejalan dengan praktik umum di kota-kota Jawa pesisir, di mana keraton memanfaatkan pasar sebagai salah satu basis pendanaan dan sarana distribusi kekuasaan. Menurut C. Hoadley, Tan Boko orang tionghoa yang mempunyai tugas khusus dari sultan Anom I pada awal tahun 1960-an

---

<sup>155</sup> *GEDENKBOEK DER GEMEENTE CHERIBON 1906—1931* (Cheribon: STADSBESTUUR VAN CHERIBON, n.d.). Hal.130

<sup>156</sup> Adi Prasetyo, "Peran Pasar Bagi Perubahan Sosial Orang Rimba. I in," in *Seminar Globalisasi & Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru*, 2001.

yakni sebagai penyewa pasar dan pengumpul pajak kesultanan kanoman. Dengan demikian, sejak awal keberadaannya Pasar Kanoman bukan hanya ruang ekonomi rakyat, tetapi juga instrumen politik dan ekonomi yang memperkuat hubungan antara keraton dan masyarakat Cirebon.<sup>157</sup>

Sejarawan Cirebon, Mukhtar Zaedin, menegaskan bahwa pasar ini memang berkembang dari Pasar Talang. Pada mulanya, area pasar berada di Jalan Lemahwungkuk. Diduga kala itu Pasar Talang dan Pasar Kanoman hanya dipisahkan oleh Kali Bacin, hingga kemudian, melalui renovasi oleh Belanda, posisi Pasar Kanoman bergeser ke depan Keraton Kanoman.<sup>158</sup>

Seiring berjalannya waktu, keberadaan Keraton Kanoman semakin tergerus, kehilangan perannya sebagai pusat kekuasaan. Alasan pemerintah kolonial menempatkan pasar di depan keraton bisa dimaknai sebagai upaya melemahkan pengaruh Kanoman dengan menutupi keberadaannya di balik hiruk pikuk pasar.

## **2. Gemeente Cherbon 1906 & Dampaknya Pada Tata Kelola Pasar**

Pembentukan gemeente (kotapraja) Cheribon pada 1 April 1906 merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah tata kelola kota, termasuk pengaturan pasar. Status gemeente ini didasarkan pada *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 122 Tahun 1906<sup>159</sup> yang memberikan otonomi administratif kepada pemerintah kota. Dengan berlakunya regulasi tersebut,

---

<sup>157</sup> Wahid, *Bertahan Di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa Dan Ekonomi Kota Cirebon Pada Masa Depresi Ekonomi, 1930-1940*. Hal.71

<sup>158</sup> Aldilah, "Sejarah Dan Perkembangan Pasar Pada Masa Gemeente Cirebon Tahun 1906-1942."hal.53

<sup>159</sup> "Statsblad. No. 122 Tahun 1906."

sejumlah urusan yang sebelumnya berada di bawah kendali langsung kesultanan, termasuk pengelolaan fasilitas publik seperti pasar, mulai dipindahkan ke dalam kerangka administrasi kolonial.<sup>160</sup>

Pada masa pemerintahan Gemeente Cheribon, khususnya setelah diberlakukannya otonomi kota pada tahun 1906, perhatian terhadap sektor ekonomi rakyat mulai diarahkan pada penataan pasar-pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Dari sekian banyak pasar yang dikelola, Pasar Kanoman menempati posisi penting karena berada di wilayah yang dekat dengan kompleks Keraton Kanoman. Sejak masa awal pembentukannya, pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai simbol hubungan ekonomi antara pihak keraton dan masyarakat. Namun, pada tahap awal setelah 1906 hingga sekitar tahun 1915, perhatian terhadap penataan Pasar Kanoman masih minim. Kondisi pasar yang kurang teratur dan infrastruktur yang belum memadai membuat kegiatan perdagangan berjalan tidak efisien. Situasi ini berdampak pada menurunnya pendapatan pajak pasar bagi pemerintah Gemeente.<sup>161</sup>

Salah satu dampak nyata dari kebijakan ini ialah pengaturan ulang tata kelola pasar. setelah gemeente terbentuk, kontrol pasar perlahan bergeser ke tangan pemerintah gemeente. Dengan demikian, pembentukan gemeente Cheribon 1906 menandai pergeseran besar dalam tata kelola Pasar Kanoman. Dari pasar yang semula dikelola langsung oleh keraton dengan

---

<sup>160</sup> *GEDENKBOEK DER GEMEENTE CHERIBON 1906—1931*. Hal.18-21

<sup>161</sup> Aldilah, “Sejarah Dan Perkembangan Pasar Pada Masa Gemeente Cirebon Tahun 1906-1942.” Hal

logika tradisional, ia berubah menjadi bagian dari sistem administrasi kolonial modern, lengkap dengan pajak, regulasi, dan kontrol yang lebih ketat. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada struktur ekonomi, tetapi juga pada posisi sosial-politik Keraton Kanoman di tengah modernisasi kolonial awal abad ke-20.

### 3. Regulasi Pasar Ordonansi 1914

Tahun 1914 menjadi tonggak penting dalam sejarah tata kelola pasar di Hindia Belanda, termasuk di Cirebon. Melalui Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 379 dan No. 380 Tahun 1914, pemerintah kolonial memberlakukan ordonansi baru mengenai marktwezen (pengaturan pasar). Regulasi ini lahir dalam konteks kebijakan decentralisatie (desentralisasi) yang mulai dijalankan sejak 1903 dan memberi ruang bagi pemerintah lokal (locale raden) untuk mengatur sebagian urusan publik. Pasar menjadi salah satu sektor strategis yang masuk dalam kebijakan ini.<sup>162</sup>

Isi pokok dari ordonansi 1914 mencakup: (1) penghapusan ketentuan lama tentang pasar yang berlaku sejak pertengahan abad ke-19, (2) penyerahan wewenang pengaturan pasar kepada dewan lokal, dan (3) penetapan mekanisme pungutan resmi yang harus disetor ke kas kotapraja. Artinya, tata kelola pasar tidak lagi bersandar pada aturan *ad hoc* atau dominasi keraton, melainkan diintegrasikan ke dalam struktur pemerintahan modern dengan legitimasi hukum kolonial.<sup>163</sup>

---

<sup>162</sup> “Statsblad. No. 380 Tahun 1914”; “Statsblad. No.379 Tahun 1914,” n.d.

<sup>163</sup> “Statsblad. No. 380 Tahun 1914.”

Dampaknya bagi Pasar Kanoman cukup signifikan. Pertama, ordonansi ini memungkinkan Gemeente Cheribon untuk menata ulang peraturan retribusi, termasuk penentuan lokasi kios, kebersihan, serta penegakan aturan dagang. sesudah 1914 pemerintah kotapraja mulai mengatur standar kebersihan, Hal ini merupakan cikal bakal konsep *hygienische markt* yang digencarkan oleh pemerintah kolonial.

Kedua, ordonansi ini memperluas peran pasar sebagai sumber keuangan kota. Ketiga, secara sosial, aturan baru menciptakan relasi kuasa yang lebih kompleks antara keraton, pemerintah kota, dan pedagang. Keraton kehilangan kendali langsung atas Pasar Kanoman, meski masih memiliki simbolik keterikatan karena pasar berdiri di atas tanah keraton. Sementara itu, pemerintah kota memegang otoritas administratif, sedangkan pedagang harus menyesuaikan diri dengan standar kolonial yang kerap dirasakan lebih menekan, terutama terkait pajak dan kebersihan.

Selain itu, ordonansi 1914 juga membuka ruang bagi kelompok pedagang non-pribumi untuk lebih leluasa beroperasi. Komunitas Tionghoa, yang sejak awal abad ke-20 telah kuat dalam sektor distribusi, semakin menancapkan dominasinya di pasar-pasar kota. Dengan demikian, Regulasi Pasar Ordonansi 1914 bukan sekadar aturan administratif, melainkan titik balik dalam sejarah Pasar Kanoman. Ia menandai integrasi penuh pasar tradisional ke dalam sistem pemerintahan kolonial modern, menggeser otoritas keraton, memperkuat peran kotapraja, dan membentuk struktur ekonomi pasar yang bertahan hingga jauh ke masa berikutnya.

Selama 9 tahun gemente berdiri seperti yang sudah dijelaskan, fokus pemerintah pada pasar itu masih minim, memasuki akhir tahun 1915, pemerintah Gemeente mulai menaruh perhatian lebih besar terhadap pasar, termasuk Pasar Kanoman. Dengan dilantiknya seorang kontrolir pasar, pengawasan dan penataan kegiatan perdagangan mulai dilakukan secara sistematis. Perubahan ini membawa peningkatan pendapatan dari sektor pasar, termasuk dari Pasar Kanoman yang aktivitas perdagangannya tergolong ramai karena posisinya strategis di pusat kota dan dekat kawasan bangsawan. Meski demikian, masih banyak persoalan yang muncul, terutama dari keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di luar pagar pasar. Menurut catatan E.C. Godee Molsbergen, kondisi ini menimbulkan ketidakadilan bagi pedagang resmi di dalam pasar karena menurunkan omzet mereka. Pejabat kontrolir kemudian mengusulkan agar pemerintah Gemeente memperbaiki tata ruang pasar serta memperbarui peraturan yang mengatur aktivitas perdagangan, agar ketertiban dan keuntungan ekonomi dapat tercapai secara merata.

Puncak pembenahan Pasar Kanoman terjadi pada masa kepemimpinan Walikota J. H. Johan (1920–1925). Di bawah pemerintahannya, penataan dan perbaikan pasar dilakukan lebih serius, termasuk pembangunan kios permanen dan gudang penyimpanan barang. Dalam laporan Staatsblad No. 122 tahun 1906 disebutkan bahwa pemerintah kota memperoleh anggaran khusus dari pemerintah Hindia Belanda untuk mendukung pembangunan pasar dan ruko. Pendapatan dari

pajak sewa Pasar Kanoman terus meningkat, menunjukkan betapa pentingnya pasar ini bagi keuangan kota.

#### **4. Perubahan Tata Ruang: Penjualan Tanah Keraton & Pergusuran**

Perkembangan Pasar Kanoman pada awal abad ke-20 tidak bisa dilepaskan dari perubahan tata ruang kota Cirebon, terutama yang menyangkut relasi antara keraton dan pemerintah kolonial. Salah satu titik penting adalah penjualan sebagian tanah keraton kepada pemerintah kota pada sekitar tahun 1918. Arsip kolonial Belanda yang tercatat dalam Delpher menunjukkan bahwa tanah di sekitar kompleks Pasar Kanoman, yang semula berada dalam hak milik Keraton Kanoman, dilepaskan untuk mendukung perluasan kawasan kota dan pasar.<sup>164</sup>

Penjualan tanah tersebut bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, melainkan simbol pergeseran kekuasaan. Keraton, yang sejak masa pra-kolonial menjadi pusat otoritas politik sekaligus ekonomi, secara perlahan kehilangan kendali atas ruang strategisnya. Pemerintah kolonial melalui Gemeente Cheribon memperoleh akses penuh untuk menata ulang ruang kota dengan logika modern: zoning, infrastruktur, serta pemisahan fungsi kawasan. fenomena pelepasan tanah bangsawan lokal kepada pemerintah kolonial merupakan pola umum di berbagai kota Jawa pada masa itu, termasuk di Cirebon.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Delpher di akses 11 September 2025

<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=kanoman+1924&page=1&sortfield=date&coll=ddd&identifier=KBDDD02:000198420:mpeg21:a0026&resultsidentifier=KBDDD02:000198420:mpeg21:a0026&rowid=7>

<sup>165</sup> Ike Evi Nurtanti, "Pengaruh Landrente Terhadap Penguasaan Tanah Dan Penggunaan Tanah Di Kecamatan Manguharjo, Madiun (1860-1870)," 2014.

Sejalan dengan perubahan tata ruang kota Cirebon pasca-penjualan tanah Keraton Kanoman tahun 1918, pemerintah kolonial juga memperkuat kontrol ekonomi melalui regulasi. Terbitnya Staatsblad 1921 No. 267 menjadi salah satu instrumen penting, karena memberi wewenang kepada Direktur Keuangan untuk menetapkan harga pasar rata-rata di Hindia Belanda maupun harga pasar luar negeri sebagai dasar perhitungan bea ekspor, serta mengatur mekanisme dan kewajiban pengumumannya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penataan Pasar Kanoman tidak hanya berjalan dalam aspek fisik ruang kota, tetapi juga terhubung dengan kebijakan ekonomi kolonial yang lebih luas, di mana pasar lokal seperti Kanoman masuk ke dalam logika perdagangan global yang dikendalikan secara sah, teratur, dan seragam oleh pemerintah Hindia Belanda.<sup>166</sup>

Secara strategis, penjualan tanah keraton menjadi fondasi bagi proyek renovasi Pasar Kanoman tahun 1924–1925. Dengan lahan yang lebih luas dan tata ruang yang disesuaikan dengan standar kolonial, pasar diarahkan menjadi pusat perdagangan yang lebih teratur, higienis, dan produktif. Dampak jangka panjangnya adalah perubahan wajah Pasar Kanoman dari sekadar pasar tradisional di bawah naungan keraton menjadi pasar modern kota kolonial yang menjadi bagian integral dari perekonomian Gemeente Cheribon.

Dengan demikian, peristiwa 1918 dan 1921 dapat dilihat sebagai titik balik penting. Bukan hanya perubahan fisik tata ruang, tetapi juga

---

<sup>166</sup> “Staatsblad. No. 267 Tahun 1921.”



pergeseran struktur kuasa antara keraton, pemerintah kota, dan masyarakat. Pasar Kanoman menjadi cermin bagaimana kolonialisme bekerja melalui instrumen ruang: mengatur, menertibkan, sekaligus mengendalikan arus ekonomi lokal demi kepentingan negara kolonial.

## B. Renovasi & Modernisasi Pasar 1924-1926

### 1. Latar Belakang Renovasi Pasar

Memasuki awal abad ke-20, Cirebon mengalami perkembangan signifikan sebagai kota pelabuhan sekaligus pusat perdagangan regional. Pertumbuhan jumlah penduduk, terutama akibat urbanisasi dari daerah pedalaman Priangan dan migrasi etnis Tionghoa serta Arab, memberikan tekanan pada infrastruktur kota. Kota-kota Jawa semenjak abad 19 mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Administrasi kolonial, modernisasi, sarana prasarana yang diperbaiki, migrasi dan urbanisasi, serta fasilitas kesehatan yang diperhatikan adalah beberapa faktor yang mendukung perkembangan tersebut.<sup>167</sup> Pesatnya pertumbuhan penduduk bisa dilihat di tabel berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Perbandingan Sensus Penduduk Cirebon Antara Tahun 1890 Dan 1920**

No.	Etnis	1890	1920
1	Pribumi	15.561	25.339

<sup>167</sup> Wahid, *Bertahan Di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa Dan Ekonomi Kota Cirebon Pada Masa Depresi Ekonomi, 1930-1940*. Hal.45.

<b>2</b>	Tionghoa	2.537	5.451
<b>3</b>	Eropa	398	971
<b>4</b>	Orang Asia lainnya	846	1.290
Jumlah		19.342	33.051

Sumber : Buku Bertahan di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon 1930-1940 karya Abdul Wahid. Ekonomi Kota Cirebon 1930-1940 karya Abdul Wahid.

Dilaporkan juga pada abad ke 19 Kota Cirebon merupakan kota yang kotor dan jorok. Kondisi perumahan penduduk jauh dari kata standar sehat, saluran air yang tidak memadai sehingga banyak genangan air di sembarang tempat, mayat dan bangkai binatang dikubur disekitar perumahan sehingga menebarkan bau busuk dimana-mana. Bahkan Pasar tempat jual beli baik baju-baju maupun makanan menyatu dengan kondisi pasar yang kotor. Kondisi yang terjadi pada saat itu menciptakan wabah penyakit yang berulangkali dan memakan banyak korban, terutama penyakit malaria. Upaya pemerintah Gemeente dalam meningkatkan kesehatan masyarakatnya sudah berlangsung sejak masa-masa awal berdirinya. Salah satu masalah yang dihadapi kala itu adalah banyaknya sungai dan genangan air yang dianggap dapat mengancam kesehatan warga. Sejak tahun 1909, pemerintah mulai melakukan program penutupan dan

penataan aliran air tersebut, kemudian dilanjutkan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya.<sup>168</sup>



**Gambar 4. 2 Pasien anak-anak akibat penyakit malaria di Cirebon tahun 1920**  
**Sumber: ANRI**

Pemerintah kota mulai memberi perhatian serius pada pengelolaan pasar sejak tahun 1915. Sebelumnya, pasar kurang diperhatikan sehingga banyak pendapatan daerah hilang. Setelah diangkat seorang pengawas pasar pada akhir 1915, pemasukan memang meningkat, tetapi segera tampak bahwa kondisi pasar sangat membutuhkan perbaikan karena aturan yang ada tidak mencukupi dan tata kelola masih kacau. Penerimaan dari pasar juga terpengaruh oleh penggunaan lahan yang tidak teratur dan sering kali disalahgunakan oleh pedagang. Awalnya pemerintah hanya mengatur dua pasar, namun dengan bantuan pemerintah pusat akhirnya dilakukan renovasi besar. Pasar Balong yang sempat ditutup tahun 1917 dibongkar dan dibangun kembali pada 1918 menjadi lebih teratur dengan deretan gudang dan warung kecil yang disewakan. Pada tahun yang sama juga dimulai

---

<sup>168</sup> *GEDENKBOEK DER GEMEENTE CHERIBON 1906—1931*. Hal.94

pembangunan kembali Pasar Kedjaksan agar lebih rapi dan mampu mendatangkan pemasukan melalui penyewaan kios. Meskipun demikian, pengelolaan dan pemeliharaan Pasar Kedjaksan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kota.<sup>169</sup> Tentunya pasar Kanoman pun pada dekade 1920-an Sebelum renovasi, kondisi pasar digambarkan semrawut, becek, dan tidak higienis, sehingga tidak lagi sesuai dengan standar pasar modern kolonial.

Renovasi Pasar Kanoman pada akhirnya menjadi bagian dari program modernisasi perkotaan yang lebih luas. Dalam kerangka tersebut, pasar diposisikan sebagai wajah kemajuan kota, simbol keteraturan, dan instrumen fiskal bagi pemerintah kolonial. Oleh karena itu, renovasi besar yang dilakukan pada tahun 1924–1925 tidak dapat dilepaskan dari latar belakang ekonomi, sosial, dan politik yang melingkupinya.

Faktor kedua yaitu kepadatan. Dari tabel sensus penduduk kota Cirebon tahun 1890 dan 1920 menjelaskan pesatnya pertumbuhan penduduk sehingga tidak memungkinkan juga apabila pasar memiliki fasilitas yang tidak menunjang peran kota sebagai pasar perdagangan modern dan menyesuaikan pertumbuhan penduduk.

Renovasi Pasar Kanoman pada akhirnya menjadi bagian dari program modernisasi perkotaan yang lebih luas. Dalam kerangka tersebut, pasar diposisikan sebagai wajah kemajuan kota, simbol keteraturan, dan instrumen fiskal bagi pemerintah kolonial. Oleh karena itu, renovasi besar

---

<sup>169</sup> *GEDENKBOEK DER GEMEENTE CHERIBON 1906—1931*. Hal.108

yang dilakukan pada tahun 1924–1925 tidak dapat dilepaskan dari latar belakang ekonomi, sosial, dan politik yang melingkupinya.

Sebelum perenovasian besar besaran pasar kanoman, perancangan biaya sudah di ajukan mulai dari tahun 1920, tertulis dalam surat kabar berita perenovasian bangunan pasar kanoman mencatat biaya sebesar f 17.620 jumlah yang cukup signifikan untuk ukuran kota menengah pada masa itu. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan los-los baru, pelebaran gang, perbaikan saluran air, serta pemasangan lantai batu bata guna mengurangi genangan. Awal mulanya biaya tersebut juga akan dialokasikan untuk pembelian tanah serta rumah yang ada disekitar perencanaan perenovasian pasar kanoman. Namun pembelian tanah serta rumah disekitar Pasar kanoman tidak jadi dikarenakan biaya yang sangat tinggi. Biaya sebesar itu membuktikan bahwa pemerintah kolonial Belanda sangat fokus dan menginginkan pasar kanoman menjadi pasar yang megah karena strategis, bisa dibandingkan rancangan biaya pembangunan selain pasar kanoman hanya sebesar f 8.810 saja.<sup>170</sup>

Dengan kata lain, renovasi Pasar Kanoman tahun 1924–1925 bukan sekadar respons terhadap kebutuhan lokal, tetapi bagian dari tren modernisasi kota kolonial Hindia Belanda. Pasar dijadikan instrumen

---

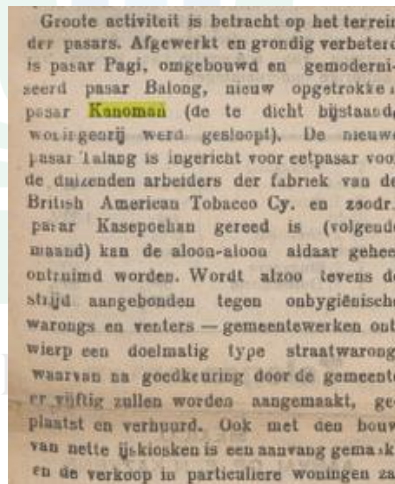
<sup>170</sup>Delpher di akses pada tanggal 15 September 2025

[https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?qql%5B%5D=%28date+\\_gte\\_+%2201-01-1919%22%29&qql%5B%5D=%28date+\\_lte\\_+%2201-01-1921%22%29&query=markt+kanoman&coll=ddd&redirect=true&sortfield=date&identifier=ddd:010179368:mpeg21:a0172&resultsidentifier=ddd:010179368:mpeg21:a0172&rowid=1](https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?qql%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1919%22%29&qql%5B%5D=%28date+_lte_+%2201-01-1921%22%29&query=markt+kanoman&coll=ddd&redirect=true&sortfield=date&identifier=ddd:010179368:mpeg21:a0172&resultsidentifier=ddd:010179368:mpeg21:a0172&rowid=1)

kontrol negara kolonial, baik dalam mengatur masyarakat maupun dalam memperkuat basis keuangan daerah.

## 2. Renovasi Besar 1924-1925

Renovasi besar Pasar Kanoman pada tahun 1924–1925 menjadi tonggak penting dalam sejarah pasar tradisional Cirebon. Proyek ini tercatat dalam *Gedenkboek der gemeente Cheribon 1906–1931*<sup>171</sup>. Masa pembangunan pasar sekitar 1 tahun lebih, di mulai dari tahun 1924 sampai 1925. Bukti selesai perenovasian pasar telah diberitakan disurat kabar yang terbit pada tahun 1925 memberitakan telah di bangun bangunan baru di pasar



Groote activiteit is betracht op het terrein der passers. Afgewerkt en grondig verbeterd is pasar Pagi, omgebouwd en gemoderniseerd pasar Balong, nieuw opgestrokt; pasar **Kanoman** (de te dicht bijstaande woninggeest werd gesloopt). De nieuwe pasar lalang is ingericht voor een pasar voor de duizenden arbeiders der fabriek van de British American Tobacco Cy. en zoodr. pasar Kasepoehan gereed is (volgende maand) kan de alou-alou aldaar geheel ontruimd worden. Wordt alzoo tevens de straat aangebonden tegen onhygiënische warongs en venters — gemeentewerken ontwierp een doelmatig type straatwarong, waarvan na goedkeuring door de gemeente er vijfzig zullen worden aangemaakt, geplaatst en verhuurd. Ook met den bouw van nette kioskjes is een aanvang gemaakt en de verkoop in particuliere woningen zal

<sup>171</sup> *GEDENKBOEK DER GEMEENTE CHERIBON 1906—1931*. Hal. 110

Bahkan Pada tahun 1925 pemerintah kota melakukan pembaruan terhadap Pasar Kanoman dengan membongkar deretan rumah yang berdiri terlalu dekat dengan area pasar. Tindakan ini bertujuan membuka ruang sirkulasi yang lebih luas serta menata ulang kawasan yang dianggap semrawut, sehingga pasar dapat berfungsi lebih teratur sesuai standar tata kota kolonial. Pembongkaran rumah-rumah di sekitar pasar sekaligus mencerminkan upaya pemerintah kolonial untuk menata ruang kota dengan mengorbankan kepentingan hunian masyarakat, demi menghadirkan citra keteraturan dan kebersihan di pusat perdagangan Cirebon.<sup>172</sup> Dalam surat kabar pun Pemerintah gemeente Cheribon selain membeli tanah dari keraton Kanoman, Kolonial Belanda mendapatkan hibah tanah yang diberi oleh saudagar kaya Tionghoa, ia bernama Kong Djoe Koan yang memberikan sebidang tanah seluas 200 m dan lebar 5 m,<sup>173</sup>

Untuk hitungan renovasi pasar. Pasar kanoman bisa dibilang merupakan pasar termegah di pemerintahan kota pada zamannya. Terdapat 2 bangunan besar didepan alun- alun kanoman dengan bergaya arsitektur kolonial. Dokumentasi foto menunjukkan bahwa fasad depan Pasar Kanoman telah dibuat permanen, dengan tulisan besar menandai identitas pasar tersebut

---

<sup>172</sup> Delpher di akses pada tanggal 12 September 2025  
<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=kanoman+cheribon&coll=ddd&sortfield=date&page=15&identifier=MMKB23:001691009:mpeg21:a00001&resultsidentifier=MMKB23:001691009:mpeg21:a00001&rowid=5>

<sup>173</sup> Delpher di akses pada tanggal 15 September 2025  
<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=markt+kanoman&coll=ddd&maxperpage=50&identifier=ddd:010179368:mpeg21:a0172&resultsidentifier=ddd:010179368:mpeg21:a0172&rowid=1>



Selain itu, renovasi 1924–1925 juga mengandung dimensi politis. Sebagai pasar yang berada dalam lingkup Keraton Kanoman, intervensi Gemeente melalui renovasi berarti semakin menegaskan posisi pemerintah kolonial sebagai pengendali utama ruang ekonomi kota. Dengan kata lain, renovasi ini tidak sekadar perbaikan fasilitas, melainkan simbol dominasi kolonial atas ruang tradisional keraton.

### 3. Status *Stadsgemeente* (1926) & Kebijakan

Pada tahun 1926, melalui Staatsblad No. 370, status Cirebon ditingkatkan menjadi sebuah *Stads Gemeente* (kotamadya otonom) yang memiliki pemerintahan sendiri. Perubahan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan desentralisasi yang telah dimulai sebelumnya, di mana urusan tertentu yang menyangkut kepentingan lokal diserahkan kepada dewan kota (*gemeenteraad*). Dengan status baru tersebut, Cirebon mendapatkan



otonomi lebih luas dalam bidang tata kota, infrastruktur, dan terutama dalam pengelolaan pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat.

Bagi Pasar Kanoman, dampak dari perubahan administratif ini cukup signifikan. Pertama, pasar tidak lagi semata-mata berada di bawah kendali keraton atau pengawasan residen, tetapi masuk dalam lingkup pengelolaan langsung pemerintah kota. Artinya, regulasi mengenai pajak, retribusi harian, kebersihan, hingga keamanan pasar ditentukan melalui kebijakan *gemeenteraad* Cirebon. Hal ini memperlihatkan pergeseran dari pola tradisional di mana pasar merupakan bagian integral dari struktur ekonomi keraton ke arah pengelolaan modern berbasis pemerintahan kolonial. Selain itu, perubahan status administratif ini juga membuka peluang bagi pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran renovasi, pembangunan fasilitas baru, dan sistem kontrol yang lebih terstruktur. Dengan kata lain, *Stads Gemeente* Cirebon bukan hanya sebuah perubahan hukum, tetapi juga simbol transisi menuju pengelolaan ekonomi perkotaan yang semakin modern dan birokratis.

Pasca-renovasi besar Pasar Kanoman pada 1924–1925, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan berbagai kebijakan baru yang tidak hanya menyentuh aspek fisik bangunan pasar, tetapi juga menyangkut sistem pengelolaan ekonomi dan sosial di dalamnya. Salah satu aspek paling menonjol adalah kebijakan pajak pasar yang diberlakukan secara lebih teratur.

Kebijakan lokal tentang pasar mulai diterapkan karena sejalan dengan semangat desentralisasi kolonial yang mulai digalakkan sejak Staatsblad 1914 No. 379–380, yang menyerahkan sebagian kewenangan pengaturan pasar kepada locale raden (dewan lokal). Dalam konteks Cirebon, sejak kota ini berstatus gemeente (1906), pendapatan dari sektor pasar menjadi salah satu sumber utama kas kota. Salah satunya perpajakan

Sistem pajak ini, meskipun menambah beban pedagang kecil, memberikan keuntungan bagi pemerintah kota karena mampu menciptakan pemasukan yang stabil. Dalam beberapa catatan, pedagang kecil merasa tidak mendapatkan haknya. Bahkan fasilitas yang seharusnya didapatkan sesuai pajak umum, kadang diberi tambahan pajak untuk hal hal lain. Seperti dalam surat kabar, sering terjadi penipuan uang palsu di malam hari dikarenakan akses pencahayaan yang kurang memadai sehingga pemerintah gemeente membangun fasilitas penerangan listrik. Awal mulanya fasilitas tersebut akan di gunakan secara gratis. Akan tetapi melihat dari segi finansial yang terlalu berat bagi gemeente sehingga menerapkan aturan bagi pedagang yang akan lanjut berdagang dari jam 18.30 WIB akan dikenai biaya atau pajak tambahan untuk penyewaan listrik 2 jam seharga 5 sen.<sup>174</sup>

Dalam konteks Pasar Kanoman, laporan Delpher tahun 1930 mencatat bahwa seorang pejabat kolonial bernama Tuan Haffenreuter mengusulkan pemasangan penutup khusus untuk los daging. Tujuannya

---

<sup>174</sup> Delpher di akses pada tanggal 16 September 2025  
<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=passar+kanoman&coll=ddd&identifier=MMKB23:001693082:mpeg21:a00099&resultsidentifier=MMKB23:001693082:mpeg21:a00099&rowid=2>

adalah agar dagangan lebih higienis, terlindungi dari debu, panas, serta potensi penyebaran penyakit akibat penanganan daging yang kurang bersih. Usulan ini akhirnya diterapkan sebagai bagian dari upaya modernisasi tata niaga pasar.

Kebijakan higienitas ini juga mencerminkan upaya pemerintah kota Cirebon untuk menampilkan diri sebagai kota modern dengan standar pasar yang sesuai dengan model Eropa. Tidak hanya pasar Kanoman, beberapa pasar lain di Cirebon dan kota-kota sekitarnya juga menerima regulasi serupa, walaupun penerapannya tidak selalu merata. Namun, karena Pasar Kanoman berstatus sebagai pasar utama di pusat kota dekat Keraton.<sup>175</sup> Tuan Haffenreuter dalam melaksanakan kebijakan telah ia usulkan di tahun 1929 ke pemerintah pusat Batavia. Ia tidak dapat terima kondisi pasar kanoman menurutnya tidak etis karena penjual daging dan ikan terbuka sepenuhnya tanpa ada alat pengusir lalat, sehingga barang jualan daging atau ikan tersebut secara harfiah telah diserbu jutaan lalat.<sup>176</sup> Hingga pemerintah memfasilitasi dengan membuat penutup kasa lalat yang dianggarkan sebesar f 710.<sup>177</sup>

---

<sup>175</sup> Delpher di akses pada tanggal 16 September 2025

<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=kanoman+cheribon&coll=ddd&sortfield=date&page=21&identifier=ddd:010228967:mpeg21:a0025&resultsidentifier=ddd:010228967:mpeg21:a0025&rowid=7>

<sup>176</sup> Delpher di akses pada tanggal 16 September 2025

<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=pasar+kanoman&page=2&maxperpage=50&sortfield=date&coll=ddd&identifier=MMKB23:001722005:mpeg21:a00027&resultsidentifier=MMKB23:001722005:mpeg21:a00027&rowid=35>

<sup>177</sup> Delpher di akses pada tanggal 16 September 2025

<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=pasar+kanoman+cheribon&page=3&coll=ddd&identifier=ddd:011072300:mpeg21:a0194&resultsidentifier=ddd:011072300:mpeg21:a0194&rowid=1>

Dengan demikian, transformasi Pasar Kanoman pasca tahun 1924 tidak bisa dilepaskan dari konteks kebijakan kolonial yang lebih luas. Renovasi fisik, regulasi pajak, hingga status Stads Gemeente membentuk satu kesatuan proses modernisasi yang mengubah wajah pasar, sekaligus mempertegas peran Cirebon sebagai simpul ekonomi regional di pesisir utara Jawa. Juga pemerintah kolonial memperluas dan membangun Pasar Kanoman secara permanen, tujuannya bukan semata aspek ekonomi, melainkan juga untuk memutus hubungan langsung antara Kesultanan Kanoman dan masyarakat, sekaligus mengikis peran simbolis kesultanan di mata publik.<sup>178</sup>

Seiring berjalannya waktu, keberadaan Keraton Kanoman semakin tergerus, kehilangan perannya sebagai pusat kekuasaan. Alasan pemerintah kolonial menempatkan pasar di depan keraton bisa dimaknai sebagai upaya melemahkan pengaruh Kanoman dengan menutupi keberadaannya di balik hiruk pikuk pasar. Namun, di sisi lain, langkah ini juga bisa ditafsirkan sebagai strategi proteksi membentengi keraton dengan bangunan pasar agar lebih sulit diserang oleh pihak musuh.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> Aldilah, "Sejarah Dan Perkembangan Pasar Pada Masa Gemeente Cirebon Tahun 1906-1942."

<sup>179</sup> Aldilah.

### C. Pasar Kanoman 1930 – 1942

#### 1. Pasar Kanoman di Tengah Krisis Ekonomi 1930-an

Memasuki dekade 1930-an, Pasar Kanoman sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di Cirebon tidak luput dari dampak Depresi Besar (Great Depression) 1929–1933 yang berimbas ke seluruh dunia, termasuk Hindia Belanda. Penurunan harga komoditas ekspor utama seperti gula, kopi, dan tembakau turut mengguncang struktur ekonomi kota pelabuhan, dan secara langsung memengaruhi sirkulasi perdagangan di pasar-pasar tradisional. Pasar Kanoman, sebagai salah satu pasar terbesar di Cirebon, mengalami penurunan daya beli masyarakat akibat turunnya harga hasil pertanian dan meningkatnya angka pengangguran. Hal ini sesuai dengan catatan dalam Abdul Wahid, *Bertahan di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa dan Ekonomi di Kota Cirebon*, yang menekankan bahwa krisis global membawa pukulan berat pada jaringan perdagangan lokal, tetapi sekaligus mendorong adaptasi komunitas pedagang, terutama Tionghoa, untuk mencari strategi bertahan di tengah keterbatasan.<sup>180</sup>

Kondisi tersebut diperburuk dengan kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berupaya menekan defisit anggaran melalui pengetatan pajak dan pungutan, termasuk di sektor pasar. salah satu cara pemerintah menjaga pemasukan daerah adalah dengan mengandalkan pajak pasar dan perdagangan harian. Hal ini membuat beban pedagang di Pasar

---

<sup>180</sup> Wahid, *Bertahan Di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa Dan Ekonomi Kota Cirebon Pada Masa Depresi Ekonomi, 1930-1940*.

Kanoman semakin berat, karena selain menghadapi penurunan omset akibat krisis, mereka juga tetap diwajibkan membayar pajak yang tinggi. Bisa dihitung pemasukan pajak terbesar pemerintah pada tahun 1931 salah satunya dari pajak pasar, 3 pasar yang dikelola oleh pemerintah yaitu pasar Kanoman, Pasar Balong dan Pasar Lawangganda ditotal dari ketiga pasar tersebut berjumlah *f* 55.000. Hal ini bisa dibandingkan dengan pajak pasar pemerintah kabupaten yang lebih besar ambil contoh 3 pasar kabupaten yaitu pasar di plered, pasar di djamblang dan pasar di palimanan total pajak yang didapat sekitar *f* 18.500.<sup>181</sup>

Meskipun di masa krisis, tuan Huffenreuter mampu merealisasikan fasilitas fasilitas yang harus dilengkapi yaitu penutup kasa lalat untuk pedagang daging dan ikan. Bahkan interior dalam pasar bisa di bandingkan dengan pasar lain, pasar kanoman mempunyai interior yang lebih bersih.



**Gambar 4. 5 Interior dalam pasar Kanoman 1931**

Sumber: Collectie.Wereldmuseum.ni

<https://hdl.handle.net/20.500.11840/419003>

<sup>181</sup> Delpher di akses pada tanggal 17 September 2025

<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=pasar+kanoman+cheribon&page=4&coll=ddd&identifier=ddd:010229218:mpeg21:a0122&resultsidentifier=ddd:010229218:mpeg21:a0122&rowid=5>

Dalam catatan *Cheribon Revue* pada tahun-tahun awal depresi, Para pedagang Tionghoa di kawasan kota dan pinggiran kota Cirebon, Kuningan, dan Indramayu, contohnya Pasar Kanoman, turut dilaporkan menghadapi kendala dalam berusaha. Anjloknya nilai tukar yang berujung pada melambungnya harga komoditas serta diiringi oleh melemahnya daya beli komunitas telah menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha tersebut. Guna menjaga pencapaian laba, tiada alternatif lain bagi mereka kecuali meningkatkan tarif atas produk yang mereka jual. Akan tetapi, tidak gesitnya tindakan dari pemerintah beserta ketidaktentuan regulasi harga, memunculkan fenomena disparitas harga di antara para pedagang.<sup>182</sup>

## **2. Dinamika Etnis dalam Pasar Kanoman**

Pasar Kanoman pada dekade 1930-an hingga awal 1940-an merupakan miniatur masyarakat Cirebon yang multietnis, di mana pedagang dan pembeli dari berbagai latar belakang bertemu dalam satu ruang ekonomi. Sejak masa kolonial, komunitas Tionghoa memegang peranan dominan dalam jaringan distribusi barang. Abdul Wahid menegaskan bahwa mereka menguasai perdagangan grosir dan menjadi pemasok utama barang impor, sekaligus memberi kredit kepada pedagang kecil. Hal ini memperlihatkan struktur ekonomi yang hierarkis.

Pasca 1930 terdapat pertumbuhan penduduk yang pesat juga. Akan tetapi tahun ini penduduk beretnis Eropa lebih pesat di banding sebelumnya.

---

<sup>182</sup> Abdul Wahid, *Bertahan Di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa Dan Ekonomi Kota Cirebon 1930-1940*, ed. M. Nursam, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009). Hal.135

Hal ini dikarenakan akan seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya tentang butuhnya di bidang administrasi yang sejalan dengan peningkatan tingkatan status kota Cirebon yang dari Gemeente ke stadsgemeente. Bisa dilihat di tabel berikut.

**Tabel 4. 2**  
**Perbandingan Jumlah Etnis Di Cirebon Antara Tahun 1920-1930**

No.	Etnis	1920	1930
1	Pribumi	25.339	42.667
2	Tionghoa	5.451	8.191
3	Eropa	971	1.653
4	Orang Asia lainnya	1.290	1.568
Jumlah		33.051	59.079

Sumber: Buku Bertahan di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon 1930-1940 karya Abdul Wahid.

Dalam kurun waktu 10 tahun penduduk Eropa bertambah 682 orang di tahun 1930, berbeda pada tahun sebelumnya hanya bertambah 573 dalam kurun waktu 20 tahun. Namun tetap etnis terbanyak setelah pribumi adalah Tionghoa, Kampung China atau biasa disebut pecinan itu satu kawasan dengan pasar kanoman itu sendiri. Sama sama di desa lemahwungkuk. Kampung Kanoman pun telah menjadi tempat tinggal orang orang tionghoa bahkan sudah lama orang orang tionghoa tinggal di kampung tersebut. Hal



ini sesuai dengan surat kabar yang ditemukan bahwa orang tionghoa dari kampung Kanoman yang memiliki masalah tentang garam ilegal pada tahun 1859.<sup>183</sup>

Pasar Kanoman sebagai pasar strategis dekat dengan pelabuhan Cirebon, pelabuhan tempat titik kumpul multi-etnis, mulai dari Arab, India, Gujarat bahkan China. Hal ini bisa dibuktikan di sekitar pasar ini masih bisa ditemukan warung-warung tua, toko obat Cina, dan bangunan bergaya kolonial serta arsitektur khas Tionghoa. Kebijakan kolonial Belanda juga memberi warna tersendiri pada dinamika etnis ini. Melalui regulasi pasar dan pungutan pajak, pemerintah kolonial mempertegas stratifikasi sosial-ekonomi, di mana komunitas Eropa tetap berada di lapisan atas sebagai pengendali aturan. Dengan demikian, Pasar Kanoman tidak hanya berfungsi sebagai pusat pertukaran barang, melainkan juga sebagai cerminan struktur sosial kolonial, di mana identitas etnis berkelindan dengan peran ekonomi dan posisi politik.

### **3. Pasar Kanoman Menjelang Akhir Kolonialisme (1935–1942)**

Pada tahun 1935, terjadi peristiwa penting dalam hubungan antara Keraton Kanoman dan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Cirebon. Di bawah pimpinan pelaksana wali kota (plv. burgemeester) Rd. Enoch, dewan kota (gemeenteraad) Cirebon menggelar rapat tertutup untuk membahas keberatan resmi (bezwaarschrift) yang diajukan oleh Sultan Kanoman. Inti

---

<sup>183</sup> Delpher di akses pada tanggal 14 September 2025

<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=passar+kanoman&coll=ddd&sortfield=date&identifier=ddd:010483048:mpeg21:a0018&resultsidentifier=ddd:010483048:mpeg21:a0018&rowid=1>

keberatan tersebut ialah tudingan terhadap pemerintah kota yang dianggap melakukan *onwettige occupatie* atau pendudukan tidak sah atas sebidang tanah kesultanan yang kini telah menjadi lokasi Pasar Kanoman. Sengketa ini menandai bentuk perlawanan administratif Sultan terhadap kebijakan kolonial yang kerap mengabaikan hak-hak tradisional istana pribumi, terutama dalam urusan tanah yang bernilai ekonomi tinggi.

Dalam perdebatan dewan, muncul pandangan beragam dari kalangan pejabat Eropa dan perwakilan bumiputra mengenai posisi kesultanan dalam tata ruang kota modern Cirebon. Pemerintah kolonial berupaya menampilkan argumen bahwa pembangunan pasar dilakukan demi kepentingan umum dan perbaikan kawasan permukiman rakyat (*kampongverbetering*). Namun, dari sudut pandang kesultanan, tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap hak ulayat keraton. Sultan Kanoman menuntut pengakuan hukum dan kompensasi atas tanah yang telah diambil alih tanpa persetujuan. Persoalan ini kemudian memaksa dewan kota untuk meninjau kembali legalitas proyek pasar yang sejak awal memang berdiri di atas lahan milik kesultanan.<sup>184</sup>

Hasil dari pembahasan panjang dalam rapat dewan kota tahun 1935 tersebut akhirnya menghasilkan keputusan bahwa Sultan Kanoman berhak menerima kompensasi atas tanah yang digunakan untuk Pasar Kanoman. Dewan mengakui bahwa pendirian pasar di atas tanah kesultanan tidak

---

<sup>184</sup> Delpher di akses pada tanggal 19 September 2025

<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=kanoman&page=29&sortfield=datedesc&coll=ddd&identifier=ddd:011073912:mpeg21:a0267&resultsidentifier=ddd:011073912:mpeg21:a0267&rowid=8>

sepenuhnya melalui prosedur hukum yang sah, dan oleh sebab itu pemerintah kota harus membayar ganti rugi sebesar f3.300 dari kas kota (gemeentekas). Selain itu, bangunan pemandian umum (badkamers) dan beberapa fasilitas milik pribadi yang terletak di area pasar juga akan dipindahkan, dengan tambahan biaya sekitar f200. Dengan demikian, total kompensasi yang diberikan kepada pihak kesultanan mencapai kurang lebih f3.500. Keputusan ini menjadi bentuk pengakuan resmi pemerintah kolonial terhadap hak kepemilikan tanah Keraton Kanoman, sekaligus memperlihatkan bagaimana kesultanan masih memiliki posisi penting dalam struktur sosial dan ekonomi kota Cirebon meski kekuasaannya telah dibatasi oleh kolonial.

Dalam rapat tersebut juga disebutkan bahwa janji untuk memberikan ganti rugi sebenarnya telah muncul lebih dari satu dekade sebelumnya, tepatnya pada tahun 1920 ketika di bawah kepemimpinan Burgemeester Eyken, pemerintah kota mulai merencanakan pembangunan Pasar Kanoman. Saat itu, proyek pasar dianggap bagian dari program penataan kota modern. Namun, realisasi pembayaran terhadap Sultan baru terjadi pada tahun 1935, setelah muncul tekanan dan keberatan resmi dari pihak kesultanan. Kasus ini menunjukkan bagaimana konflik kepemilikan tanah antara otoritas kolonial dan istana pribumi kerap diabaikan hingga menimbulkan ketegangan yang panjang.<sup>185</sup>

---

<sup>185</sup> Delpher di akses pada tanggal 15 September 2025

<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?qql%5B%5D=%28date+gte+%2201-01-1919%22%29&qql%5B%5D=%28date+lte+%2201-01-1919%22%29&qql%5B%5D=%28date+lte+%2201-01-1919%22%29&qql%5B%5D=%28date+lte+%2201-01-1919%22%29>

Pada tahun 1936, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan penurunan harga bahan pokok di pasar sebagai dampak dari depresi ekonomi. Kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian yang berujung pada protes para pedagang, karena turunnya harga membuat mereka merugi, termasuk para pedagang Tionghoa. Untuk menanggulangi situasi tersebut, komunitas Tionghoa kemudian membuka layanan kredit rakyat yang memungkinkan masyarakat meminjam uang dengan lebih mudah tanpa syarat ketat seperti yang diberlakukan oleh Bank Desa atau lembaga keuangan pemerintah. Di sisi lain, masyarakat Tionghoa menunjukkan kecerdikan dalam memanfaatkan krisis ekonomi ini. Selain itu, pada masa tersebut juga telah berdiri sekitar 200 koperasi dengan beragam tujuan, seperti penyediaan peralatan rumah tangga, modal usaha, simpan pinjam, serta kredit untuk pembelian bahan-bahan batik.<sup>186</sup>

#### **D. Dampak Perkembangan Pasar Kanoman 1924-1942**

##### **1. Dampak Positif**

Perkembangan Pasar Kanoman pada masa kolonial membawa sejumlah dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Pasar ini menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu menggerakkan roda perdagangan lokal. Peningkatan jumlah pedagang dan barang dagangan yang beredar membuka lebih banyak peluang kerja, baik

---

[1921%22%29&query=markat+kanoman&coll=ddd&redirect=true&sortfield=date&identifier=ddd:010179368:mpeg21:a0172&resultsidentifier=ddd:010179368:mpeg21:a0172&rowid=1](https://www.researchgate.net/publication/351111111/figure/fig/1/figure-fig1/1921%22%29&query=markat+kanoman&coll=ddd&redirect=true&sortfield=date&identifier=ddd:010179368:mpeg21:a0172&resultsidentifier=ddd:010179368:mpeg21:a0172&rowid=1)

<sup>186</sup> Wahid.Hal.134

bagi masyarakat sekitar maupun pendatang yang mencari penghidupan di kawasan pasar. Mobilitas sosial masyarakat pun meningkat, karena masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk memperbaiki taraf hidup melalui aktivitas berdagang, bekerja di pasar, atau terlibat dalam jaringan distribusi barang.

Keramaian aktivitas perdagangan juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih dinamis. Masyarakat yang tinggal di sekitar pasar menjadi lebih terbuka terhadap interaksi dan perubahan, karena mereka berhubungan dengan berbagai kelompok etnis seperti pedagang pribumi, pedagang Tionghoa, serta pendatang dari luar Cirebon. Interaksi lintas budaya ini turut memperkaya pengalaman sosial masyarakat dan membentuk karakter kosmopolit yang khas di kawasan pasar.

Selain itu, secara simbolik, keberadaan Pasar Kanoman yang berdekatan dengan Keraton Kanoman memperkuat hubungan historis antara keraton dan masyarakat. Pasar tetap berfungsi sebagai ruang yang menunjukkan kedekatan rakyat dengan pusat kekuasaan tradisional, sehingga keraton tetap memiliki posisi sebagai penjaga nilai budaya dan spiritual masyarakat di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi.

## **2. Dampak Negatif**

Di balik perkembangan pesat Pasar Kanoman pada masa kolonial, terdapat sejumlah dampak negatif yang memengaruhi kehidupan sosial masyarakat maupun posisi Keraton Kanoman. Campur tangan pemerintah kolonial dalam pengelolaan pasar secara bertahap mengurangi kewenangan

keraton terhadap ruang ekonomi yang sebelumnya berada dalam lingkup otoritas tradisional mereka. Pengaturan pajak, regulasi pasar, serta penataan ulang sistem distribusi barang menjadikan peran Keraton Kanoman semakin melemah dalam bidang ekonomi. Situasi ini membuka jalan bagi kolonial Belanda untuk memperkuat kontrol administratif dan politiknya melalui mekanisme pasar.

Selain itu, dominasi pedagang tertentu—khususnya pedagang Tionghoa yang mendapat posisi strategis dalam jaringan distribusi kolonial—menyebabkan ketimpangan ekonomi di lingkungan pasar. Masyarakat pribumi yang memiliki modal lebih kecil sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga kompetisi dagang menjadi tidak seimbang. Monopoli informal atas jenis-jenis barang tertentu juga muncul, sehingga beberapa kelompok masyarakat lokal kesulitan bersaing.

Dari sisi sosial, perkembangan pasar yang cepat membawa perubahan pola interaksi masyarakat yang tidak selalu positif. Keramaian pasar menyebabkan meningkatnya kepadatan penduduk di kawasan tersebut, memunculkan persoalan kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Aktivitas perdagangan yang terlalu padat sering memicu konflik antar pedagang, baik karena perebutan tempat strategis maupun perbedaan kepentingan ekonomi.

Bagi Keraton Kanoman, dampak negatif paling signifikan adalah terkikisnya peran simbolik dan ekonominya akibat posisi pasar yang

semakin berada di bawah kontrol pemerintah kolonial. Pasar yang dulunya merupakan bagian dari ruang sosial-budaya keraton berubah menjadi instrumen kolonial yang secara perlahan meminggirkan posisi keraton dalam kehidupan masyarakat. Walaupun keraton masih mempertahankan otoritas budaya dan spiritual, kehilangan peran ekonomi membuat kedudukannya semakin lemah dalam struktur sosial masyarakat Cirebon.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada periode 1924–1942, Pasar Kanoman mengalami perkembangan yang cukup signifikan baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Renovasi besar pada tahun 1924 menandai peralihan dari bentuk pasar tradisional sederhana menuju pasar yang lebih permanen dengan bangunan tetap dan sistem pengelolaan yang lebih teratur. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan penataan kota yang menjadikan Pasar Kanoman sebagai salah satu pusat perdagangan di Cirebon. Sehingga banyak kebijakan yang diterapkan diantaranya perenovasian pasar besar-besaran, mengatur pajak, dan melengkapi fasilitas pasar. Selain sebagai tempat transaksi barang kebutuhan sehari-hari, masa 1924–1942 merupakan periode penting yang menandai transformasi Pasar Kanoman menjadi bagian dari sistem ekonomi perkotaan Cirebon modern.
2. Perkembangan Pasar Kanoman membawa dampak yang besar bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dan bagi Keraton Kanoman. Bagi masyarakat, pasar menjadi pusat aktivitas ekonomi yang menyediakan lapangan kerja, memperluas jaringan perdagangan, dan meningkatkan mobilitas sosial. Aktivitas perdagangan yang semakin ramai menjadikan masyarakat sekitar pasar lebih dinamis dan terbuka terhadap perubahan.



Sementara bagi Keraton Kanoman, perkembangan pasar memiliki dua sisi. Di satu sisi, pasar tetap menjadi simbol keterkaitan antara keraton dan rakyat karena letaknya yang berdekatan dan peran keraton dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun di sisi lain, pengelolaan pasar yang mulai diatur oleh pemerintah kolonial menyebabkan berkurangnya peran langsung keraton dalam bidang ekonomi. Meskipun demikian, keraton tetap mempertahankan pengaruh kultural dan spiritualnya di sekitar kawasan pasar melalui kegiatan adat dan tradisi keagamaan.

## **B. Saran**

Hasil penelitian yang telah tersusun dalam skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian mengenai sejarah sosial ekonomi Cirebon, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan pasar tradisional. Penulis juga mendorong agar penelitian lanjutan dapat menggali sumber-sumber arsip kolonial serta meneliti aspek arsitektur dan tata ruang pasar-pasar lain di Kota Cirebon. Dengan demikian, kajian tentang Pasar Kanoman dan pasar tradisional di Cirebon akan semakin lengkap dan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Cirebon pada masa kolonial. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai sejarah perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Cirebon pada tahun 1924–1942, serta menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai historis pasar tradisional sebagai warisan budaya lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

Gaastra, F S. "Organisasi VOC." *ANRI*, 2007.

Staatsblad. No. 122 Tahun 1906

Staatsblad. No. 267 Tahun 1921,

Staatsblad. No.379 Tahun 1914,

Staatsblad. No. 380 Tahun 1914,

### Surat Kabar

Bruining "Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indië" 02 April 1859

<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010483048:mpeg21:a0018>

Hallermann, J. "De Sumatra post" 06 Maret 1926

<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBDDD02:000198420:mpeg21:a0026>

Mij tot Expl. van Dagbladen, NV "Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië" 25 Februari 1920

<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010179368:mpeg21:a0172>

Mij tot Expl. van Dagbladen, NV "Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië" 19 Agustus 1930

<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010228967:mpeg21:a0025>

Groot, D., Kolff & Co "De locomotief" 05 Januari 1926

<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001691009:mpeg21:a00001>

Groot, D., Kolff & Co "De locomotief" 02 April 1926

<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001693082:mpeg21:a00099>

Groot, D., Kolff & Co "De locomotief" 03 Juli 1930

<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001722005:mpeg21:a00027>

Kolff & Co. "Bataviaasch nieuwsblad" 23 Juli 1930

<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011072300:mpeg21:a0194>

Kolff & Co. "Bataviaasch nieuwsblad" 27 Mei 1935

<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011073912:mpeg21:a0267>

Mij tot Expl. van Dagbladen, NV “Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië” 22 Juni 1931

<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010229218:mpeg21:a0122>

### Buku

- Atja. *Carita Purwaka Caruban Nagari: Karya Sastra Sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah*. Pusat Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1986.
- Bochari, M Sanggupri. *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon*. Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
- Breman, Jan. *Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi Di Jawa 1720-1870*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Vol. 17. Rlau: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.
- Gedenkboek Der Gemeente Cheribon 1906—1931*. Cheribon: Stadsbestuur Van Cheribon, n.d.
- Herdiansyah, Wildan. *Setapak Peninggalan Sejarah Di Nusantara*. 1st ed. Jakarta: Rama Edukasitama, 2022.
- Herlina Lubis, Nina. “Sejarah Perkembangan Islam Di Jawa Barat.” *Jawa Barat: Pemerintah Provinsi Jawa Barat*, 2011.
- Hernawan, Wawan, and Ading Kusdiana. *Biografi Sunan Gunung Djati: Sang Penata Agama Di Tanah Sunda*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Kusdiana, Ading, and Wawan Hernawan. “Geger Ciayumajakuning: Mengungkap Jejak Perjuangan Ki Bagus Rangin Di Dalam Menentang Pemerintah Kolonial Belanda Dan Inggris Pada Abad Ke-19 M.” PUSBANGTER, 2022.
- Lombard, Denys. “Nusa Jawa: Silang Budaya Bagian II (Jaringan Asia).” *Le Carrefour Javanais*, 2005.
- Oki. *Seri-Sejarah-Peninggalan-Peninggalan-Kerajaan-Tarumanegara*, n.d.
- Rizal, J J, Wilson Wilson, Martiapri Yanti, and Margaretha Feybe Lumanauw. *Menguak Pasar Tradisional Indonesia*. Direktorat Jenderal Kebudayaan,

1986.

Rosidin, Didin Nurul. *Kerajaan Cirebon. Correspondencias & Análisis*. Puslitbang

Lektur dan khazanah keagamaan, 2013.

Setiono, Benny G. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. TransMedia, 2008.

Suteja. *Cirebonologi*. 1st ed. Vol. 1. Cirebon: PoiesisMeta, 2024.

Wahid, Abdul. *Bertahan Di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa Dan Ekonomi Kota*

*Cirebon 1930-1940*. Edited by M. Nursam. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009.

### **Skripsi, Thesis dan Disertasi**

Aldilah, Suci Nursya'bani. "Sejarah Dan Perkembangan Pasar Pada Masa Gemeente Cirebon Tahun 1906-1942." UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024.

Fahlevi, kresna Azhi. "Dinamika Hubungan Kesultanan Cirebon Dengan Kesultanan Banten Tahun 1649-1678 M." UIN SUKA Yogyakarta, 2024.

Firman, Husnul Khatimah. "Pasar Sentral Bulukumba (1995-2022)." Universitas Negeri Makassar, 2023.

Hikmawan, Ade. "Perkembangan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang Kabupaten Agam 1970-2012," Universitas Andalas 2013, 1–84.

Ilham Ainur Akbar. "Perkembangan Pasar Tradisional Genteng I Kabupaten Banyuwangi 1992-2018 Perkembangan Pasar Tradisional Genteng I Kabupaten Banyuwangi 1992-2018 Skripsi." UIN KHAS Jember, 2024.

Nurtanti, Ike Evi. "Pengaruh Landrente Terhadap Penguasaan Tanah Dan Penggunaan Tanah Di Kecamatan Manguharjo, Madiun (1860-1870)," Universitas Sebelas Maret, 2014.

### **Jurnal**

Adi, Agus Prabowo, Danang Marsudi, Edy Iwan Bangun, Juli Herman, and Manahan Budiarto Pandjaitan. "Peran Sunan Gunung Jati Dalam Pertahanan Maritim (Analisis Historis Riset ALRI Di Cirebon)." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 12 (2024): 13599–606.

Al-Haqiri, M Syatibi. "Penyebar Islam Di Pantai Utara Jawa: Mengungkap Peran Syaikh Quro Karawang." *Jurnal Lektur Keagamaan* 10, no. 1 (2012): 51–74.

- Aliyah, Istijabatul. "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan." *Cakra Wisata* 18, no. 2 (2017).
- Alnoza, Muhamad. "Makna Artefak Masa Hindu-Buddha Di Kraton Kasepuhan Cirebon: Tinjauan Semiotika Peirce." *Berkala Arkeologi Sangkhakala* 24, no. 2 (2021): 107–20.
- Anggastri, Sabrina Nobelia Putri. "Preangerstelsel: Sistem Tanam Paksa Kopi Priangan Tahun 1723-1892." *Estoria: Journal of Social Science and Humanities* 3, no. 2 (2023): 445–59.
- Deviani, Firlianna Tiya. "Perjanjian 7 Januari 1681 Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Politik Ekonomi Di Kerajaan Cirebon (1681 M-1755 M)." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 1, no. 1 (2016).
- Djafar, Hasan. "Prasasti Huludayeuh." *Berkala Arkeologi* 14, no. 2 (1994): 197–202.
- Farhana, Safira, Grace Angelina Situmorang, Frederik Noel Siregar, and Handika Syaifullah. "Warisan Peninggalan Herman Willem Daendels Di Pulau Jawa." *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 277–81.
- Farid, Muhamad Miftah. "Perjuangan Sunan Gunung Djati Dalam Penyebaran Islam Di Jawa Barat." *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 7, no. 2 (2022): 134–49.
- Firmanto, Alfian. "Historiografi Islam Cirebon (Kajian Manuskrip Sejarah Islam Cirebon)." *Jurnal Lektur Keagamaan* 13, no. 1 (2015): 31–58.
- Hariyanto, Oda Ignatius Besar. "Destinasi Wisata Budaya Dan Religi Di Cirebon." *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 2 (2016): 214–22.
- Harkantiningih, Naniek. "Pengaruh Kolonial Di Nusantara." *Kalpataru* 23, no. 1 (2014): 67–80.
- Hermawan, Iwan, and Revi Mainaki. "Pemetaan Jalur Dan Tinggalan Perkeretaapian Masa Kolonial Belanda Di Wilayah Cirebon Timur." *Jurnal Sositologi* 18, no. 3 (2019): 560–74.
- Hermawan, Iwan, Octaviadi Abrianto, and Revi Mainaki. "Pengaruh Perkeretaapian Terhadap Perkembangan Struktur Tata Ruang Kota Cirebon Berdasarkan

- Tinggalan Arkeologis.” *KALPATARU* 29, no. 2 (2020): 117–32.
- Hermawan, Iwan. “Stasiun Kereta Api Cirebon Prujakan Dalam Tata Ruang Kota Cirebon Pada Masa Kolonial Belanda (1897-1942).” *WALENNAE: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan Dan Tenggara* 20, no. 1 (2022): 69–81.
- Iryana, Wahyu, Muhamad Bisri Mustofa, and Muhammad Saidun Anwar. “Budaya Bendawi Pra Islam Di Keraton Cirebon Indonesia.” *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 19–38.
- Jamil, Budi Prasidi. “Perpecahan Kesultanan Cirebon.” *Jurnal Kalijaga*, 2013, 33.
- Jayanto, J. “Industri Gula Di Karesidenan Cirebon Tahun 1870-1930 Dan Dampaknya Bagi Masyarakat.” *Ilmu Sejarah-SI* 1, no. 1 (2016): 1–15.
- Kurniawan, Hendra. “Dampak Sistem Tanam Paksa Terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870.” *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (2014): 163–72.
- Lasmiyati, Lasmiyati. “Keraton Kanoman Di Cirebon (Sejarah Dan Perkembangannya).” *Patanjala* 5, no. 1 (2013): 128–43.
- . “Kopi Di Priangan Abad XVIII-XIX.” *Patanjala* 7, no. 2 (2015): 217–32.
- Lestari, Dian, Heri Kurnia, Dina Nurayu Ningtyas, and Isrofia Laela Khasanah. “Peran Keraton Kasepuhan Cirebon Sebagai Pusat Pemeliharaan Dan Pembangunan Budaya.” *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 1, no. 2 (2021): 98–113.
- Loka, Sonia Fitria, Novita Mandasari Hutagaol, and Arnesih Arnesi. “Pasar Jodoh Sebagai Pusat Perdagangan Masyarakat Batam Tahun 1978-2020.” *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2024): 50–64. <https://doi.org/10.33373/hjpsps.v9i1.6830>.
- Masduqi, Zaenal, Aah Syafa’ah, Didin Nurul Rosidin, Farihin Farihin, and Asep Saefullah. “Menyatukan Kekuatan Islam Di Jawa: Dinamika Relasi Kuasa Antara Cirebon Dengan Demak Pada Masa Awal Islam Di Indonesia Abad Ke-15-16 M.” *Dialog* 48, no. 1 (2025): 41–57.
- Maulana, Muhammad Hendra, and Ina Helena Agustina. “Perspektif Pengunjung Terhadap Tradisi Budaya Keraton Kasepuhan Dan Keraton Kanoman Cirebon.” In *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*,

2:336–41, 2022.

Mutawally, Anwar Firdaus, and Dade Mahzuni. “Kehidupan Masyarakat Agraris Dan Maritim Cirebon Awal Abad Ke-20: Suatu Tinjauan Ekologi Manusia.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 6 (2023): 2053–64.

Pangestu, Dimas Aldi, and Zulkarnain Zulkarnain. “Modernisasi: Sukabumi Dalam Arus Perubahan Sosial Ekonomi Era Kolonial Belanda.” *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 16, no. 2 (2020).

Raharjo, Yoel Kurniawan. “Kebijakan Pemerintahan Daendels Di Jawa 1808-1811.” *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 10, no. 1 (2024): 8–15.

Rahmi, Ain. “Mekanisme Pasar Dalam Islam.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2015): 177–92.

Rozi, Bahru, and Ahmad Misbah. “Sejarah Kesultanan Cirebon Dan Problematikanya Tahun 1677-1752.” *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 1, no. 1 (2022): 21–39.

Sanusi, Anwar, Faisal Arif, and Rafan S Hasyim. *Perubahan Eksistensi Sungai Dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon Pada Masa Hindia Belanda Tahun 1900-1942*. Yayasan Wiyata Bestari Samastra, 2022.

Sinaga, Rosmaida, Juan Vito Simanjuntak, Ocha Primalia Tondang, and Suci Larasati. “Masa Pemerintahan VOC Di Nusantara: Awal Kedatangan Hingga Penyebab Bubarnya VOC.” *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 389–97.

Sucipto, Toto. “Eksistensi Keraton Di Cirebon Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Keraton-Keraton Di Cirebon.” *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research* 2, no. 3 (2010): 472–89.

Susilo, Agus, and Sarkowi Sarkowi. “Pengaruh Politik Cultuurstelsel Terhadap Perkembangan Masyarakat Indonesia Tahun 1830-1870.” *SWADESI: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 1, no. 1 (2020): 14–23.

Suta, M. “Fungsi Dan Makna Lingga Dalam Ajaran Agama Hindu.” *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial Budaya* 13, no. 2 (2018): 88100.

Syafiera, Aisyah. “Perdagangan Di Nusantara Abad Ke-16.” *Avatara: Jurnal*



*Pendidikan Sejarah* 4, no. 3 (2016).

Tendi, Tendi. “Antara Sejarah Peteng Dan Sejarah Weteng: Mengidentifikasi Objek Sengketa Dalam Kisruh Keraton Kasepuhan Cirebon.” *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 11, no. 2 (2023).

Utami, Nofita Deta, Dhalia Soetopo, and Topan Priananda Adinata. “Sejarah Perkembangan Pasar Tradisional Songgon Tahun 1960-2022 ( History Of The Develompment Of The Traditional Market Songgon Years 1960-2022 ).” *RINONTJE: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah* 4, no. 2 (2023): 76–88.

Zulfah, Siti. “Islamisasi Di Cirebon: Peran Dan Pengaruh Walangsungsang Persepektif Naskah Carios Walangsungsang.” *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 6, no. 1 (2018).

#### **Artikel Ilmiah**

A. B. Lopian, and Edi Sedyawati. “Kajian Cirebon Dan Kajian Jalur Sutra.” In *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, 2nd ed., 1–8. Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997.

Irma M. Johan. “Penelitian Sejarah Kebudayaan Cirebon Dan Sekitarnya Antara Abab XV--XIX: Tinjauan Bibliografi.” In *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, 2nd ed., 9–34. Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997.

Leirissa, RZ. “Cirebon Dalam Arsip VOC.” In *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, 2nd ed., 203–8. Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997.

Mahendra, Fredy, Gema Haqqur R, Hari Lillah Agung, Lalu Erza Aryadhi, M Hilmi Afifan, Probo Arie Seno, Reza Pradistya A, and Revianto Budi Santosa. “Arsitektur Lansekap Keraton Kasepuhan Cirebon,” 2016.

PR. Arief Natadiningrat. “Potensi Dan Prospek Perekonomian Cirebon.” In *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, 2nd ed., 231–68. Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997.

Prasetijo, Adi. “Peran Pasar Bagi Perubahan Sosial Orang Rimba.¶ in.” In *Seminar Globalisasi & Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru*,



2001.

Sudjana, T.D. “Pelabuhan Cirebon Dahulu Dan Sekarang.” In *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, 2nd ed., 209–30. Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997.

Uka Tjandarasasmita. “Bandar Cirebon Dalam Jaringan Pasar Dunia.” In *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, 2nd ed., 55–76. Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997.

Utami, Kartikya Ishlah, Siti Eltsany Shofya Umari, Cahyaning Tyas Setyowati, and Arif Budi Sholihah. “Tata Letak Dan Tata Bangunan Kraton Kanoman Dan Kraton Puro Pakualaman,” 2016.

Yono, Singgih Tri Sulisti. “Dari Lemahwungkuk Hingga Cheribon : Pasang-Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awai Abad XX.” In *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, 2nd ed., 77–116. Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997.

Zuhdi, Susanto. “Hubungan Pelabuhan Cirebon Dengan Daerah Pedalaman: Suatu Kajian Dalam Kerangka Perbandingan Dengan Pelabuhan Cilacap, 1800-1940.” In *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, 2nd ed., 117–28. Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997.

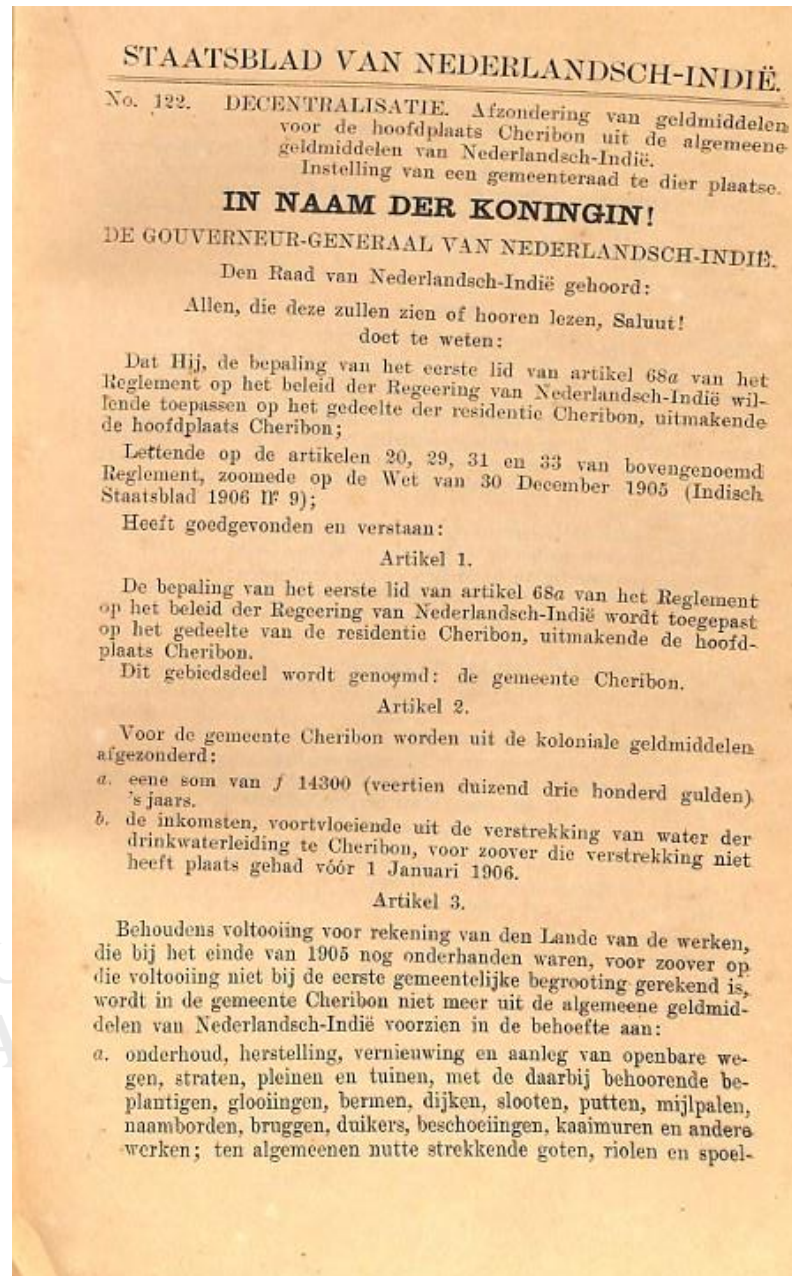
#### **Artikel Internet**

Romadona, Suci Nur. “Kontribusi Kesultanan Cirebon Dalam Pembentukan Peradaban Islam Di Wilayah Jawa Barat,”  
[https://www.academia.edu/103869238/KONTRIBUSI\\_KESULTANAN\\_CIREBON\\_DALAM\\_PEMBENTUKAN\\_PERADABAN\\_ISLAM\\_DI\\_WILAYAH\\_JAWA\\_BARAT?source=swp\\_share](https://www.academia.edu/103869238/KONTRIBUSI_KESULTANAN_CIREBON_DALAM_PEMBENTUKAN_PERADABAN_ISLAM_DI_WILAYAH_JAWA_BARAT?source=swp_share)

Wijayanti, Fransisca Erina Febri. “Sejarah Indonesia Masa Persebaran Islam Sampai Zaman VOC.” *Masa Persebaran Islam Dan VOC*, 2022.  
[https://www.academia.edu/77065006/Sejarah\\_Indonesia\\_Masa\\_Persebaran\\_Islam\\_Sampai\\_Zaman\\_VOC](https://www.academia.edu/77065006/Sejarah_Indonesia_Masa_Persebaran_Islam_Sampai_Zaman_VOC)

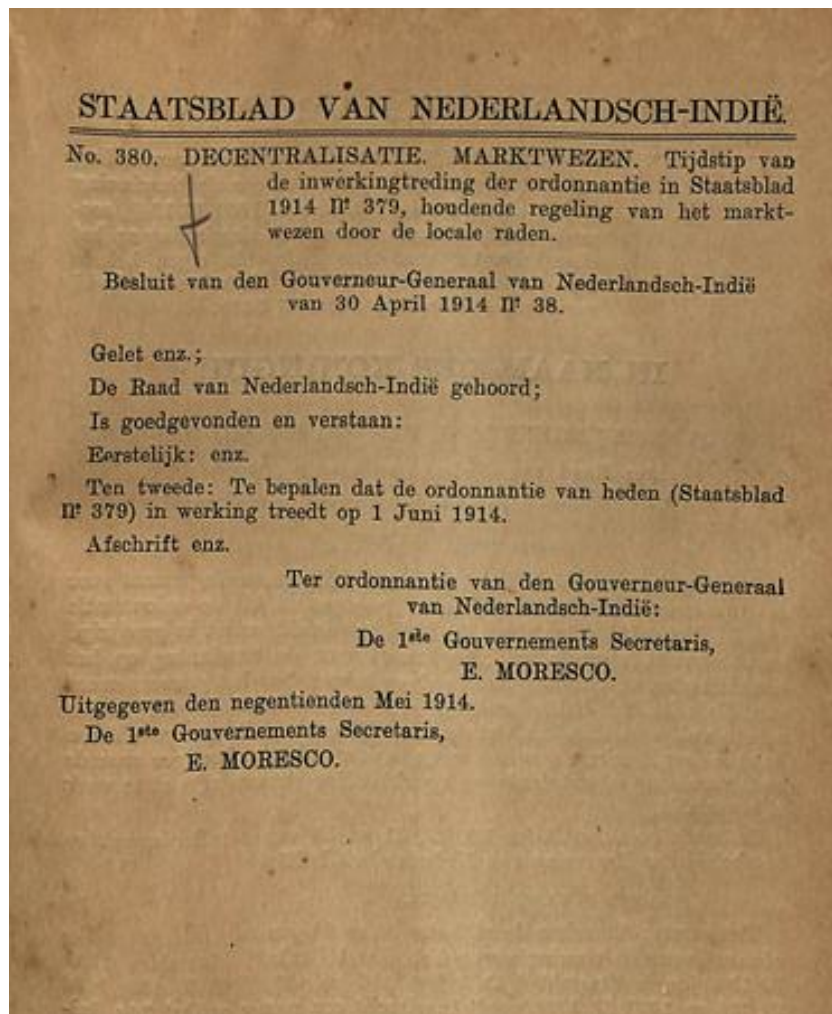
## LAMPIRAN

### Lampiran 1



Tentang: pengumuman resmi pemerintah kolonial Hindia Belanda mengenai penetapan Cirebon sebagai gemeente (kotapraja) di tahun 1906

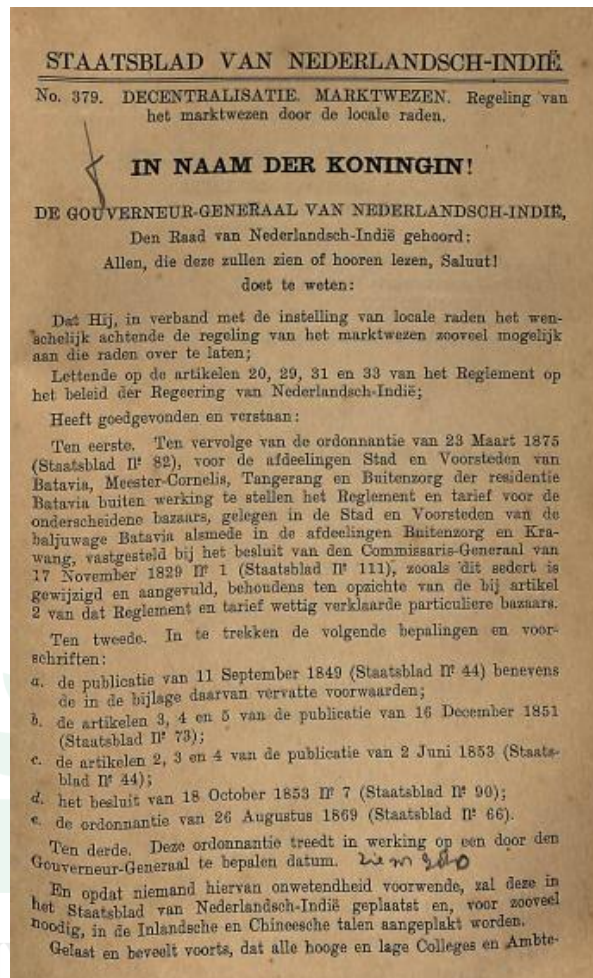
## Lampiran 1



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Tentang: pengumuman resmi pemerintah kolonial Hindia Belanda mengenai penetapan waktu berlakunya ordonansi tentang pengaturan pasar (marktwezen) oleh dewan lokal (locale raden). Bagian dari kebijakan desentralisasi Hindia Belanda (decentralisatie) yang mulai memberi kewenangan kepada pemerintah daerah/lokal untuk mengatur urusan tertentu, termasuk pasar. Menunjukkan bagaimana pemerintah kolonial berusaha menata perekonomian lokal lewat regulasi resmi yang bersifat mengikat. mulai 1 Juni 1914.

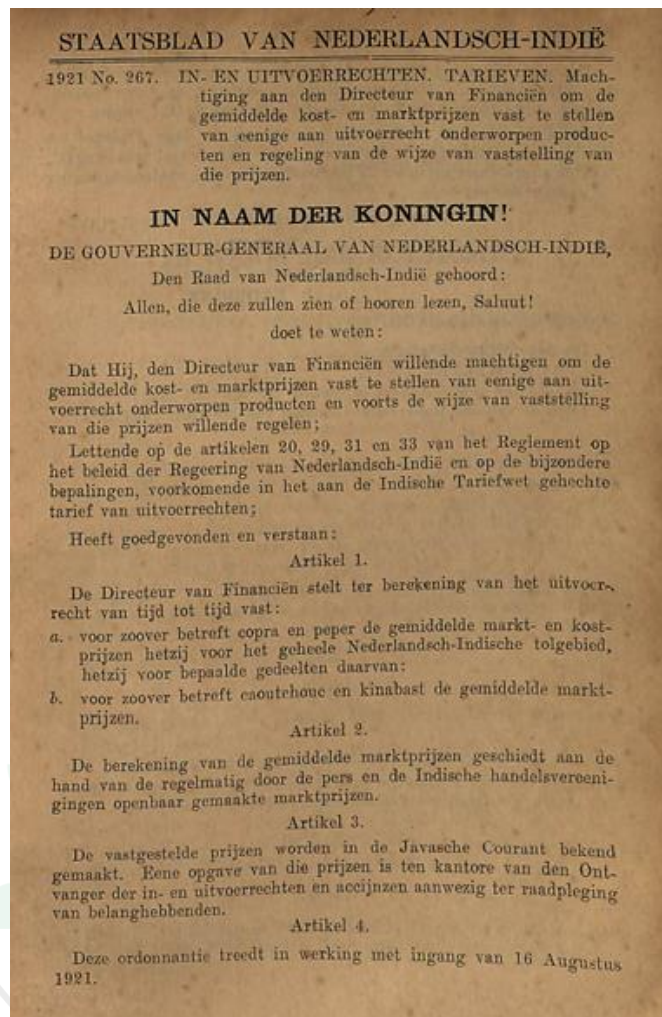
### Lampiran 3



“Staatsblad No. 379 Tahun 1914 adalah peraturan baru tentang desentralisasi urusan pasar: 1. Menghapus ketentuan lama tentang pasar (berbagai ordonansi sejak 1849–1867). 2. Menyerahkan pengaturan pasar kepada dewan lokal (locale raden). 3. Berlaku khusus di wilayah yang sudah memiliki dewan lokal, seperti Batavia dan daerah lain. 4. Menegaskan bahwa urusan pasar kini merupakan bagian dari kewenangan otonomi daerah.”



## Lampiran 4



ketentuan yang memberi wewenang kepada Direktur Keuangan untuk menetapkan harga pasar rata-rata di Hindia Belanda dan harga pasar luar negeri sebagai dasar perhitungan bea ekspor, serta mengatur cara perhitungan, jangka waktu berlakunya, dan kewajiban pengumumannya, sehingga pemungutan tarif ekspor dapat dilakukan secara sah, teratur, dan seragam.

## Lampiran 5



keputusan resmi pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1927 yang menetapkan pembentukan dan pengaturan wilayah pelabuhan (havengebied) di Kota Cirebon, serta mengubah aturan lama tentang kotapraja Cirebon.

## Lampiran 6

In deze korte verklaring nu ligt de on-  
verkwikkelijke zaak van den tegenwoordigen  
tijd, aangezien daarin niet nader werd ge-  
stipuleerd welke gronden precies tot het  
sultanaat behoorden.  
Wel werd door de regeering, juist een  
eeuw geleden bepaald, dat de sultans een  
maandelijksch inkomen van f 1500 zouden  
krijgen, welke regeling nu nog geldt.  
Het gaat nu over twee dingen. In den  
loop der jaren zijn er stukken grond van  
dit sultanaat verkocht, ook — in 1918 —  
aan de gemeente. Deze gronden werden  
niet steeds als zoodanig onderkend en de

## Lampiran 7

Groote activiteit is betracht op het terrein  
der pasars. Afgewerkt en grondig verbeterd  
is pasar Pagi, omgebouwd en gemoderni-  
seerd pasar Balong, nieuw opgetrokke  
pasar **Kanoman** (de te dicht bijstaande  
woningen zijn werd gesloopt). De nieuwe  
pasar Lalang is ingericht voor een pasar voor  
de duizenden arbeiders der fabriek van de  
British American Tobacco Cy. en zoodr.  
pasar Kasapoelian gereed is (volgende  
maand) kan de aloon-aloon aldaar geheel  
ontruimd worden. Wordt alzoo tevens de  
strijd aangebonden tegen onhygiënische  
warongs en venters — gemeentewerken ont-  
wierp een doelmatig type straatwarong,

**Gambar Kabar Cirebon Tahun 1925. Pasar Kanoman  
telah dibangun baru (barisan rumah yang terlalu  
dekati telah dibongkar)**

Sumber:

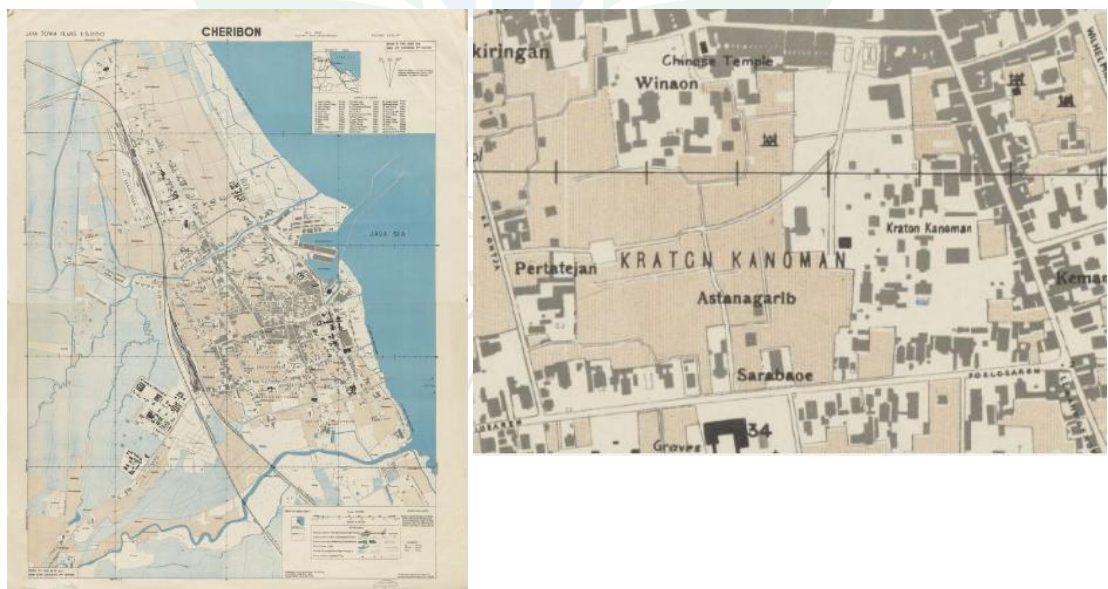
[https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=kanoma  
n+cheribon&coll=ddd&sortfield=date&page=15&identifi  
er=MMKB23:001691009:mpeg21:a00001&resultsidentifi  
er=MMKB23:001691009:mpeg21:a00001&rowid=5](https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=kanoma<br/>n+cheribon&coll=ddd&sortfield=date&page=15&identifi<br/>er=MMKB23:001691009:mpeg21:a00001&resultsidentifi<br/>er=MMKB23:001691009:mpeg21:a00001&rowid=5)

## Lampiran 8

Waarom wordt er niet bevolen dat het vleesch in het abattoir verdeeld wordt? De onsmakelijke optocht over Kali Baroe en Kedjasaan is dan ook afgeloopen en het transport kan dan in gesloten manden plaats vinden. Vooral in deze typhus-tijden (waarvoor heer Haffenreuter op de laatste vergadering van den gemeenteraad nog verzocht pasar **Kanoman** met viiegengaas af te dekken. d.w.z. de visch- en vleesch-afdeling) lijkt ons dit vleeschvervoer zelfs gevaarlijk.

Of durft men de Inlandsche slagers niet te dwingen de hygiënische maatregelen te volgen?

## Lampiran 9



**Gambar Peta Cirebon tahun 1944 menandakan terdapat perkampungan china dekat pasar kanoman**

Sumber: KITLV

[https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/812331/solr\\_nav%5Bid%5D=4c0bb178addcd96ca123&solr\\_nav%5Bpage%5D=0&solr\\_nav%5Boffset%5D=2](https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/812331/solr_nav%5Bid%5D=4c0bb178addcd96ca123&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=2)



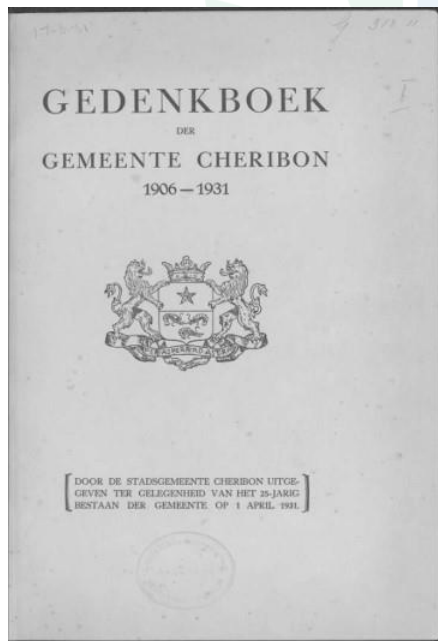
## Lampiran 10



**Gambar Pasar Kanoman tampak depan sekitar 1900-1940**

Sumber : Wereld Museum <https://hdl.handle.net/20.500.11840/233101>

## Lampiran 11



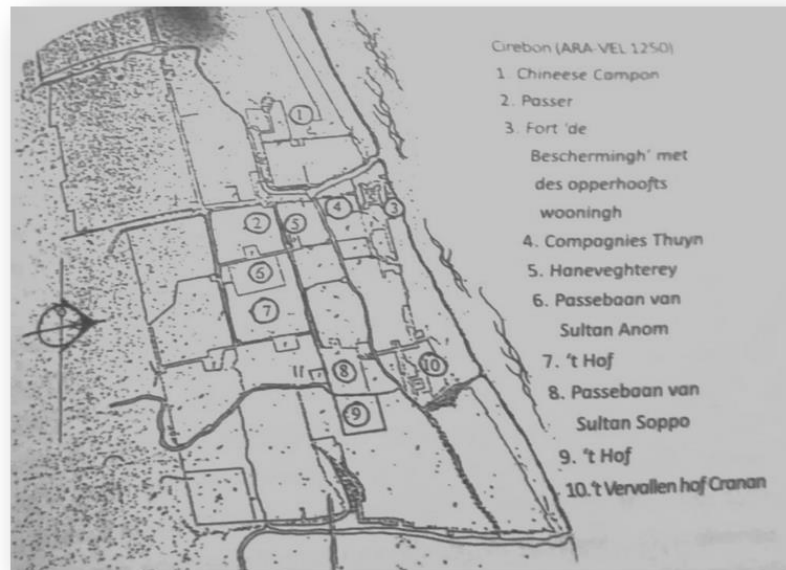
## Lampiran 12



**Gambar Peta Kota Cirebon Tahun 1918-1921**

Sumber : Arsip Kendi Pertula

### Lampiran 13



**Gambar Peta kuno kota Cirebon antara tahun 1700-an menggambarkan letak Pasar**

Sumber: Arsip Kendi Pertula

### Lampiran 14



**Gambar Pasar Kanoman kebakaran sekitar tahun 1970-1980**

Sumber: Dokumen Keraton



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Imam Baihaqi

NIM : 221104040006

Program studi : Sejarah dan Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Instansi : Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah terdahulu yang telah dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan juga daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan yang ada dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 10 Desember 2025

Saya yang menyatakan

  
METERAI TEMPEL  
2D2AKX549657971

**M. Imam Baihaqi**  
NIM 221104040006

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Penulis

Nama : M. Imam Baihaqi  
Tempat/ Tanggal Lahir : Cirebon, 06 Juni 2004  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Gg Valeben, RT 009, RW 005, Dusun  
Kliwon, Desa Waled Desa, Kecamatan  
Waled, Kabupaten Cirebon.  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam

### B. Riwayat Pendidikan

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. RA Al-Amin      | 3. MTs Al-Mutawally |
| 2. MI Al-Mu'awanah | 4. MA Al-Mutawally  |

### C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris OSIS Al-Mutawally 2020-2021
2. Bendahara PMR Wira Al-Mutawally 2019-2020
3. Sekretaris Perguruan Pencak Silat Padjadjaran Nasional Ranting  
Cilimus Rayon AL-Mutawally. 2019-2021
4. Kameramen dan desainer Kampus UIN KHAS Jember (Kontributor  
Humas) 2023-2025
5. Kepala Devisi Relasi, komunikasi dan Informasi HMPS SPI UIN  
KHAS Jember. 2024-2025
6. Anggota Yayasan Studi Sejarah Kulit Pohon